

WAKAF
BUKU
GRATIS

DIGITALISASI DAKWAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEPSI ISLAM DI DUNIA BARAT

Ahmad Zakiyuddin
Rasel Mochamad Efendi

 Unfari
PRESS

**DIGITALISASI DAKWAH
DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PERSEPSI
ISLAM DI DUNIA BARAT**

Ahmad Zakiyuddin
Rasel Mochamad Efendi

Unfari Press

DIGITALISASI DAKWAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEPSI ISLAM DI DUNIA BARAT

Ahmad Zakiyuddin
Rasel Mochamad Efendi



Copyright @2026, pada penulis
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit
sebagai pemegang hak publikasi.

Cetakan I, Januari 2026
Editor: Ahmad Zakiyuddin, Rasel Mochamad Efendi
Tata Letak: Rasel Mochamad Efendi
Desain Sampul: Rasel Mochamad Efendi

Diterbitkan oleh Unfari Press (Anggota IKAPI)
Jl. Cisaranten Kulon No.140 Bandung 40293
Telp. 022-7835813 e-mail:
unfaripress01@gmail.com

ISBN: XXX-XXX-XXXXX-X-X



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga e-book berjudul Digitalisasi Dakwah dan Dampaknya terhadap Persepsi Islam di Dunia Barat ini dapat disusun dan diselesaikan.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik dakwah Islam. Dakwah yang sebelumnya identik dengan ruang fisik seperti masjid, majelis taklim, dan forum tatap muka, kini mengalami transformasi signifikan melalui media sosial, platform video, podcast, dan berbagai kanal digital lainnya.

Dalam konteks global, persepsi terhadap Islam kerap dibentuk oleh narasi media, pengalaman politik internasional, serta dinamika hubungan antara dunia Islam dan Barat. Oleh karena itu, digitalisasi dakwah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena keagamaan, melainkan juga sebagai bagian dari proses sosial, kultural, dan politik global.

Penulis menyadari bahwa e-book ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan pembahasan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Bandung, 29 Desember 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	1
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA	
KONSEPTUAL	1
1.1 Teori Dakwah dalam Islam Kontemporer.....	13
1.2 Teori Agama dan Media Digital (Digital Religion)	17
1.3 Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional	20
1.4 Teori Persepsi, Identitas, dan Representasi....	24
1.5 Konsep Islamophobia dalam Diskursus Global	27
1.6 Soft Power dan Diplomasi Publik Berbasis Budaya dan Agama	31
1.7 Kerangka Konseptual Penelitian	34
BAB II.....	38
METODOLOGI PENELITIAN.....	38
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
2.2 Objek dan Fokus Kajian	41
2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
2.4 Teknik Analisis Data	47
2.5 Teknik Triangulasi Data dan Teori.....	50
2.6 Keterbatasan Penelitian.....	54
BAB III	58
DIGITALISASI DAKWAH ISLAM: POLA, AKTOR, DAN MEDIA	58
3.1 Evolusi Dakwah Islam dari Konvensional ke Digital	59
3.2 Platform Digital sebagai Medium Dakwah Global.....	62

3.3 Aktor Dakwah Digital: Ulama, Influencer, dan Komunitas	65
3.4 Otoritas Keagamaan dan Legitimasi di Ruang Digital	68
3.5 Algoritma, Viralitas, dan Kontestasi Narasi Dakwah.....	71
BAB IV	76
ISLAM, MEDIA GLOBAL, DAN KONSTRUKSI PERSEPSI DI DUNIA BARAT	76
4.1 Sejarah Representasi Islam di Media Barat	77
4.2 Media Arus Utama, Media Digital, dan Islamophobia	79
4.3 Diskursus Keamanan, Terorisme, dan Islam .	82
4.4 Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik Barat.....	85
4.5 Muslim Diaspora dan Identitas di Ruang Digital	88
BAB V.....	94
DAMPAK DIGITALISASI DAKWAH TERHADAP PERSEPSI ISLAM DI DUNIA BARAT.....	94
5.1 Dakwah Digital sebagai Counter-Narrative Islamophobia	95
5.2 Perubahan Pola Pemahaman Islam di Kalangan Audiens Barat	98
5.3 Dakwah Digital, Dialog Antarbudaya, dan Toleransi	102
5.4 Tantangan Distorsi, Radikalisasi, dan Politisasi Agama.....	106
5.5 Evaluasi Efektivitas Dakwah Digital dalam Skala Global	109
BAB VI	114
DIGITALISASI DAKWAH DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	114

6.1 Agama sebagai Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional.....	115
6.2 Dakwah Digital dan Diplomasi Publik Islam	118
6.3 Negara, Organisasi Islam, dan Strategi Dakwah Digital	122
6.4 Dakwah Digital sebagai Instrumen Soft Power Global.....	125
6.5 Implikasi bagi Hubungan Islam-Barat	130
6.6 Strategi Konten dan Diplomasi Digital Islam	134
BAB VII.....	138
PENUTUP	138
7.1 Kesimpulan	139
7.2 Implikasi Teoretis.....	140
7.3 Implikasi Praktis dan Kebijakan	143
7.4 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya	146
DAFTAR PUSTAKA.....	150

BAB I
LANDASAN TEORI
DAN KERANGKA
KONSEPTUAL

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan struktural yang sangat signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga keagamaan. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial baru tempat manusia membangun relasi, membentuk identitas, serta memproduksi dan mendistribusikan makna secara kolektif (Castells, 2010). Dalam konteks ini, teknologi digital berperan sebagai infrastruktur utama yang membentuk pola interaksi masyarakat global kontemporer.

Transformasi digital tersebut juga membawa implikasi besar terhadap cara manusia memahami dan mempraktikkan agama. Agama tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai sistem kepercayaan yang hidup dalam ruang privat atau institusional semata, tetapi juga sebagai fenomena publik yang hadir dan berinteraksi secara aktif di ruang digital. Studi tentang religion online menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi ekspresi keagamaan, diskusi teologis, pembentukan komunitas iman, serta kontestasi otoritas keagamaan (Campbell, 2013; Hjarvard, 2011). Dengan demikian, agama termasuk Islam tidak berada di luar arus digitalisasi, melainkan mengalami proses adaptasi dan transformasi yang kompleks.

Islam sebagai agama global dengan jumlah pemeluk yang tersebar di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan dan peluang yang khas dalam era digital. Praktik dakwah Islam yang secara

historis dilakukan melalui mimbar masjid, majelis ilmu, pesantren, dan interaksi tatap muka kini mengalami pergeseran signifikan menuju ruang digital. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan situs web keislaman menjadi medium utama baru dalam penyebaran pesan dakwah. Melalui medium ini, pesan-pesan Islam dapat disampaikan secara instan, visual, dan interaktif, serta menjangkau audiens lintas negara dan lintas budaya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Bunt, 2018).

Digitalisasi dakwah tidak hanya mengubah medium penyampaian pesan, tetapi juga memengaruhi struktur otoritas dan pola komunikasi keagamaan. Dalam ruang digital, otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh ulama atau institusi formal, melainkan juga diakses oleh individu-individu yang memiliki kemampuan komunikasi dan basis pengikut yang besar. Fenomena ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai dai digital atau religious influencers, yang berperan penting dalam membentuk wacana keislaman di ruang publik daring (Eickelman & Anderson, 2003). Perubahan ini menunjukkan bahwa dakwah digital merupakan fenomena sosial yang dinamis dan sarat dengan implikasi ideologis, kultural, dan politik.

Di sisi lain, posisi Islam dalam diskursus global, khususnya di dunia Barat, kerap berada dalam situasi yang problematik. Persepsi negatif terhadap Islam tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui proses historis yang panjang. Warisan kolonialisme, orientalisme, serta relasi kuasa antara Barat dan dunia Islam telah menghasilkan representasi Islam sebagai "the Other" yang dianggap

asing, inferior, dan berpotensi mengancam nilai-nilai Barat (Said, 1981). Representasi ini kemudian diperkuat oleh dinamika politik internasional dan konflik geopolitik yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim.

Peristiwa serangan 11 September 2001 menjadi titik balik penting dalam relasi Islam dan Barat. Pasca-9/11, diskursus keamanan global semakin mengaitkan Islam dengan isu terorisme, radikalisme, dan ancaman keamanan internasional. Media arus utama Barat memainkan peran signifikan dalam memperkuat stereotip tersebut melalui framing pemberitaan yang sering kali menyederhanakan kompleksitas Islam dan dunia Muslim (Cesari, 2013). Akibatnya, Islamophobia meningkat di berbagai negara Barat, yang tercermin dalam diskriminasi sosial, kebijakan imigrasi yang restriktif, serta meningkatnya kejahatan berbasis kebencian terhadap umat Muslim.

Dalam konteks tersebut, persepsi terhadap Islam tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial umat Muslim di Barat, tetapi juga memengaruhi hubungan internasional antara negara-negara Barat dan dunia Islam. Persepsi negatif terhadap Islam dapat membentuk preferensi kebijakan luar negeri, legitimasi intervensi politik dan militer, serta sikap publik terhadap isu-isu global yang melibatkan negara-negara Muslim. Oleh karena itu, persepsi Islam merupakan variabel penting dalam analisis hubungan internasional kontemporer (Wendt, 1999).

Digitalisasi dakwah muncul dalam konteks global yang sarat dengan ketegangan persepsi tersebut. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang strategis bagi umat Islam untuk menghadirkan narasi

alternatif yang lebih otentik, moderat, dan kontekstual tentang Islam. Dakwah digital memungkinkan pesan-pesan keislaman disampaikan secara langsung kepada audiens Barat tanpa harus melalui filter media arus utama. Dalam kerangka ini, dakwah digital dapat dipahami sebagai bentuk counter-narrative terhadap Islamophobia dan misrepresentasi Islam (Nye, 2004).

Namun, di sisi lain, dakwah digital juga menghadapi berbagai tantangan serius. Ruang digital yang terbuka dan algoritmik memungkinkan terjadinya fragmentasi wacana dan polarisasi narasi keagamaan. Konten dakwah yang moderat harus bersaing dengan konten yang sensasional, provokatif, atau bahkan ekstrem. Selain itu, politisasi agama di ruang digital dapat memperkuat konflik identitas dan memperburuk persepsi Islam di mata publik Barat (van Dijck, 2013; Bunt, 2018).

Dengan demikian, digitalisasi dakwah memiliki potensi ganda: sebagai instrumen pembentuk citra Islam yang lebih positif dan sebagai arena kontestasi wacana yang sarat risiko. Fenomena ini tidak dapat dipahami secara parsial atau normatif semata, melainkan memerlukan kajian akademik yang komprehensif dan lintas disiplin. Pendekatan yang menggabungkan studi Islam, komunikasi digital, dan Hubungan Internasional menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dakwah digital beroperasi, bagaimana ia memengaruhi persepsi Islam di dunia Barat, serta bagaimana implikasinya terhadap relasi global kontemporer.

Dalam perspektif Islam, dakwah merupakan aktivitas fundamental yang melekat pada misi profetik (risalah) Islam itu sendiri. Dakwah tidak

semata dipahami sebagai aktivitas ceramah keagamaan, melainkan sebagai proses sosial, kultural, dan komunikatif yang bertujuan mengajak manusia menuju nilai-nilai tauhid, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan akhlak mulia melalui pendekatan yang bijaksana (bil hikmah) serta dialogis (mujadalah bil-lati hiya ahsan) (Qardhawi, 2002; Shihab, 1996). Dengan demikian, dakwah memiliki karakter universal, adaptif, dan kontekstual, sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang relevan sepanjang zaman (shalih li kulli zaman wa makan).

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan bahwa dakwah tidak dapat dilepaskan dari pendekatan komunikasi yang persuasif dan etis. Hal ini tercermin dalam Q.S. An-Nahl ayat 125 yang menekankan metode hikmah, mau'izhah hasanah, dan dialog yang santun sebagai kerangka utama dakwah. Prinsip ini mengindikasikan bahwa dakwah selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan medium komunikasi yang tersedia pada zamannya (Nasr, 2003). Oleh karena itu, perubahan medium komunikasi termasuk transformasi digital tidak mengubah esensi dakwah, melainkan memperluas ruang dan bentuk aktualisasinya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang digital sebagai arena sosial baru yang bersifat transnasional, cair, dan partisipatif. Ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis penyampaian pesan, tetapi juga membentuk pola relasi sosial, produksi pengetahuan, dan konstruksi identitas kolektif (Castells, 2010). Dalam konteks ini, dakwah Islam mengalami transformasi signifikan, dari praktik yang

sebelumnya dominan dalam ruang fisik seperti masjid, majelis taklim, dan institusi pendidikan menuju ruang virtual yang mencakup media sosial, platform video, podcast, hingga forum daring lintas negara (Bunt, 2009).

Dakwah digital memungkinkan pesan-pesan keislaman melampaui batas geografis, bahasa, dan budaya secara simultan. Seorang dai yang berbasis lokal dapat memiliki audiens global, sementara umat Islam di diaspora dapat mengakses wacana keagamaan dari berbagai mazhab dan latar belakang pemikiran secara real time (Anderson, 2013). Fenomena ini menandai pergeseran dakwah dari komunikasi berbasis komunitas lokal menuju jaringan global (networked religion) yang bersifat terdesentralisasi (Campbell, 2012).

Salah satu implikasi penting dari dakwah di ruang digital adalah munculnya bentuk baru otoritas keagamaan. Jika sebelumnya otoritas dakwah didominasi oleh ulama dan institusi formal keagamaan, maka di era digital otoritas tersebut menjadi lebih cair dan terbuka. Individu non-institusional termasuk influencer Muslim, kreator konten religius, dan aktivis dakwah digital dapat membangun legitimasi keagamaan berbasis popularitas, algoritma, dan kepercayaan audiens, bukan semata melalui sanad keilmuan tradisional (Eickelman & Anderson, 2003; Hoover, 2016).

Perubahan ini menggeser pola komunikasi dakwah dari model satu arah (top-down) menuju model dialogis dan partisipatif. Audiens tidak lagi berperan pasif sebagai penerima pesan, melainkan aktif dalam menafsirkan, mengomentari, mendistribusikan, bahkan memodifikasi pesan

dakwah sesuai dengan konteks sosial dan preferensi pribadi mereka (Jenkins, 2006). Dalam perspektif filsafat komunikasi Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kolektif dalam ruang publik digital, meskipun sekaligus menghadirkan tantangan terkait otoritas, validitas pengetahuan agama, dan potensi fragmentasi pemahaman keislaman (Roy, 2004).

Dalam skala global, dakwah digital memiliki dimensi hubungan internasional yang signifikan. Dakwah tidak lagi hanya berfungsi sebagai aktivitas internal umat Islam, tetapi juga sebagai medium representasi Islam di hadapan masyarakat global, khususnya di Barat. Pesan-pesan dakwah yang beredar di ruang digital internasional sering kali dipersepsikan bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi sebagai cerminan nilai, budaya, dan identitas peradaban Islam secara keseluruhan (Esposito, 2011). Dalam konteks ini, dakwah digital berkontribusi langsung pada pembentukan citra Islam di tingkat internasional.

Bagi komunitas Muslim diaspora, dakwah digital berfungsi sebagai sarana mempertahankan identitas keislaman sekaligus sebagai ruang negosiasi antara nilai-nilai Islam dan norma sosial masyarakat global. Melalui media digital, umat Islam dapat membangun solidaritas lintas negara, menyuarakan isu keadilan global, Islamofobia, dan hak asasi manusia, serta memperkuat posisi Islam sebagai aktor kultural dalam tatanan global (Mandaville, 2014). Dengan demikian, dakwah digital dapat dipahami sebagai instrumen soft power keagamaan yang berpengaruh dalam dinamika global kontemporer.

Namun, perlu ditegaskan bahwa dakwah di ruang digital juga menghadapi tantangan serius. Algoritma media sosial yang cenderung mendorong polarisasi, penyederhanaan pesan, dan konten sensasional berpotensi mereduksi kompleksitas ajaran Islam menjadi narasi hitam-putih. Selain itu, absennya otoritas tunggal membuka ruang bagi penyebaran tafsir ekstrem, disinformasi keagamaan, dan konflik wacana intra-umat (Sunstein, 2017). Oleh karena itu, dakwah digital menuntut pendekatan etis, literasi digital, dan tanggung jawab intelektual yang tinggi dari para aktornya.

Secara konseptual, dakwah Islam di ruang digital global merepresentasikan pertemuan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas globalisasi digital. Dakwah tidak hanya menjadi sarana penyebaran ajaran agama, tetapi juga arena kontestasi makna, identitas, dan kekuasaan simbolik dalam sistem global yang semakin terhubung. Dengan memahami dakwah digital sebagai fenomena multidimensional religius, sosial, kultural, dan global maka dakwah Islam dapat dikembangkan secara lebih strategis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara universal.

Dalam kajian Hubungan Internasional (HI), persepsi merupakan variabel kunci yang memengaruhi bagaimana aktor global memahami, menilai, dan merespons aktor lain dalam sistem internasional. Persepsi tidak lahir secara netral, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial yang melibatkan sejarah, ideologi, media, serta relasi kuasa yang berkembang dalam tatanan global (Jervis, 1976). Oleh karena itu, dalam konteks hubungan antara dunia Islam dan Barat, Islam tidak hanya hadir

sebagai agama, tetapi juga sebagai identitas politik, kultural, dan simbolik yang sarat dengan muatan perseptual.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, Islam semakin sering ditempatkan sebagai “the other” dalam diskursus keamanan global. Pergeseran ancaman dari ideologi komunisme menuju ancaman non-negara dan identitas transnasional menyebabkan Islam khususnya Islam politik sering dipersepsikan melalui lensa keamanan (securitization) (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Peristiwa-peristiwa seperti serangan 11 September 2001 memperkuat narasi Islam sebagai ancaman terhadap stabilitas internasional, demokrasi, dan nilai-nilai liberal Barat, meskipun narasi tersebut bersifat reduksionis dan tidak merepresentasikan kompleksitas umat Islam secara global (Esposito, 2011).

Persepsi Islam di dunia Barat tidak terbentuk secara alamiah, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui wacana politik, kebijakan luar negeri, dan representasi media. Media Barat arus utama sering kali menampilkan Islam dalam bingkai konflik, radikalisme, dan kekerasan, sehingga membentuk apa yang oleh Edward Said disebut sebagai orientalism, yakni proses konstruksi Timur sebagai entitas yang inferior, irasional, dan berbahaya (Said, 1978). Dalam kerangka ini, Islam direduksi menjadi identitas monolitik, mengabaikan keragaman budaya, mazhab, dan praktik sosial umat Muslim di berbagai belahan dunia.

Dalam perspektif HI, persepsi yang bias tersebut memiliki implikasi nyata terhadap kebijakan internasional, mulai dari kebijakan keamanan, migrasi, hingga hubungan diplomatik dengan

negara-negara Muslim. Persepsi negatif terhadap Islam berkontribusi pada menguatnya Islamofobia institusional di negara-negara Barat, termasuk kebijakan diskriminatif terhadap Muslim diaspora serta pendekatan keamanan yang berlebihan (*over-securitization*) (Cesari, 2013). Dengan demikian, persepsi bukan hanya persoalan citra, tetapi juga faktor struktural yang memengaruhi dinamika politik global.

Konsep *soft power* yang diperkenalkan oleh Joseph Nye menjadi relevan dalam membaca dinamika ini. *Soft power* merujuk pada kemampuan aktor untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan ide, bukan melalui paksaan militer atau ekonomi (Nye, 2004). Dalam konteks Islam dan dunia Barat, pembentukan persepsi yang lebih inklusif dan humanis tidak dapat dicapai melalui kekuatan koersif, melainkan melalui produksi narasi alternatif yang menampilkan Islam sebagai agama yang menjunjung perdamaian, keadilan sosial, dan kemanusiaan universal.

Dakwah digital dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *soft power* non-negara yang beroperasi di luar kerangka diplomasi tradisional. Melalui platform digital, individu dan komunitas Muslim memiliki kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara langsung kepada audiens global tanpa melalui filter negara atau media arus utama. Hal ini memungkinkan terjadinya *people-to-people influence* yang bersifat horizontal dan organik, di mana daya tarik Islam dibangun melalui pengalaman personal, dialog lintas budaya, dan narasi kehidupan sehari-hari umat Muslim (Mandaville, 2014).

Dalam kerangka HI kontemporer, praktik ini juga berkaitan erat dengan konsep public diplomacy, khususnya new public diplomacy yang menekankan peran aktor non-negara dalam membangun hubungan lintas masyarakat (Cull, 2009). Dakwah digital yang dilakukan oleh Muslim diaspora, akademisi, kreator konten, dan aktivis sosial dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi kultural non-negara yang berkontribusi pada pembentukan persepsi Islam di dunia Barat. Mereka berperan sebagai informal cultural ambassadors yang memperkenalkan Islam melalui bahasa, medium, dan nilai yang lebih mudah diterima oleh masyarakat Barat.

Pendekatan konstruktivisme dalam Hubungan Internasional memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis fenomena ini. Konstruktivisme menekankan bahwa identitas, kepentingan, dan perilaku aktor internasional tidak bersifat given, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial dan wacana yang terus-menerus (Wendt, 1999). Dalam perspektif ini, persepsi Barat terhadap Islam bukanlah fakta objektif, melainkan hasil dari proses konstruksi sosial yang dapat berubah seiring perubahan wacana dan interaksi.

Ruang digital global menjadi arena utama dalam proses konstruksi tersebut. Melalui dakwah digital, narasi tentang Islam diproduksi, disebar, diperdebatkan, dan dinegosiasikan secara terbuka. Konten dakwah yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan etika global berpotensi mendekonstruksi stereotip lama tentang Islam sebagai agama kekerasan, sekaligus membangun identitas Islam sebagai aktor normatif

dalam tatanan internasional (Hoover, 2016). Namun, ruang yang sama juga dapat dimanfaatkan oleh aktor ekstrem untuk menyebarkan narasi eksklusif dan konfrontatif, sehingga menjadikan ruang digital sebagai medan kontestasi wacana keislaman di tingkat global.

Dengan demikian, analisis dakwah digital dalam perspektif Hubungan Internasional tidak hanya relevan untuk memahami komunikasi keagamaan, tetapi juga penting untuk membaca dinamika persepsi, identitas, dan kekuasaan simbolik dalam sistem internasional. Dakwah digital berfungsi sebagai instrumen non-negara yang mampu memengaruhi konstruksi sosial tentang Islam di dunia Barat, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada narasi yang dikembangkan dan konteks interaksi global yang melingkupinya.

1.1 Teori Dakwah dalam Islam Kontemporer

Dalam Islam kontemporer, dakwah tidak lagi dipahami semata sebagai aktivitas verbal berupa ceramah keagamaan, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks, multidimensional, dan terus beradaptasi dengan perubahan struktur masyarakat global. Secara teoretis, dakwah merupakan upaya sistematis untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan individu dan sosial dengan memperhatikan konteks budaya, politik, teknologi, dan psikologis masyarakat sasaran (Qardhawi, 2002). Pemahaman ini menandai pergeseran dakwah dari pendekatan normatif-

dogmatis menuju pendekatan kontekstual dan komunikatif.

Dalam kerangka Islam kontemporer, teori dakwah berkembang seiring dengan kesadaran bahwa masyarakat modern ditandai oleh pluralitas identitas, fragmentasi otoritas, serta derasnya arus informasi global. Dakwah tidak lagi beroperasi dalam ruang homogen, melainkan dalam ruang publik yang kompetitif dan sarat dengan berbagai narasi ideologis. Oleh karena itu, teori dakwah modern menekankan pentingnya memahami audiens (*mad'u*) sebagai subjek aktif yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pengetahuan yang beragam (Aziz, 2017).

Salah satu fondasi utama teori dakwah kontemporer adalah pendekatan dakwah bil hikmah, yakni penyampaian pesan Islam dengan kebijaksanaan, rasionalitas, dan sensitivitas terhadap konteks sosial. Hikmah dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kelembutan, tetapi juga sebagai kemampuan membaca realitas sosial dan memilih strategi komunikasi yang tepat (Shihab, 1996). Dalam masyarakat modern yang kritis dan rasional, dakwah berbasis hikmah menuntut argumentasi yang logis, inklusif, serta terbuka terhadap dialog lintas pandangan.

Selain itu, teori dakwah kontemporer juga mengembangkan pendekatan dakwah kultural, yang menempatkan budaya sebagai medium strategis dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa Islam selalu hadir dalam konteks budaya tertentu dan tidak pernah berdiri di ruang hampa. Dakwah kultural berupaya mengakomodasi tradisi lokal, simbol budaya, dan

ekspresi sosial tanpa kehilangan substansi ajaran Islam (Abdullah, 2006). Dalam konteks global, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Islam dapat diterima secara positif di masyarakat non-Muslim melalui ekspresi budaya yang universal.

Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, teori dakwah Islam kontemporer juga memasukkan dimensi dakwah media dan dakwah digital sebagai kerangka analisis penting. Media tidak lagi dipandang sekadar alat (wasilah), melainkan sebagai ruang sosial (social space) yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan beragama masyarakat modern (Campbell, 2012). Dakwah digital menuntut pemahaman terhadap logika media, algoritma, visualisasi pesan, serta pola konsumsi informasi audiens global. Dalam konteks ini, dai tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan agama, tetapi juga sebagai komunikator publik yang bersaing dengan berbagai narasi lain di ruang digital.

Teori dakwah kontemporer juga menaruh perhatian besar pada aspek partisipasi dan dialog. Dakwah tidak lagi diposisikan sebagai proses satu arah dari dai kepada mad'u, melainkan sebagai interaksi dialogis yang memungkinkan terjadinya pertukaran makna. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam tentang musyawarah dan penghargaan terhadap akal manusia (al-'aql) sebagai instrumen memahami kebenaran (Nasr, 2003). Dalam konteks ruang digital, dialog ini terwujud melalui komentar, diskusi daring, dan interaksi lintas komunitas yang bersifat horizontal.

Dalam perspektif kritis, teori dakwah Islam kontemporer juga menggarisbawahi pentingnya

dimensi etika dakwah. Globalisasi informasi membuka peluang besar bagi dakwah, namun sekaligus menghadirkan risiko penyebaran ujaran kebencian, polarisasi, dan manipulasi agama untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, dakwah modern harus berpijak pada etika keilmuan, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan (Qardhawi, 2002; Esposito, 2011).

Lebih jauh, dalam konteks global kontemporer, teori dakwah juga mulai dipahami sebagai bagian dari relasi kekuasaan simbolik. Dakwah berperan dalam membentuk identitas, persepsi, dan legitimasi Islam di tingkat internasional. Dalam kerangka ini, dakwah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada konstruksi citra Islam sebagai peradaban di mata dunia (Mandaville, 2014). Dengan demikian, teori dakwah kontemporer memiliki irisan yang kuat dengan kajian komunikasi global, studi budaya, dan bahkan Hubungan Internasional.

Secara keseluruhan, teori dakwah dalam Islam kontemporer mencerminkan upaya intelektual untuk menjaga relevansi dakwah di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dakwah dipahami sebagai proses dinamis yang memadukan nilai wahyu, rasionalitas manusia, dan realitas sosial. Pendekatan ini menempatkan dakwah bukan hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat global yang lebih adil, dialogis, dan beradab.

1.2 Teori Agama dan Media Digital (Digital Religion)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara agama dipraktikkan, dipahami, dan direpresentasikan di ruang publik. Dalam kajian akademik kontemporer, fenomena ini dikenal dengan istilah digital religion, yakni suatu pendekatan teoretis yang menelaah bagaimana praktik keagamaan bertransformasi melalui interaksi dengan media digital, sekaligus bagaimana media digital membentuk ulang ekspresi, otoritas, dan pengalaman religius (Campbell, 2012). Teori ini menegaskan bahwa agama dan teknologi tidak berdiri dalam relasi netral, melainkan saling membentuk secara dialektis.

Dalam perspektif teori komunikasi, media digital tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat penyampai pesan keagamaan, tetapi sebagai lingkungan sosial (mediated environment) yang memengaruhi struktur interaksi, pola otoritas, dan produksi makna religius. Media digital menciptakan ruang komunikasi yang bersifat jaringan, interaktif, dan lintas batas geografis, sehingga memungkinkan agama hadir dalam bentuk yang lebih cair dan fleksibel dibandingkan praktik keagamaan konvensional (Castells, 2010). Dalam konteks ini, agama tidak hanya “menggunakan” media digital, tetapi juga mengalami proses mediasi yang membentuk ulang ekspresi keimanannya.

Teori digital religion menolak dikotomi antara dunia daring (online) dan luring (offline). Campbell menekankan bahwa praktik keagamaan digital merupakan kelanjutan dari praktik religius dalam kehidupan sehari-hari, bukan realitas terpisah yang berdiri sendiri (Campbell, 2012). Aktivitas seperti

dakwah daring, diskusi keagamaan di media sosial, hingga ritual virtual menunjukkan bahwa pengalaman religius kini berlangsung dalam ruang hibrida yang menggabungkan dimensi digital dan sosial secara simultan.

Salah satu aspek sentral dalam teori agama dan media digital adalah perubahan otoritas keagamaan. Media digital membuka akses luas terhadap pengetahuan agama, sehingga otoritas tidak lagi dimonopoli oleh institusi keagamaan formal. Individu, komunitas daring, dan kreator konten religius dapat memperoleh legitimasi berbasis popularitas, kredibilitas personal, dan kepercayaan audiens (Hoover, 2016). Fenomena ini menghasilkan apa yang disebut sebagai *deinstitutionalization of religious authority*, di mana otoritas keagamaan menjadi terfragmentasi dan terdistribusi dalam jaringan digital.

Dalam konteks Islam, transformasi otoritas ini memiliki implikasi signifikan terhadap praktik dakwah dan pemahaman keagamaan. Ruang digital memungkinkan munculnya beragam tafsir Islam yang bersaing secara terbuka, mulai dari yang moderat hingga yang eksklusif dan ekstrem. Oleh karena itu, teori digital religion menekankan pentingnya analisis wacana (*discourse analysis*) untuk memahami bagaimana narasi keagamaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan dalam ruang digital global (Eickelman & Anderson, 2003).

Selain otoritas, teori agama dan media digital juga menyoroti transformasi identitas religius. Media digital memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan identitas keagamaannya secara

lebih personal dan reflektif. Identitas religius tidak lagi semata ditentukan oleh afiliasi institusional, tetapi juga oleh pilihan konsumsi media, jaringan sosial, dan pengalaman digital individu (Hjarvard, 2011). Dalam konteks global, hal ini memungkinkan terbentuknya komunitas keagamaan transnasional yang terhubung oleh narasi, simbol, dan nilai yang dibagikan secara digital.

Teori mediatization of religion yang dikembangkan oleh Hjarvard menekankan bahwa logika media seperti kecepatan, visualisasi, dan simplifikasi pesan secara bertahap memengaruhi cara agama dikomunikasikan dan dipahami (Hjarvard, 2011). Dalam ruang digital, pesan keagamaan cenderung dikemas secara singkat, visual, dan emosional agar sesuai dengan karakteristik platform. Konsekuensinya, terdapat risiko reduksi kompleksitas ajaran agama, namun juga peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Dalam perspektif kritis, teori agama dan media digital juga mengakui adanya ambivalensi digitalisasi agama. Di satu sisi, media digital memperluas ruang partisipasi, dialog lintas iman, dan demokratisasi pengetahuan keagamaan. Di sisi lain, ruang digital juga rentan terhadap polarisasi, radikalisasi, dan penyebaran disinformasi berbasis agama (Sunstein, 2017). Oleh karena itu, digital religion tidak dapat dipahami secara utopis, melainkan harus dianalisis sebagai medan kontestasi antara berbagai kepentingan, ideologi, dan interpretasi religius.

Dalam kajian global dan Hubungan Internasional, teori agama dan media digital

memiliki relevansi strategis. Ruang digital menjadi arena utama dalam pembentukan persepsi internasional tentang agama, termasuk Islam. Narasi keagamaan yang beredar secara global melalui media digital berkontribusi pada konstruksi citra agama sebagai aktor normatif, sumber konflik, atau kekuatan kultural dalam sistem internasional (Mandaville, 2014). Dengan demikian, teori digital religion membantu menjelaskan bagaimana agama beroperasi sebagai kekuatan simbolik dalam politik global kontemporer.

Secara keseluruhan, teori agama dan media digital (digital religion) memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami transformasi agama di era globalisasi digital. Teori ini menegaskan bahwa agama tidak melemah oleh modernitas digital, melainkan mengalami reartikulasi dalam bentuk-bentuk baru yang lebih jaringan, partisipatif, dan transnasional. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan digital religion menjadi landasan penting untuk menganalisis dakwah Islam sebagai praktik keagamaan sekaligus fenomena komunikasi global yang berpengaruh terhadap persepsi dan relasi internasional.

1.3 Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional (HI) berkembang sebagai respons kritis terhadap dominasi pendekatan positivistik, khususnya realisme dan liberalisme, yang cenderung memandang politik internasional sebagai arena interaksi material berbasis kepentingan objektif dan kekuatan fisik. Konstruktivisme menawarkan

perspektif alternatif dengan menegaskan bahwa realitas internasional tidak semata-mata dibentuk oleh faktor material, tetapi juga oleh ide, norma, identitas, dan makna yang dikonstruksi secara sosial melalui interaksi antaraktor (Wendt, 1999).

Dalam pandangan konstruktivis, struktur internasional bukan hanya terdiri atas distribusi kekuatan material, melainkan juga struktur ideational yang membentuk bagaimana aktor memahami diri mereka sendiri dan pihak lain. Negara, organisasi internasional, maupun aktor non-negara bertindak berdasarkan identitas dan kepentingan yang terbentuk secara historis dan sosial, bukan semata-mata kepentingan yang bersifat given (Finnemore & Sikkink, 1998). Dengan demikian, politik internasional dipahami sebagai arena dinamis di mana makna dan kepentingan terus diproduksi dan direproduksi.

Salah satu kontribusi utama konstruktivisme adalah konsep bahwa "anarki adalah apa yang negara-negara buat darinya" (anarchy is what states make of it) (Wendt, 1992). Pernyataan ini menegaskan bahwa anarki dalam sistem internasional tidak secara otomatis menghasilkan konflik atau kompetisi, melainkan bergantung pada bagaimana aktor menafsirkan dan memaknai relasi mereka. Identitas kolektif, norma bersama, dan pengalaman historis berperan penting dalam menentukan apakah anarki dipersepsikan sebagai ancaman atau peluang kerja sama.

Dalam konteks ini, persepsi menjadi variabel sentral dalam analisis hubungan internasional. Persepsi tentang "kawan" dan "lawan", "aman" dan "mengancam", dibentuk melalui proses interaksi

sosial dan wacana yang berulang. Konstruktivisme menekankan bahwa persepsi tersebut bersifat kontingen dan dapat berubah seiring dengan perubahan narasi, pengalaman, dan praktik sosial (Hopf, 1998). Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana Islam, sebagai identitas transnasional, dipersepsikan dan dikonstruksikan dalam wacana global.

Konstruktivisme juga memberikan ruang analisis yang lebih luas bagi peran aktor non-negara. Tidak seperti realisme yang berfokus pada negara, konstruktivisme mengakui bahwa individu, komunitas epistemik, organisasi masyarakat sipil, dan aktor kultural memiliki kapasitas untuk membentuk norma dan wacana internasional (Adler, 2005). Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, aktor non-negara menjadi semakin signifikan dalam memproduksi makna dan memengaruhi persepsi global melalui media dan komunikasi lintas batas.

Dalam kerangka ini, media termasuk media digital dipahami sebagai arena konstruksi sosial yang krusial. Wacana yang diproduksi dan disirkulasikan melalui media berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif dan legitimasi politik. Perspektif konstruktivisme memungkinkan analisis terhadap bagaimana narasi tentang Islam diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan dalam ruang publik global, khususnya melalui media digital yang bersifat transnasional dan partisipatif (Hoover, 2016).

Pendekatan konstruktivisme normatif menekankan peran norma internasional dalam membentuk perilaku aktor global. Norma dipahami sebagai standar kepatutan (*standards of appropriate behavior*) yang memengaruhi bagaimana aktor

bertindak dan menilai tindakan pihak lain (Finnemore & Sikkink, 1998). Dalam konteks Islam dan dakwah digital, nilai-nilai seperti perdamaian, keadilan, dan dialog antarperadaban dapat dipahami sebagai norma yang diperjuangkan dan disosialisasikan melalui praktik komunikasi digital.

Lebih lanjut, konstruktivisme juga membuka ruang analisis terhadap perubahan sosial dalam politik internasional. Karena identitas dan kepentingan bersifat konstruktif, maka perubahan wacana dan interaksi sosial dapat menghasilkan transformasi dalam hubungan internasional. Dakwah digital, sebagai praktik komunikasi global, dapat berperan dalam menggeser persepsi dan membentuk identitas Islam yang lebih inklusif dan dialogis di mata masyarakat internasional (Mandaville, 2014).

Dalam konteks penelitian ini, teori konstruktivisme menyediakan kerangka analitis yang relevan untuk memahami hubungan antara dakwah digital dan persepsi Islam di dunia Barat. Dakwah digital dipahami bukan sekadar sebagai aktivitas religius, tetapi sebagai praktik sosial yang berkontribusi pada konstruksi identitas dan makna Islam dalam sistem internasional. Melalui interaksi di ruang digital global, narasi keislaman diproduksi dan disirkulasikan, sehingga berpotensi membentuk ulang persepsi, kepentingan, dan pola interaksi antaraktor global.

Secara keseluruhan, teori konstruktivisme menegaskan bahwa realitas hubungan internasional bersifat dinamis, sosial, dan dapat diubah. Dengan menempatkan ide, identitas, dan wacana sebagai variabel utama, konstruktivisme memberikan alat

analisis yang kuat untuk memahami peran dakwah digital sebagai kekuatan normatif dan simbolik dalam politik global kontemporer.

1.4 Teori Persepsi, Identitas, dan Representasi

Dalam kajian ilmu sosial dan Hubungan Internasional (HI), persepsi, identitas, dan representasi merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dan berperan sentral dalam membentuk interaksi antaraktor di tingkat global. Ketiganya tidak dipahami sebagai realitas objektif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman historis, struktur kekuasaan, serta produksi wacana melalui media dan institusi sosial (Jervis, 1976; Hall, 1997).

Persepsi dalam Hubungan Internasional merujuk pada cara aktor memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap aktor lain maupun terhadap situasi internasional tertentu. Robert Jervis menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam politik internasional sangat dipengaruhi oleh persepsi dan mispersepsi, bukan semata oleh fakta objektif (Jervis, 1976). Persepsi dibentuk melalui kerangka kognitif (*belief systems*) yang dipengaruhi oleh ideologi, pengalaman kolektif, dan narasi dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, persepsi bersifat subjektif, selektif, dan rentan terhadap bias.

Dalam konteks hubungan antara Islam dan dunia Barat, persepsi sering kali dibentuk oleh narasi historis panjang yang melibatkan kolonialisme, konflik geopolitik, dan diskursus keamanan global. Islam kerap dipersepsikan bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai entitas politik dan kultural

yang diasosiasikan dengan ancaman, kekerasan, atau ketidakcocokan dengan nilai-nilai modernitas Barat (Esposito, 2011). Persepsi ini tidak muncul secara spontan, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui wacana politik, kebijakan keamanan, dan representasi media.

Konsep identitas dalam teori sosial dan HI, khususnya dalam perspektif konstruktivisme, dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi dan relasi dengan “yang lain” (the other) (Wendt, 1999). Identitas tidak bersifat tetap atau esensial, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring perubahan konteks sosial dan wacana dominan. Identitas kolektif termasuk identitas keagamaan dibangun melalui proses inklusi dan eksklusivitas, di mana suatu kelompok mendefinisikan dirinya dengan membedakan diri dari kelompok lain.

Dalam konteks global, Islam berfungsi sebagai identitas transnasional yang melampaui batas negara. Identitas Islam tidak hanya dimaknai secara teologis, tetapi juga secara politik dan kultural, terutama ketika ia berinteraksi dengan struktur kekuasaan global dan diskursus Barat tentang keamanan dan modernitas (Mandaville, 2014). Dalam kerangka ini, persepsi negatif terhadap Islam turut memengaruhi bagaimana identitas Muslim baik di negara mayoritas Muslim maupun di diaspora Barat dikonstruksikan dan dinegosiasikan.

Konsep representasi menjadi kunci untuk memahami bagaimana persepsi dan identitas dibentuk dan disebarluaskan. Stuart Hall mendefinisikan representasi sebagai proses produksi makna melalui bahasa, simbol, dan citra yang

beroperasi dalam sistem budaya tertentu (Hall, 1997). Representasi tidak bersifat netral, melainkan selalu terkait dengan relasi kuasa, karena pihak yang memiliki kontrol atas produksi wacana memiliki kemampuan untuk menentukan makna dominan tentang suatu kelompok atau fenomena.

Dalam kajian kritis, Edward Said melalui konsep Orientalism menunjukkan bagaimana dunia Barat secara historis merepresentasikan Timur termasuk Islam sebagai irasional, statis, dan inferior (Said, 1978). Representasi ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga memiliki implikasi politik yang nyata, karena menjadi dasar legitimasi bagi dominasi, intervensi, dan kebijakan diskriminatif. Dalam konteks kontemporer, representasi Islam di media Barat sering kali masih terjebak dalam pola orientalis, meskipun dengan bentuk dan medium yang lebih modern.

Media, khususnya media digital, berperan sebagai arena utama dalam produksi dan sirkulasi representasi. Media digital memungkinkan representasi tentang Islam diproduksi secara cepat, masif, dan lintas batas negara. Namun, ruang digital juga bersifat ambivalen. Di satu sisi, media digital memperkuat representasi stereotip dan simplistik melalui logika sensasionalisme dan algoritma. Di sisi lain, media digital membuka ruang bagi produksi representasi alternatif oleh aktor non-negara, termasuk komunitas Muslim dan individu diaspora (Hoover, 2016).

Dalam kerangka teori persepsi, identitas, dan representasi, dakwah digital dapat dipahami sebagai praktik simbolik yang berupaya membentuk makna dan citra Islam di ruang publik global. Dakwah

digital tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga merepresentasikan Islam sebagai identitas sosial dan peradaban. Melalui narasi, visual, dan interaksi digital, dakwah berkontribusi pada pembentukan persepsi tentang “Islam seperti apa” yang dikenal dan dipahami oleh audiens global.

Pendekatan ini sejalan dengan konstruktivisme dalam HI yang menekankan peran wacana (discourse) dalam membentuk realitas sosial. Wacana dakwah digital menjadi bagian dari kontestasi makna global tentang Islam, yang bersaing dengan wacana keamanan, ekstremisme, dan Islamofobia. Perubahan representasi melalui wacana alternatif berpotensi menggeser persepsi dan membuka ruang bagi pembentukan identitas Islam yang lebih inklusif dan dialogis (Hopf, 1998).

Dengan demikian, teori persepsi, identitas, dan representasi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis bagaimana Islam dipahami, dipersepsikan, dan dinegosiasikan di dunia Barat. Ketiga konsep ini membantu menjelaskan bahwa citra Islam bukanlah refleksi langsung dari realitas objektif, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat dipengaruhi dan diubah melalui praktik komunikasi, termasuk dakwah digital di ruang global.

1.5 Konsep Islamophobia dalam Diskursus Global

Islamophobia merupakan konsep yang semakin sentral dalam diskursus global kontemporer, terutama dalam kajian Hubungan Internasional, studi keamanan, dan analisis media. Istilah ini secara umum merujuk pada sikap takut, prasangka, kebencian, atau diskriminasi terhadap Islam dan umat Muslim yang diekspresikan melalui wacana,

kebijakan, maupun praktik sosial (Runnymede Trust, 1997). Dalam konteks global, Islamophobia tidak hanya beroperasi pada level individual, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam struktur politik, hukum, dan kebijakan internasional.

Secara historis, akar Islamophobia dapat ditelusuri jauh sebelum era modern, terutama melalui relasi panjang antara dunia Islam dan Barat yang ditandai oleh konflik, kolonialisme, dan dominasi epistemik. Namun, dalam diskursus global kontemporer, Islamophobia mengalami intensifikasi signifikan pasca-Perang Dingin, ketika Islam mulai diposisikan sebagai “ancaman baru” dalam tatanan keamanan internasional (Huntington, 1996). Narasi ini semakin menguat setelah peristiwa 11 September 2001, yang menjadikan Islam dan Muslim sering kali dikaitkan secara problematik dengan terorisme dan ekstremisme global (Esposito, 2011).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, Islamophobia dapat dipahami sebagai hasil dari proses securitization, yaitu ketika suatu identitas atau isu dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan respons luar biasa (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Melalui proses ini, Islam tidak lagi diperlakukan sebagai agama atau sistem nilai, melainkan sebagai objek keamanan. Konsekuensinya, kebijakan keamanan, migrasi, dan kontra-terorisme di banyak negara Barat sering kali menggeneralisasi Muslim sebagai kelompok yang patut dicurigai.

Islamophobia dalam diskursus global juga tidak dapat dilepaskan dari peran media. Media arus utama Barat kerap merepresentasikan Islam melalui bingkai konflik, kekerasan, dan fundamentalisme,

sehingga memperkuat stereotip negatif dan persepsi homogen tentang umat Muslim (Poole, 2002). Representasi semacam ini berkontribusi pada apa yang disebut sebagai discursive othering, yaitu proses penempatan Islam sebagai “yang lain” yang berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai Barat (Said, 1978). Dalam konteks ini, Islamophobia beroperasi sebagai konstruksi wacana, bukan sekadar respons terhadap realitas empiris.

Media digital memperluas dan sekaligus mempersulit dinamika Islamophobia. Di satu sisi, ruang digital mempercepat penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan narasi Islamofobik melalui algoritma yang mendorong konten sensasional dan polarizing (Sunstein, 2017). Di sisi lain, media digital juga membuka ruang resistensi, di mana komunitas Muslim dan aktor non-negara dapat memproduksi narasi tandingan (counter-narratives) untuk menantang stereotip dan stigma terhadap Islam (Hoover, 2016).

Dalam kajian identitas, Islamophobia berdampak langsung pada konstruksi identitas Muslim, khususnya di negara-negara Barat. Muslim diaspora sering kali berada dalam posisi negosiasi identitas yang kompleks, di mana mereka harus menegaskan loyalitas kewarganegaraan sambil mempertahankan identitas keagamaannya di tengah iklim kecurigaan dan diskriminasi (Mandaville, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa Islamophobia bukan hanya persoalan persepsi eksternal, tetapi juga memengaruhi pengalaman hidup dan partisipasi sosial umat Muslim dalam masyarakat global.

Beberapa sarjana menekankan bahwa Islamophobia memiliki dimensi struktural dan

institusional. Cesari (2013) menunjukkan bahwa Islamophobia termanifestasi dalam kebijakan negara, seperti pembatasan simbol keagamaan, pengawasan berlebihan terhadap komunitas Muslim, dan regulasi migrasi yang diskriminatif. Dalam kerangka ini, Islamophobia berfungsi sebagai mekanisme eksklusi yang dilegitimasi oleh diskursus keamanan dan sekularisme ekstrem.

Dari perspektif konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, Islamophobia dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah. Karena persepsi, identitas, dan representasi bersifat tidak tetap, maka narasi Islamophobia dapat ditantang dan didekonstruksi melalui perubahan wacana dan praktik komunikasi global (Wendt, 1999). Di sinilah dakwah digital memiliki relevansi strategis sebagai instrumen normatif yang berpotensi menghadirkan representasi Islam yang lebih humanis, dialogis, dan kontekstual.

Dakwah digital, ketika dipraktikkan secara reflektif dan etis, dapat berfungsi sebagai counter-hegemonic discourse yang menantang dominasi narasi Islamofobik. Dengan menampilkan Islam sebagai sistem nilai yang menjunjung keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan universal, dakwah digital berkontribusi pada pembentukan persepsi alternatif tentang Islam di ruang publik global (Esposito, 2011). Namun, perlu ditegaskan bahwa dakwah digital juga menghadapi tantangan internal, terutama ketika narasi eksklusif dan konfrontatif justru memperkuat stereotip yang ingin dilawan.

Dengan demikian, konsep Islamophobia dalam diskursus global tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai bentuk prasangka individual

semata. Islamophobia merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan sejarah, kekuasaan, media, kebijakan, dan konstruksi identitas. Pemahaman yang komprehensif terhadap Islamophobia menjadi penting tidak hanya untuk membaca dinamika hubungan Islam-Barat, tetapi juga untuk merumuskan strategi komunikasi dan dakwah yang mampu berkontribusi pada relasi global yang lebih adil dan dialogis.

1.6 Soft Power dan Diplomasi Publik Berbasis Budaya dan Agama

Dalam dinamika Hubungan Internasional kontemporer, kekuasaan tidak lagi semata-mata dipahami melalui kekuatan militer (*hard power*) atau tekanan ekonomi. Joseph S. Nye memperkenalkan konsep *soft power* sebagai kemampuan suatu aktor untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan, bukan melalui paksaan atau imbalan material (Nye, 2004). Dalam konteks global yang semakin terhubung oleh media dan teknologi digital, *soft power* menjadi instrumen strategis dalam membentuk persepsi, legitimasi, dan citra di mata publik internasional.

Diplomasi publik merupakan manifestasi operasional dari *soft power*. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang berfokus pada hubungan antarnegara, diplomasi publik menargetkan masyarakat asing secara langsung melalui komunikasi, pertukaran budaya, pendidikan, dan media (Cull, 2009). Dalam kerangka ini, aktor non-negara termasuk organisasi keagamaan, komunitas diaspora, dan individu berpengaruh di ruang digital

memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk hubungan internasional.

Budaya dan agama merupakan sumber soft power yang kuat karena keduanya menyentuh dimensi identitas, makna, dan nilai-nilai fundamental manusia. Agama, khususnya Islam, tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber norma sosial, etika, dan pandangan dunia yang berpotensi memengaruhi persepsi global (Haynes, 2014). Dalam banyak kasus, agama menjadi medium diplomasi kultural yang mampu menjangkau audiens lintas batas negara secara lebih emosional dan simbolik dibandingkan instrumen diplomasi formal.

Dalam konteks Islam, dakwah dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi normatif yang memiliki potensi soft power. Dakwah yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, perdamaian, solidaritas, dan kemanusiaan berkontribusi pada pembentukan citra Islam yang positif di ruang publik global (Esposito, 2011). Ketika dakwah dijalankan melalui media digital, ia bertransformasi menjadi instrumen diplomasi publik non-negara yang mampu menjangkau audiens internasional secara luas dan simultan.

Media digital memperluas spektrum diplomasi publik berbasis budaya dan agama. Platform seperti YouTube, Instagram, dan podcast memungkinkan narasi keagamaan disampaikan secara visual, personal, dan dialogis. Dalam perspektif Hubungan Internasional, fenomena ini menunjukkan pergeseran dari state-centric diplomacy menuju networked diplomacy, di mana pengaruh dibangun melalui jaringan, interaksi, dan kepercayaan (Hocking, 2005).

Aktor dakwah digital, meskipun tidak memiliki otoritas negara, dapat memengaruhi persepsi internasional tentang Islam dan Muslim melalui representasi yang konsisten dan kredibel.

Namun, penggunaan agama sebagai instrumen soft power juga mengandung ambiguitas. Di satu sisi, agama dapat menjadi sumber legitimasi moral dan jembatan dialog lintas budaya. Di sisi lain, jika dikomunikasikan secara eksklusif atau konfrontatif, agama justru berpotensi memperkuat stereotip, memperdalam polarisasi, dan melemahkan tujuan diplomasi publik itu sendiri (Haynes, 2014). Oleh karena itu, efektivitas diplomasi publik berbasis agama sangat bergantung pada strategi komunikasi, sensitivitas budaya, dan konteks audiens global.

Dalam kerangka konstruktivisme, soft power dan diplomasi publik bekerja melalui proses pembentukan makna dan norma. Persepsi terhadap suatu agama atau budaya tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan wacana yang berulang (Wendt, 1999). Dengan demikian, dakwah digital dapat dipahami sebagai praktik konstruktif yang berkontribusi pada pembentukan norma global tentang Islam sebagai agama yang kompatibel dengan modernitas, demokrasi, dan perdamaian.

Diplomasi publik berbasis budaya dan agama juga berkaitan erat dengan upaya melawan Islamophobia dalam diskursus global. Dengan menghadirkan narasi alternatif yang menekankan keberagaman, toleransi, dan kontribusi positif umat Muslim, soft power keagamaan dapat berfungsi sebagai counter-discourse terhadap representasi negatif Islam di media internasional (Cesari, 2013).

Dalam hal ini, dakwah digital berperan bukan hanya sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai praktik komunikasi strategis dalam hubungan internasional.

Dengan demikian, soft power dan diplomasi publik berbasis budaya dan agama merupakan instrumen penting dalam tatanan global kontemporer. Islam, melalui dakwah yang adaptif dan reflektif di ruang digital, memiliki potensi besar sebagai sumber soft power yang mampu membangun dialog, memperbaiki citra, dan memperkuat hubungan antar masyarakat lintas negara. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memaksimalkan potensi tersebut tanpa terjebak pada politisasi agama atau reduksi makna dakwah menjadi sekadar alat propaganda.

1.7 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian berfungsi sebagai peta analitis yang menghubungkan konsep-konsep utama, teori, serta fokus empiris yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam kajian Hubungan Internasional, kerangka konseptual tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel, tetapi juga memperlihatkan bagaimana realitas sosial global dikonstruksi melalui interaksi, wacana, dan praktik simbolik (Wendt, 1999). Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk memahami dakwah Islam digital sebagai fenomena sosial, kultural, dan politik dalam ruang global.

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa persepsi Barat terhadap Islam tidak terbentuk secara alamiah atau netral, melainkan merupakan hasil dari

proses historis, representasi media, dan interaksi sosial lintas budaya yang berlangsung secara terus-menerus (Said, 1978; Cesari, 2013). Dalam konteks globalisasi dan revolusi digital, media digital menjadi arena utama produksi dan sirkulasi makna tentang Islam, baik dalam bentuk narasi keagamaan, simbol budaya, maupun praktik dakwah.

Secara konseptual, dakwah digital diposisikan sebagai variabel utama (*independent variable*) dalam penelitian ini. Dakwah digital dipahami sebagai aktivitas penyampaian nilai-nilai Islam melalui platform media digital yang bersifat terbuka, interaktif, dan lintas batas negara (Campbell, 2013). Dakwah ini tidak hanya mencakup konten keagamaan formal, tetapi juga ekspresi identitas Muslim, diskursus etika, serta praktik komunikasi yang merepresentasikan Islam dalam ruang publik global.

Dakwah digital tersebut beroperasi dalam ruang media digital global yang ditandai oleh karakteristik partisipatif, algoritmik, dan terdesentralisasi. Ruang ini memungkinkan aktor non-negara seperti dai independen, influencer Muslim, komunitas diaspora, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi produsen sekaligus distributor narasi Islam (Hjarvard, 2011). Dengan demikian, dakwah digital tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi bersifat jaringan (*network-based*), di mana audiens turut berperan aktif dalam membentuk makna pesan dakwah.

Selanjutnya, dakwah digital dipahami sebagai bentuk *soft power* keagamaan non-negara. Mengacu pada konsep *soft power*, daya pengaruh dakwah digital tidak terletak pada paksaan, melainkan pada daya tarik nilai, moralitas, dan representasi Islam

yang humanis dan inklusif (Nye, 2004). Dalam kerangka ini, dakwah digital juga berfungsi sebagai praktik diplomasi publik non-negara, di mana individu dan komunitas Muslim berperan sebagai aktor diplomasi kultural di tingkat global (Cull, 2009; Haynes, 2014).

Dampak dari dakwah digital sebagai soft power dianalisis melalui variabel antara (*intervening variable*) berupa konstruksi identitas dan representasi Islam di ruang digital. Identitas Islam dipahami sebagai identitas sosial yang bersifat dinamis, dibentuk melalui interaksi, diskursus, dan negosiasi makna antara aktor Muslim dan audiens global (Hall, 1997). Representasi Islam dalam dakwah digital baik melalui bahasa, visual, maupun narasi menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi audiens Barat terhadap Islam.

Sebagai variabel dependen (*dependent variable*), penelitian ini menempatkan persepsi masyarakat Barat terhadap Islam. Persepsi dipahami sebagai proses kognitif dan sosial dalam menafsirkan realitas, yang dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, dan wacana dominan (Jervis, 1976). Dalam konteks ini, persepsi Barat terhadap Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga dengan isu politik, keamanan, hak asasi manusia, dan identitas budaya.

Kerangka konseptual penelitian ini berlandaskan pada pendekatan konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, yang menekankan bahwa identitas, kepentingan, dan persepsi aktor global dibentuk melalui interaksi sosial dan struktur makna bersama (Wendt, 1999). Dakwah digital dipahami sebagai praktik diskursif yang berkontribusi dalam membentuk norma, citra, dan pemahaman tentang

Islam di tingkat internasional. Dengan kata lain, perubahan persepsi bukan semata hasil perubahan materi, tetapi hasil perubahan narasi dan makna.

Selain itu, konsep Islamophobia digunakan sebagai konteks struktural yang memengaruhi bagaimana dakwah digital diterima dan ditafsirkan di Barat. Islamophobia dipahami sebagai bentuk prasangka dan diskriminasi sistemik terhadap Islam dan umat Muslim yang direproduksi melalui media, politik, dan kebijakan keamanan (Cesari, 2013). Dakwah digital berpotensi berfungsi sebagai counter-narrative terhadap Islamophobia dengan menghadirkan representasi Islam yang alternatif dan berimbang.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan kausal dan konstruktif antara dakwah digital Islam, praktik soft power dan diplomasi publik non-negara, konstruksi identitas dan representasi Islam, serta pembentukan persepsi Barat terhadap Islam. Kerangka ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap peran aktor non-negara Muslim dalam membentuk hubungan internasional berbasis budaya dan agama di era digital global.

Dengan kerangka konseptual ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam kajian Hubungan Internasional dengan memperluas pemahaman tentang peran agama dan media digital, sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan strategi dakwah yang lebih reflektif, inklusif, dan kontekstual dalam ruang global.

BAB II

METODOLOGI

PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena dakwah Islam digital dalam membentuk persepsi masyarakat Barat terhadap Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan pada eksplorasi makna, narasi, representasi, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam ruang digital global (Creswell, 2014).

Dalam tradisi ilmu sosial, pendekatan kualitatif relevan ketika objek penelitian bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna simbolik. Dakwah digital sebagai praktik keagamaan yang berlangsung di media digital tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau variabel terukur, melainkan melalui analisis wacana, interaksi, serta interpretasi aktor dan audiens global (Denzin & Lincoln, 2018). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial dan kultural yang membentuk persepsi terhadap Islam di dunia Barat.

Secara paradigmatik, penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, bahasa, simbol, dan wacana (Guba & Lincoln, 1994). Dalam konteks Hubungan Internasional, konstruktivisme

menekankan bahwa identitas, kepentingan, dan persepsi aktor global tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk dan dinegosiasikan secara sosial (Wendt, 1999). Dengan demikian, persepsi Barat terhadap Islam dipahami sebagai produk dari proses diskursif yang berlangsung dalam media, politik, dan ruang digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena dakwah Islam di ruang digital global, termasuk aktor yang terlibat, bentuk pesan dakwah, serta konteks media yang digunakan (Neuman, 2014). Sementara itu, aspek analitis digunakan untuk menafsirkan bagaimana dakwah digital tersebut berfungsi sebagai soft power dan diplomasi publik non-negara dalam membentuk persepsi masyarakat Barat terhadap Islam.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif interpretatif, karena peneliti berperan aktif dalam menafsirkan makna dari teks, simbol, dan narasi dakwah digital. Pendekatan interpretatif menekankan pemahaman (*understanding*) terhadap makna subjektif yang dilekatkan aktor pada praktik sosial tertentu (Schwandt, 2000). Dalam konteks ini, peneliti tidak mengklaim objektivitas absolut, melainkan berupaya membangun pemahaman yang reflektif dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Dari sudut pandang Hubungan Internasional, penelitian ini termasuk dalam kajian non-tradisional HI yang menempatkan aktor non-negara dan isu budaya-agama sebagai fokus analisis. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan HI kontemporer yang

tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada negara dan keamanan militer, tetapi juga pada peran identitas, budaya, dan komunikasi global dalam membentuk hubungan antar masyarakat (Haynes, 2014). Dakwah digital diposisikan sebagai praktik lintas batas yang memiliki implikasi terhadap citra Islam dan relasi Islam-Barat di tingkat internasional.

Selain itu, penelitian ini bersifat eksploratif, mengingat kajian mengenai dakwah Islam digital sebagai instrumen soft power non-negara dalam Hubungan Internasional masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks persepsi Barat. Penelitian eksploratif bertujuan untuk membuka ruang pemahaman baru dan membangun kerangka analitis yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian berikutnya (Babbie, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi universal, melainkan pemahaman konseptual yang mendalam.

Dengan memilih pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivisme, serta jenis penelitian deskriptif-analitis dan interpretatif, penelitian ini diharapkan mampu menangkap secara komprehensif bagaimana dakwah Islam digital beroperasi dalam ruang global, bagaimana ia dimaknai oleh audiens Barat, serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi pada pembentukan persepsi dan representasi Islam dalam diskursus Hubungan Internasional kontemporer.

2.2 Objek dan Fokus Kajian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah dakwah Islam di ruang digital global sebagai praktik komunikasi keagamaan yang beroperasi lintas batas

negara dan budaya. Dakwah digital dipahami sebagai aktivitas penyampaian nilai, ajaran, dan representasi Islam melalui platform media digital yang bersifat terbuka, interaktif, dan partisipatif, seperti media sosial, situs berbagi video, dan platform konten daring lainnya (Campbell, 2013). Objek ini dipilih karena ruang digital telah menjadi arena utama produksi dan sirkulasi makna keagamaan dalam konteks global kontemporer.

Secara lebih spesifik, objek kajian penelitian ini mencakup konten dakwah Islam yang ditujukan atau dapat diakses oleh audiens Barat. Konten tersebut meliputi ceramah digital, video dakwah, tulisan populer keislaman, serta narasi visual yang mempresentasikan Islam dalam konteks isu global seperti perdamaian, toleransi, hak asasi manusia, dan kehidupan Muslim minoritas. Fokus pada audiens Barat didasarkan pada asumsi bahwa persepsi Barat terhadap Islam memiliki pengaruh signifikan dalam diskursus internasional, termasuk dalam pembentukan kebijakan, opini publik, dan relasi Islam-Barat (Esposito, 2011).

Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada bagaimana dakwah Islam digital berfungsi sebagai instrumen pembentukan persepsi dan representasi Islam di dunia Barat. Penelitian tidak bertujuan menilai benar atau salahnya ajaran dakwah secara teologis, melainkan menganalisis narasi, simbol, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam dakwah digital serta implikasinya terhadap citra Islam di ruang publik global. Dengan demikian, fokus kajian bersifat analitis dan interpretatif, bukan normatif atau apologetik.

Dalam kerangka Hubungan Internasional, fokus kajian penelitian ini terletak pada peran aktor non-negara dalam membentuk hubungan antar masyarakat lintas negara. Aktor dakwah digital baik individu, komunitas, maupun organisasi diposisikan sebagai aktor transnasional yang memiliki kapasitas soft power melalui produksi dan penyebaran narasi keagamaan (Nye, 2004; Haynes, 2014). Fokus ini sejalan dengan perkembangan kajian HI kontemporer yang menaruh perhatian pada dimensi budaya, identitas, dan komunikasi global.

Penelitian ini juga memfokuskan kajian pada konstruksi identitas dan representasi Islam dalam konten dakwah digital. Representasi dipahami sebagai proses produksi makna melalui bahasa, simbol, dan visual yang membentuk cara Islam dipahami oleh audiens global (Hall, 1997). Dalam konteks ini, dakwah digital tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga membangun gambaran tertentu tentang Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban.

Selain itu, fokus kajian mencakup relasi antara dakwah digital dan diskursus Islamophobia di Barat. Penelitian ini menganalisis sejauh mana dakwah digital menghadirkan narasi tandingan (counter-narrative) terhadap stereotip negatif tentang Islam yang selama ini berkembang dalam media arus utama dan wacana politik Barat (Cesari, 2013). Fokus ini penting untuk memahami potensi dakwah digital sebagai medium diplomasi publik berbasis budaya dan agama.

Untuk menjaga ketajaman analisis, penelitian ini membatasi fokus kajian pada dimensi persepsi dan wacana, bukan pada dampak kebijakan konkret atau

perubahan sikap politik secara langsung. Dengan kata lain, penelitian ini tidak mengukur perubahan kebijakan luar negeri negara Barat, tetapi menelaah bagaimana persepsi dan citra Islam dibangun dan dinegosiasikan dalam ruang digital. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tetap konsisten dengan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme yang digunakan (Wendt, 1999).

Dengan menetapkan objek dan fokus kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dakwah Islam digital sebagai fenomena sosial dan transnasional. Fokus kajian ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap peran dakwah digital dalam membentuk persepsi, identitas, dan representasi Islam di dunia Barat dalam kerangka Hubungan Internasional kontemporer.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna, wacana, dan representasi sosial. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, berupa teks, visual, dan dokumen yang merepresentasikan praktik dakwah Islam di ruang digital global. Untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi melalui prinsip triangulasi (Denzin, 1978).

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis konten kualitatif terhadap media digital. Analisis konten kualitatif

digunakan untuk mengkaji pesan, narasi, simbol, dan representasi Islam yang terkandung dalam konten dakwah digital. Konten yang dianalisis meliputi video dakwah, unggahan media sosial, artikel daring, serta materi visual yang diproduksi oleh aktor dakwah Muslim dan dapat diakses oleh audiens Barat. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola narasi, serta makna ideologis yang terkandung dalam pesan dakwah (Krippendorff, 2018).

Pemilihan konten dakwah digital dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut mencakup: konten dakwah yang menggunakan bahasa internasional (seperti Inggris), memiliki jangkauan audiens lintas negara, membahas isu-isu global, serta menampilkan representasi Islam dalam konteks hubungan Islam-Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada data yang memiliki signifikansi analitis tinggi, bukan sekadar jumlah data yang besar (Neuman, 2014).

Selain analisis konten digital, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka (library research) sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan teori dakwah Islam kontemporer, agama dan media digital, konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, persepsi dan representasi, Islamophobia, serta konsep soft power dan diplomasi publik. Studi pustaka berfungsi untuk membangun kerangka teoretis dan konseptual yang kuat serta

memberikan konteks akademik terhadap temuan empiris penelitian (Zed, 2014).

Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen dan data sekunder berupa laporan organisasi internasional, hasil survei opini publik, dan publikasi lembaga riset yang relevan dengan persepsi Barat terhadap Islam. Data sekunder ini tidak dianalisis secara statistik, tetapi digunakan sebagai data kontekstual untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi penelitian. Penggunaan data sekunder membantu peneliti memahami lanskap wacana global yang melingkupi praktik dakwah digital (Creswell, 2014).

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jenis media digital dan literatur akademik. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa perspektif teoretis seperti teori dakwah, digital religion, konstruktivisme, dan soft power untuk menafsirkan fenomena yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi bias peneliti dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Denzin & Lincoln, 2018).

Selama proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi non-partisipan terhadap interaksi dan diskursus yang terjadi di ruang digital, seperti kolom komentar, respons audiens, dan dinamika penyebaran konten. Observasi ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis perilaku individu secara mendalam, melainkan untuk memahami konteks sosial dan diskursif di mana dakwah digital berlangsung. Observasi non-partisipan relevan

dalam penelitian media digital karena memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika komunikasi tanpa terlibat langsung dalam produksi konten (Hine, 2015).

Secara keseluruhan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data yang kaya, kontekstual, dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan mengombinasikan analisis konten digital, studi pustaka, data sekunder, serta triangulasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang dakwah Islam digital sebagai praktik soft power dan diplomasi publik non-negara dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif interpretatif, dengan tujuan menafsirkan makna, pola, dan konstruksi wacana yang terkandung dalam praktik dakwah Islam digital. Analisis data tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami bagaimana narasi Islam diproduksi, direpresentasikan, dan dinegosiasikan dalam ruang digital global serta implikasinya terhadap persepsi masyarakat Barat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna melalui interaksi dan wacana (Wendt, 1999).

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dan simultan sejak tahap pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data bukan tahap akhir yang terpisah, melainkan proses berkelanjutan yang berlangsung sejak peneliti mulai berinteraksi dengan

data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dengan demikian, peneliti secara reflektif terus menyesuaikan fokus analisis berdasarkan temuan awal di lapangan digital dan literatur yang dikaji.

Tahap pertama analisis data adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari konten dakwah digital, dokumen pustaka, dan data sekunder. Reduksi data dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti narasi tentang Islam dan Barat, pesan toleransi atau eksklusivitas, simbol identitas Muslim, serta wacana yang berkaitan dengan Islamophobia. Proses ini bertujuan untuk menghindari kelebihan data (data overload) dan menjaga konsistensi analisis (Miles et al., 2014).

Tahap kedua adalah kategorisasi dan pengodean data (coding). Data yang telah direduksi kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema konseptual yang diturunkan dari kerangka teoretis penelitian. Kategori analisis antara lain mencakup: representasi Islam, konstruksi identitas Muslim, narasi dakwah moderat, dakwah sebagai soft power, serta dakwah sebagai counter-narrative terhadap Islamophobia. Pengodean dilakukan secara tematik dan fleksibel, sehingga memungkinkan munculnya kategori baru dari data (emergent coding) selain kategori yang telah ditentukan sebelumnya (Saldaña, 2016).

Tahap ketiga adalah analisis wacana kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan bagaimana bahasa, simbol, dan narasi dakwah digital membentuk makna tentang Islam dalam konteks global. Analisis wacana digunakan untuk memahami tidak hanya apa yang disampaikan dalam dakwah

digital, tetapi juga bagaimana dan dalam konteks apa pesan tersebut diproduksi dan diterima (Fairclough, 2013). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji relasi kuasa, ideologi, dan identitas yang tersirat dalam praktik komunikasi keagamaan di ruang digital.

Dalam kerangka Hubungan Internasional, hasil analisis wacana kemudian dihubungkan dengan konsep soft power dan diplomasi publik non-negara. Peneliti menafsirkan bagaimana daya tarik nilai, etika, dan representasi Islam dalam dakwah digital berpotensi membentuk persepsi audiens Barat tanpa paksaan. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori soft power (Nye, 2004) dan diplomasi publik (Cull, 2009), sehingga dakwah digital dipahami sebagai praktik komunikasi strategis dalam relasi transnasional.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi berbasis konstruktivisme. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan temuan penelitian sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang lebih luas. Persepsi Barat terhadap Islam dipahami sebagai hasil dari interaksi antara dakwah digital, media global, dan wacana politik yang berkembang. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada deskripsi konten dakwah, tetapi menjelaskan bagaimana konten tersebut berkontribusi pada pembentukan norma, identitas, dan makna dalam hubungan Islam-Barat (Wendt, 1999).

Untuk menjaga keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini menerapkan beberapa strategi analisis, antara lain konsistensi logika analisis, keterlacakan data terhadap sumber aslinya, serta triangulasi teori dan sumber. Validitas dalam penelitian kualitatif tidak diukur melalui

replikasi statistik, melainkan melalui koherensi argumentasi dan kedalaman interpretasi (Creswell, 2014). Peneliti juga melakukan refleksi kritis untuk meminimalkan bias subjektif dalam proses interpretasi.

Secara keseluruhan, teknik analisis data dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai dakwah Islam digital sebagai praktik soft power dan diplomasi publik non-negara. Melalui tahapan reduksi data, pengodean tematik, analisis wacana, dan interpretasi konstruktivis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana dakwah digital berperan dalam membentuk persepsi dan representasi Islam di dunia Barat secara sistematis dan argumentatif.

2.5 Teknik Triangulasi Data dan Teori

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan dan kredibilitas data tidak diukur melalui uji statistik, melainkan melalui kedalaman analisis, konsistensi logika, serta ketepatan interpretasi terhadap konteks sosial yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data dan teori sebagai strategi utama untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Triangulasi dipahami sebagai proses pemeriksaan silang terhadap data dan interpretasi dengan menggunakan berbagai sumber, metode, dan perspektif teoretis (Denzin, 1978).

Triangulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis terhadap dakwah Islam digital dan persepsi Barat terhadap Islam tidak bersifat sepihak atau bias peneliti. Mengingat objek penelitian berkaitan dengan wacana, representasi,

dan identitas yang kompleks, penggunaan triangulasi menjadi penting untuk menangkap realitas sosial secara lebih utuh dan reflektif (Denzin & Lincoln, 2018).

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber data. Dalam penelitian ini, triangulasi data mencakup beberapa bentuk.

Pertama, triangulasi sumber digital, yaitu perbandingan antara berbagai jenis konten dakwah Islam yang berasal dari platform media digital yang berbeda, seperti video dakwah, unggahan media sosial, artikel daring, dan materi visual. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat konsistensi atau perbedaan narasi, simbol, dan representasi Islam yang disampaikan kepada audiens global. Dengan cara ini, peneliti dapat menghindari generalisasi yang didasarkan pada satu jenis media atau satu aktor dakwah saja (Krippendorff, 2018).

Kedua, triangulasi antara data digital dan data pustaka. Temuan dari analisis konten dakwah digital dibandingkan dengan literatur akademik, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas dakwah kontemporer, agama dan media digital, serta persepsi Barat terhadap Islam. Tujuannya adalah untuk menempatkan temuan empiris dalam konteks teoritis dan akademik yang lebih luas, sehingga analisis tidak terlepas dari diskursus ilmiah yang telah ada (Creswell, 2014).

Ketiga, triangulasi data kontekstual, yaitu penggunaan data sekunder seperti laporan lembaga riset, hasil survei opini publik, dan publikasi organisasi internasional yang berkaitan dengan

Islamophobia dan persepsi masyarakat Barat terhadap Islam. Data ini tidak dianalisis sebagai data utama, tetapi berfungsi sebagai latar kontekstual untuk memperkuat interpretasi dan menjelaskan posisi dakwah digital dalam lanskap wacana global.

Selain triangulasi data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi teori dengan menggunakan beberapa perspektif teoretis untuk menganalisis fenomena yang sama. Triangulasi teori dilakukan untuk menghindari reduksionisme, yaitu kecenderungan menjelaskan fenomena kompleks hanya dengan satu sudut pandang teoretis (Denzin, 1978).

Pertama, teori dakwah Islam kontemporer digunakan untuk memahami tujuan, metode, dan etika dakwah dalam konteks modern dan digital. Teori ini membantu peneliti menafsirkan pesan dakwah tidak hanya sebagai konten komunikasi, tetapi sebagai praktik keagamaan yang memiliki landasan normatif dan moral.

Kedua, teori agama dan media digital (digital religion) digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik dakwah bertransformasi dalam ruang media digital yang bersifat interaktif dan terdesentralisasi. Perspektif ini menjelaskan perubahan otoritas keagamaan, pola komunikasi, dan partisipasi audiens dalam dakwah digital (Campbell, 2013).

Ketiga, teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional digunakan untuk memahami bagaimana identitas dan persepsi terhadap Islam dibentuk melalui interaksi sosial dan wacana global. Konstruktivisme membantu menjelaskan bahwa persepsi Barat terhadap Islam bukanlah fakta

objektif, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus berubah (Wendt, 1999).

Keempat, konsep soft power dan diplomasi publik non-negara digunakan untuk menafsirkan dakwah digital sebagai instrumen pengaruh berbasis nilai dan budaya. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan praktik dakwah dengan dinamika hubungan internasional kontemporer, khususnya dalam konteks aktor non-negara dan komunikasi lintas budaya (Nye, 2004; Cull, 2009).

Dengan mengombinasikan berbagai perspektif teoretis tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan berimbang. Setiap teori tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan dimensi normatif, kultural, dan politik dari dakwah Islam digital.

Penerapan triangulasi data dan teori memungkinkan peneliti untuk meningkatkan kredibilitas (credibility), ketergantungan (dependability), dan konfirmabilitas (confirmability) temuan penelitian. Keabsahan penelitian tidak ditentukan oleh keseragaman data, tetapi oleh konsistensi makna yang muncul dari berbagai sumber dan perspektif (Lincoln & Guba, 1985). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga reflektif terhadap kompleksitas realitas dakwah Islam digital di ruang global.

Secara keseluruhan, teknik triangulasi data dan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol metodologis untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui triangulasi, penelitian ini

berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran dakwah Islam digital dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam dalam kerangka Hubungan Internasional kontemporer.

2.6 Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memiliki keterbatasan yang melekat pada pilihan pendekatan, metode, dan ruang lingkup kajian yang digunakan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi universal, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai dakwah Islam digital dalam membentuk persepsi masyarakat Barat terhadap Islam. Oleh karena itu, keterbatasan penelitian ini perlu dijelaskan secara terbuka sebagai bagian dari tanggung jawab akademik.

Keterbatasan pertama berkaitan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman makna dan interpretasi wacana, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kemampuan analisis dan refleksi peneliti. Meskipun strategi triangulasi telah diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas data, interpretasi yang dihasilkan tetap bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari sudut pandang peneliti (Creswell, 2014). Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak dapat diperlakukan sebagai representasi tunggal atau final mengenai persepsi Barat terhadap Islam.

Keterbatasan kedua terkait dengan objek penelitian yang berfokus pada ruang digital. Analisis terhadap dakwah Islam digital hanya mencakup

konten yang tersedia secara daring dan dapat diakses publik. Penelitian ini tidak menjangkau praktik dakwah luring (offline) atau dinamika interaksi keagamaan yang berlangsung di ruang fisik. Padahal, persepsi terhadap Islam dibentuk oleh kombinasi pengalaman daring dan luring secara simultan (Hjarvard, 2011). Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus penelitian, namun sekaligus membatasi cakupan analisis.

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan pemilihan data dan aktor dakwah digital. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang menitikberatkan pada konten dakwah dengan jangkauan internasional dan bahasa global. Akibatnya, penelitian ini tidak merepresentasikan seluruh spektrum dakwah Islam digital, khususnya dakwah lokal atau berbasis komunitas kecil yang mungkin memiliki dinamika dan narasi yang berbeda. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih menggambarkan pola dakwah digital yang bersifat global dan transnasional, bukan keseluruhan praktik dakwah Islam di dunia digital.

Keterbatasan keempat menyangkut analisis persepsi audiens Barat. Penelitian ini menganalisis persepsi Barat terhadap Islam secara tidak langsung melalui representasi, wacana, dan narasi yang berkembang di ruang digital, serta melalui literatur dan data sekunder. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau survei langsung terhadap individu masyarakat Barat sebagai responden. Dengan demikian, persepsi yang dianalisis merupakan konstruksi diskursif, bukan hasil pengukuran sikap individu secara empiris (Jervis, 1976). Keterbatasan ini sejalan dengan paradigma konstruktivisme yang

digunakan, namun tetap perlu dicatat sebagai batas metodologis.

Keterbatasan kelima berkaitan dengan dinamika dan perubahan cepat media digital. Konten dakwah digital bersifat temporer, dinamis, dan dipengaruhi oleh algoritma platform yang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, temuan penelitian ini merefleksikan kondisi dan wacana pada periode waktu tertentu, dan tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika dakwah digital di masa mendatang. Hal ini merupakan keterbatasan umum dalam penelitian media digital yang bersifat kontekstual dan time-bound (Hine, 2015).

Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memiliki nilai akademik dan praktis dalam memahami peran dakwah Islam digital sebagai praktik soft power dan diplomasi publik non-negara. Penjelasan mengenai keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas pendekatan, metode, dan cakupan kajian, misalnya dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melakukan studi komparatif lintas negara, atau melibatkan audiens secara langsung sebagai subjek penelitian.

BAB III
DIGITALISASI
DAKWAH ISLAM:
POLA, AKTOR, DAN
MEDIA

3.1 Evolusi Dakwah Islam dari Konvensional ke Digital

Dakwah Islam secara historis merupakan praktik komunikasi nilai-nilai keislaman yang berakar pada interaksi langsung antara dai dan mad'u, yang menekankan pendidikan, pembinaan moral, dan penanaman akidah. Pada fase awal, dakwah dilakukan secara konvensional dan tatap muka, seperti melalui majelis taklim, pengajian pesantren, khutbah Jumat, tabligh akbar, dan interaksi sosial berbasis komunitas lokal. Model dakwah ini menekankan legitimasi keilmuan dai, kedekatan emosional, serta otoritas sosial yang diperoleh dari reputasi spiritual dan pengalaman pribadi. Kelebihan metode ini terletak pada kemampuan membangun hubungan personal yang mendalam, pemahaman konteks sosial lokal, dan pengawasan moral yang intensif. Namun, dakwah konvensional memiliki keterbatasan signifikan, terutama dalam hal jangkauan geografis, kapasitas audiens, serta kecepatan penyebaran informasi (Eickelman & Anderson, 2003; Campbell, 2010).

Seiring perkembangan teknologi komunikasi modern, dakwah Islam mengalami transformasi media yang signifikan. Pada abad ke-20, dai mulai memanfaatkan media cetak, radio, dan televisi sebagai sarana penyampaian pesan keagamaan. Media cetak, seperti majalah Islam dan buku pengajaran agama, memungkinkan penanaman nilai keislaman secara lebih sistematis dan dokumentatif, sementara radio dan televisi membuka kemungkinan dakwah mencapai audiens yang lebih luas, bahkan lintas provinsi atau negara. Pada tahap ini, dakwah mulai memasuki ruang publik yang lebih luas, di

mana pesan dakwah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik dai. Meski demikian, media konvensional bersifat satu arah dan tetap terikat pada struktur institusional, seperti lembaga pendidikan Islam, organisasi dakwah, atau jaringan masjid, sehingga interaktivitas dan partisipasi audiens masih terbatas (McQuail, 2010; Bunt, 2003).

Memasuki era globalisasi dan revolusi informasi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, dakwah Islam mengalami perubahan yang lebih fundamental melalui hadirnya media digital dan platform daring. Internet, media sosial, dan berbagai aplikasi komunikasi memungkinkan dakwah berlangsung secara interaktif, partisipatif, dan lintas batas negara. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, blog, serta situs web keagamaan memfasilitasi penyebaran pesan dakwah dalam format teks, audio, dan video secara instan. Fenomena ini menandai pergeseran otoritas dakwah dari struktur hierarkis institusional menuju otoritas berbasis popularitas, kredibilitas personal, keahlian tematik, serta algoritma platform digital (Hjarvard, 2011; Campbell, 2013).

Transformasi dakwah ke ruang digital juga mengubah gaya komunikasi dan penyajian narasi keislaman. Pesan dakwah tidak lagi disampaikan semata-mata dalam bentuk ceramah panjang atau khutbah tradisional, tetapi dikemas dalam format visual, infografik, cerita singkat, atau video berdurasi pendek yang mudah dibagikan dan viral. Bahasa dakwah menjadi lebih inklusif, kontekstual, dan adaptif terhadap audiens global, termasuk masyarakat non-Muslim. Pendekatan ini

memperluas relevansi dakwah, mempermudah pemahaman lintas budaya, serta memungkinkan audiens untuk berinteraksi, memberikan tanggapan, atau menyebarkan ulang pesan dakwah, menciptakan ekosistem komunikasi yang partisipatif (Bunt, 2018; Tufekci, 2017).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, evolusi dakwah Islam ke ranah digital mencerminkan munculnya aktor non-negara transnasional yang memiliki kapasitas membentuk citra Islam di tingkat global. Dai digital, influencer Muslim, komunitas diaspora, dan organisasi keagamaan berbasis daring berperan dalam produksi narasi, pembentukan identitas Muslim global, dan representasi Islam di mata publik internasional. Fenomena ini selaras dengan pendekatan konstruktivisme, yang menekankan bahwa identitas, norma, dan realitas sosial-politik dibentuk melalui interaksi sosial dan wacana, serta dipengaruhi oleh medium komunikasi yang digunakan (Wendt, 1999; Adler, 2005).

Lebih jauh, dakwah digital dapat dipahami sebagai praktik soft power berbasis budaya dan agama. Dengan menekankan nilai-nilai damai, toleransi, dan universalitas Islam, dakwah digital memiliki potensi untuk menantang stereotip negatif, mitigasi Islamophobia, dan membangun persepsi positif tentang Islam di mata masyarakat Barat. Dakwah digital berfungsi sebagai instrumen diplomasi publik non-negara, di mana individu dan komunitas Muslim menjadi aktor diplomasi kultural yang memengaruhi opini publik dan persepsi global (Nye, 2004; Mandaville & Hamid, 2018).

Meski memiliki potensi besar, dakwah digital juga menghadapi tantangan kompleks. Fragmentasi audiens, polarisasi wacana, risiko penyederhanaan pesan agama akibat logika algoritma, dan budaya viral dapat memunculkan distorsi interpretasi nilai-nilai Islam. Selain itu, persaingan narasi antaraktor dakwah, baik formal maupun non-formal, dapat menimbulkan konflik interpretasi, menuntut strategi komunikasi yang cermat, etis, dan berbasis evidensi (Campbell, 2010; Sunstein, 2017).

Dengan demikian, evolusi dakwah Islam dari konvensional ke digital bukan sekadar perubahan medium komunikasi, tetapi mencerminkan transformasi paradigma dakwah itu sendiri. Dakwah digital memperluas jangkauan, meningkatkan partisipasi audiens, dan membentuk interaksi lintas budaya yang dinamis, sekaligus menempatkan Islam sebagai aktor kultural dan diplomatik dalam tatanan global kontemporer. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dakwah Islam bergantung pada adaptasi terhadap teknologi, pemahaman audiens global, dan integrasi nilai-nilai agama dengan dinamika komunikasi internasional.

3.2 Platform Digital sebagai Medium Dakwah Global

Perkembangan platform digital telah mengubah secara signifikan cara dakwah Islam diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam skala global. Platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan media sosial lainnya tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sarana komunikasi, melainkan sebagai ruang sosial transnasional yang membentuk wacana, identitas, dan persepsi keagamaan lintas

batas negara. Dalam konteks ini, dakwah Islam mengalami perluasan fungsi dari aktivitas religius menjadi praktik kultural dan komunikatif yang beroperasi dalam struktur globalisasi digital.

Platform digital memiliki karakteristik utama berupa aksesibilitas global, interaktivitas tinggi, dan logika algoritmik. Aksesibilitas global memungkinkan pesan dakwah yang diproduksi di satu wilayah dapat dikonsumsi oleh audiens lintas negara dan budaya dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini menjadikan dakwah Islam tidak lagi bersifat lokal atau nasional, tetapi masuk ke dalam ruang publik global yang kompetitif dan plural (Castells, 2010). Interaktivitas platform digital juga mendorong perubahan relasi antara dai dan audiens, di mana audiens tidak lagi pasif, melainkan aktif menanggapi, menyebarkan, bahkan menafsirkan ulang pesan dakwah.

YouTube, misalnya, berfungsi sebagai medium dakwah berbasis audio-visual yang memungkinkan penyampaian pesan keislaman secara naratif, argumentatif, dan edukatif dalam durasi yang fleksibel. Dai atau konten kreator Muslim dapat membangun otoritas keagamaan melalui konsistensi konten, jumlah pengikut, dan engagement audiens, bukan semata-mata melalui legitimasi institusional formal. Fenomena ini menunjukkan terjadinya demokratisasi otoritas keagamaan, sekaligus fragmentasi sumber rujukan keislaman di ruang digital (Eickelman & Anderson, 2003).

Sementara itu, platform seperti Instagram dan TikTok mendorong dakwah dalam format yang lebih singkat, visual, dan emosional. Pesan dakwah sering kali dikemas dalam bentuk kutipan singkat, video

pendek, atau storytelling personal yang mudah dikonsumsi oleh generasi muda dan audiens global. Strategi ini mencerminkan adaptasi dakwah terhadap budaya digital yang menekankan kecepatan, estetika, dan viralitas. Namun, pada saat yang sama, format ini juga berpotensi menyederhanakan ajaran agama dan menggeser substansi dakwah menjadi sekadar simbol identitas (Hjarvard, 2011).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, platform digital dapat dipahami sebagai arena non-negara tempat berlangsungnya praktik soft power dan diplomasi kultural. Dakwah Islam melalui platform digital berfungsi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Islam seperti perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal, yang secara tidak langsung memengaruhi persepsi masyarakat global terhadap Islam. Hal ini sejalan dengan konsep soft power yang menekankan kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai dan budaya, bukan paksaan (Nye, 2004).

Lebih jauh, dakwah digital juga berkaitan dengan praktik public diplomacy non-negara, di mana individu, komunitas Muslim, dan kreator konten berperan sebagai aktor diplomasi kultural informal. Melalui narasi personal, pengalaman hidup sebagai Muslim minoritas, atau diskusi lintas iman, dakwah digital berkontribusi dalam membentuk citra Islam yang lebih humanis dan kontekstual di mata audiens Barat. Dalam kerangka konstruktivisme, praktik ini menunjukkan bagaimana identitas Islam diproduksi dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial dan wacana digital (Wendt, 1999).

Namun demikian, penggunaan platform digital sebagai medium dakwah global juga menghadapi sejumlah tantangan. Logika algoritma platform cenderung memprioritaskan konten yang kontroversial, emosional, atau polaristik, yang berpotensi memperkuat fragmentasi wacana keislaman dan memperbesar konflik identitas. Selain itu, ruang digital yang terbuka memungkinkan terjadinya kontestasi narasi antara dakwah moderat dan wacana ekstrem, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi Islam secara global (Sunstein, 2017).

Dengan demikian, platform digital tidak dapat dipahami sebagai medium yang netral dalam dakwah Islam global. Ia merupakan ruang yang sarat kepentingan, logika teknologis, dan dinamika kekuasaan simbolik. Dakwah Islam di platform digital mencerminkan upaya adaptasi umat Islam terhadap struktur komunikasi global sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan persepsi, identitas, dan relasi Islam dengan dunia internasional kontemporer.

3.3 Aktor Dakwah Digital: Ulama, Influencer, dan Komunitas

Perkembangan dakwah Islam di ruang digital global tidak dapat dilepaskan dari peran aktor-aktor yang memproduksi dan menyebarkan pesan keagamaan. Berbeda dengan dakwah konvensional yang didominasi oleh ulama dan lembaga keagamaan formal, dakwah digital ditandai oleh pluralitas aktor, mulai dari ulama institusional, influencer Muslim, hingga komunitas virtual. Masing-masing aktor memiliki modal, strategi

komunikasi, dan pengaruh yang berbeda dalam membentuk wacana Islam di ruang global.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, kemunculan aktor-aktor dakwah digital ini mencerminkan menguatnya aktor non-negara dalam pembentukan opini publik internasional. Mereka beroperasi di luar struktur negara, tetapi memiliki kemampuan memengaruhi persepsi, identitas, dan bahkan relasi antar masyarakat lintas negara melalui produksi wacana keagamaan (Keck & Sikkink, 1998).

Ulama tetap menjadi aktor sentral dalam dakwah Islam digital, terutama karena legitimasi keilmuan dan otoritas religius yang mereka miliki. Namun, di ruang digital, otoritas ini mengalami transformasi. Ulama tidak lagi hanya dinilai berdasarkan sanad keilmuan atau posisi institusional, tetapi juga berdasarkan kemampuan komunikasi digital, konsistensi narasi, dan kedekatan dengan audiens global. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari otoritas tradisional menuju otoritas performatif dan mediatik (Hjarvard, 2011).

Ulama yang aktif di platform digital sering kali berperan sebagai penjaga narasi moderat Islam, terutama dalam konteks global yang sarat dengan stereotip dan Islamofobia. Melalui ceramah daring, diskusi lintas iman, dan klarifikasi isu-isu sensitif, ulama digital berkontribusi dalam membangun citra Islam yang rasional, damai, dan kontekstual bagi audiens internasional. Dalam kerangka konstruktivisme, peran ini penting karena ulama berfungsi sebagai produsen makna dan penafsir identitas Islam di ruang publik global (Wendt, 1999).

Selain ulama, muncul pula aktor baru berupa influencer Muslim, yaitu individu yang memiliki

pengaruh besar di media sosial meskipun tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan agama formal. Influencer Muslim sering kali menyampaikan pesan dakwah melalui pengalaman personal, gaya hidup, dan narasi keseharian yang mudah diterima oleh audiens global, khususnya generasi muda. Pendekatan ini menjadikan dakwah lebih personal, emosional, dan relatable.

Dalam konteks global, influencer Muslim berperan penting dalam popularisasi identitas Islam sebagai bagian dari kehidupan modern dan kosmopolitan. Representasi Muslim sebagai individu yang produktif, toleran, dan berintegrasi dengan nilai-nilai global dapat menjadi kontra-narasi terhadap representasi negatif Islam di media Barat (Poole, 2002). Namun, absennya otoritas keilmuan yang kuat juga menimbulkan risiko banalitas agama dan penyederhanaan ajaran Islam menjadi sekadar simbol identitas (Turner, 2011)

Aktor dakwah digital tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif melalui komunitas dakwah virtual, seperti forum daring, kanal kolektif, atau gerakan dakwah berbasis media sosial. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang produksi dan distribusi wacana keagamaan yang bersifat partisipatif. Audiens tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten dakwah melalui komentar, repost, dan diskusi daring.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, komunitas dakwah digital dapat dipahami sebagai bentuk transnational advocacy networks, yaitu jaringan aktor lintas negara yang berbagi nilai dan tujuan bersama (Keck & Sikkink, 1998). Melalui interaksi lintas budaya, komunitas dakwah digital

berkontribusi dalam pembentukan solidaritas Muslim global sekaligus dialog dengan non-Muslim di ruang digital. Proses ini memperlihatkan bagaimana identitas Islam dibangun secara kolektif melalui interaksi sosial dan wacana digital.

Keberagaman aktor dakwah digital menciptakan dinamika yang kompleks dalam pembentukan persepsi Islam di tingkat global. Di satu sisi, pluralitas aktor memungkinkan hadirnya narasi Islam yang lebih inklusif, beragam, dan humanis. Di sisi lain, fragmentasi aktor juga membuka ruang kontestasi wacana, termasuk antara narasi moderat dan narasi ekstrem. Logika algoritma media sosial sering kali memperkuat konten yang polaristik, sehingga memengaruhi bagaimana Islam dipersepsikan oleh audiens internasional (Sunstein, 2017).

Dengan demikian, aktor dakwah digital ulama, influencer, dan komunitas tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi global yang membentuk wacana, identitas, dan representasi Islam. Dalam konteks Hubungan Internasional kontemporer, mereka berperan sebagai aktor non-negara strategis yang berkontribusi pada praktik soft power, diplomasi kultural, dan konstruksi persepsi Islam di dunia Barat dan global.

3.4 Otoritas Keagamaan dan Legitimasi di Ruang Digital

Ruang digital global telah mengubah secara mendasar konsep otoritas keagamaan dalam Islam. Jika dalam dakwah konvensional otoritas keagamaan bersumber pada legitimasi institusional, sanad

keilmuan, dan pengakuan sosial dalam komunitas tertentu, maka dalam dakwah digital otoritas tersebut semakin ditentukan oleh mekanisme mediatik, seperti visibilitas, engagement audiens, dan algoritma platform digital. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam pembentukan legitimasi keagamaan yang bersifat cair, kompetitif, dan lintas batas negara.

Dalam perspektif sosiologi agama, otoritas keagamaan secara klasik dipahami sebagai bentuk otoritas tradisional dan karismatik yang dilegitimasi melalui struktur sosial dan institusi keagamaan (Weber, 1978). Namun, di ruang digital, otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur tersebut. Seorang dai atau kreator konten dapat memperoleh legitimasi keagamaan melalui popularitas, konsistensi narasi, dan kedekatan emosional dengan audiens, meskipun tidak memiliki afiliasi institusional formal. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari otoritas berbasis institusi menuju otoritas berbasis media dan performativitas (Hjarvard, 2011).

Legitimasi keagamaan di ruang digital juga bersifat relasional dan partisipatif. Audiens berperan aktif dalam menentukan siapa yang dianggap otoritatif melalui mekanisme like, share, komentar, dan langganan. Proses ini menjadikan legitimasi keagamaan sebagai hasil interaksi sosial yang terus dinegosiasikan, bukan sebagai status yang bersifat tetap. Dalam kerangka konstruktivisme Hubungan Internasional, legitimasi ini dapat dipahami sebagai produk wacana dan praktik sosial yang membentuk identitas dan kepentingan aktor (Wendt, 1999).

Namun demikian, transformasi otoritas keagamaan di ruang digital juga memunculkan krisis otoritas. Fragmentasi sumber rujukan keagamaan menyebabkan pluralitas tafsir yang tidak selalu diiringi dengan kedalaman metodologis. Kondisi ini membuka ruang bagi simplifikasi ajaran, otoritas semu, dan bahkan penyebaran wacana keagamaan yang problematik. Logika algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional cenderung memperkuat figur-figur yang kontroversial, bukan yang paling kredibel secara keilmuan (Sunstein, 2017).

Dalam konteks global, krisis otoritas keagamaan ini memiliki implikasi serius terhadap persepsi Islam di dunia Barat. Ketika narasi keislaman yang paling terlihat di ruang digital didominasi oleh suara ekstrem atau tidak representatif, maka Islam cenderung dipersepsikan secara negatif dan monolitik. Sebaliknya, ketika ulama dan aktor dakwah moderat mampu membangun legitimasi digital yang kuat, ruang digital dapat menjadi arena kontra-narasi terhadap Islamofobia dan stereotip politik-keamanan (Poole, 2002).

Lebih jauh, otoritas keagamaan digital juga berkaitan dengan praktik soft power non-negara. Aktor dakwah yang memiliki legitimasi tinggi di ruang digital berpotensi memengaruhi opini publik internasional tanpa menggunakan instrumen politik formal. Mereka berperan sebagai produsen makna dan representasi Islam yang berkontribusi pada diplomasi kultural dan pembentukan citra Islam global. Dalam konteks ini, legitimasi keagamaan digital menjadi sumber daya simbolik yang bernilai

strategis dalam hubungan internasional kontemporer (Nye, 2004).

Dengan demikian, otoritas keagamaan di ruang digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelanjutan dari otoritas tradisional, melainkan sebagai bentuk baru legitimasi yang dibentuk oleh interaksi antara aktor keagamaan, audiens global, dan teknologi digital. Analisis terhadap otoritas dan legitimasi dakwah digital menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam direpresentasikan, dipersepsikan, dan dinegosiasikan dalam ruang digital global yang sarat dengan kontestasi wacana dan kepentingan.

3.5 Algoritma, Viralitas, dan Kontestasi Narasi Dakwah

Dalam ekosistem dakwah digital global, algoritma platform media sosial memainkan peran sentral dalam menentukan visibilitas, jangkauan, dan daya pengaruh pesan keagamaan. Algoritma ini tidak bersifat netral, melainkan bekerja berdasarkan logika komersial dan keterlibatan pengguna (user engagement), yang diukur melalui berbagai indikator seperti jumlah klik, durasi tontonan, komentar, berbagi (share), serta tingkat respons emosional audiens. Konsekuensinya, narasi dakwah yang beredar luas di ruang digital sering kali bukan semata-mata yang paling substantif secara teologis, melainkan yang paling kompatibel dengan logika viralitas platform. Hal ini menunjukkan bahwa medium digital tidak hanya menyalurkan pesan, tetapi juga secara aktif membentuk bentuk dan isi pesan melalui mekanisme algoritmis (Gillespie, 2018; Campbell, 2013).

Viralitas menjadi mekanisme utama dalam penyebaran dakwah digital. Pesan yang bersifat provokatif, emosional, kontroversial, atau dramatis cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan narasi yang bersifat reflektif, edukatif, atau argumentatif. Fenomena ini mendorong simplifikasi pesan dakwah, di mana kompleksitas ajaran Islam sering direduksi menjadi potongan narasi singkat, memes, atau video pendek yang mudah dibagikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi membentuk pemahaman agama yang parsial, dangkal, atau bahkan salah tafsir, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Selain itu, logika viralitas ini mendorong munculnya tren konten yang menyesuaikan diri dengan norma estetika dan hiburan platform, sehingga gaya penyampaian pesan dakwah berubah menjadi lebih visual, interaktif, dan naratif (Sunstein, 2017; Tufekci, 2017).

Ruang digital juga menjadi arena kontestasi narasi dakwah. Kontestasi ini terjadi di berbagai level, mulai dari persaingan antar aktor dakwah Muslim dengan pendekatan yang berbeda, seperti dai tradisional versus influencer digital, hingga pertarungan antara narasi keislaman dan narasi politik-keamanan yang memposisikan Islam sebagai ancaman. Media sosial mempercepat proses ini dengan memungkinkan reproduksi dan amplifikasi wacana secara masif dan lintas batas negara. Konsekuensinya, audiens menghadapi beragam narasi yang kadang kontradiktif, sehingga interpretasi terhadap ajaran Islam menjadi semakin plural dan dinamis (Castells, 2010; Bunt, 2018).

Dari perspektif Hubungan Internasional, kontestasi narasi dakwah digital dapat dipahami

sebagai bagian dari perang wacana (discursive struggle) dalam pembentukan persepsi global. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial dan politik dibentuk melalui ide, norma, dan diskursus, bukan semata-mata kekuatan material. Oleh karena itu, narasi dakwah yang dominan di ruang digital memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana Islam dipersepsikan dalam kebijakan, media, dan opini publik di dunia Barat. Narasi dakwah moderat yang berhasil menjangkau audiens internasional dapat membentuk citra Islam yang damai dan inklusif, sedangkan narasi ekstrem dapat memperkuat stereotip dan meningkatkan ketakutan atau prasangka terhadap Muslim (Wendt, 1999; Nye, 2004).

Algoritma juga berkontribusi pada pembentukan echo chambers atau ruang gema, di mana pengguna cenderung terpapar pada konten yang sejalan dengan pandangan awal mereka. Dalam konteks dakwah digital, hal ini dapat memperkuat polarisasi wacana keislaman dan mempersempit ruang dialog lintas perspektif. Audiens yang telah memiliki prasangka negatif terhadap Islam berpotensi semakin terpapar pada konten ekstrem, sedangkan narasi moderat, kontekstual, dan inklusif menjadi kurang terlihat. Ruang gema ini memperkuat fragmentasi sosial dan memperdalam jurang persepsi antara komunitas Muslim dan masyarakat non-Muslim, sehingga dampak dakwah digital terhadap pemahaman lintas budaya menjadi semakin kompleks (Pariser, 2011; Campbell, 2010).

Namun demikian, algoritma dan viralitas bukan sepenuhnya destruktif bagi dakwah Islam. Dengan strategi komunikasi yang tepat, aktor dakwah

moderat dapat memanfaatkan logika platform digital untuk menyebarkan pesan Islam yang damai, inklusif, dan humanis secara luas. Penggunaan format yang menarik secara visual, narasi storytelling, serta interaksi dua arah dengan audiens dapat meningkatkan engagement tanpa mengorbankan substansi pesan. Keberhasilan narasi dakwah moderat menjadi viral dapat berkontribusi pada praktik soft power global, di mana Islam diposisikan sebagai aktor kultural yang memengaruhi opini publik internasional tanpa intervensi negara (Nye, 2004; Mandaville & Hamid, 2018).

Selain itu, kontestasi narasi dakwah di ruang digital juga menghadirkan peluang untuk penelitian interdisipliner. Analisis terhadap algoritma, viralitas, dan pola interaksi audiens dapat mengungkap bagaimana persepsi Islam terbentuk, bagaimana identitas Muslim digital dibangun, dan bagaimana representasi agama dipertaruhkan dalam arena global. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap dinamika ini penting tidak hanya bagi kajian komunikasi dan media digital, tetapi juga bagi studi Hubungan Internasional, kajian diaspora, dan strategi diplomasi publik berbasis budaya dan agama (Castells, 2013; Campbell, 2013; Sunstein, 2017).

Secara keseluruhan, algoritma, viralitas, dan kontestasi narasi dakwah membentuk medan dakwah digital global sebagai ruang interaksi yang dinamis, kompetitif, dan transnasional. Kontestasi ini mencerminkan pertarungan makna, legitimasi, dan representasi Islam dalam konteks globalisasi, media digital, dan politik identitas. Dakwah digital tidak hanya sekadar menyampaikan pesan keagamaan,

tetapi juga berperan dalam konstruksi persepsi, legitimasi sosial, dan relasi Islam dengan dunia internasional kontemporer, menjadikannya fenomena strategis dalam kajian agama, media, dan Hubungan Internasional.

BAB IV
ISLAM, MEDIA
GLOBAL, DAN
KONSTRUKSI
PERSEPSI DI DUNIA
BARAT

4.1 Sejarah Representasi Islam di Media Barat

Representasi Islam di media Barat tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan kompleks. Sejak awal, Islam kerap diposisikan sebagai the Other entitas luar yang berbeda, asing, dan sering kali dipertentangkan dengan identitas Barat. Pola representasi ini terbentuk melalui interaksi sejarah antara dunia Islam dan Barat, mulai dari era Perang Salib, kolonialisme, hingga dinamika politik global kontemporer. Media modern kemudian berperan sebagai sarana utama yang mereproduksi dan memperkuat representasi tersebut dalam kesadaran publik Barat.

Secara historis, akar representasi negatif Islam di Barat dapat ditelusuri melalui tradisi orientalisme, yaitu cara pandang intelektual dan kultural Barat dalam menggambarkan Timur, termasuk Islam, sebagai irasional, statis, dan inferior. Dalam kerangka ini, Islam sering direpresentasikan sebagai agama yang identik dengan kekerasan, fanatisme, dan ketertinggalan, sementara Barat diposisikan sebagai simbol rasionalitas dan kemajuan (Said, 1978). Narasi orientalis ini tidak hanya hidup dalam karya sastra dan akademik, tetapi juga membentuk dasar representasi Islam dalam media populer Barat.

Memasuki era kolonialisme, media Barat memainkan peran penting dalam melegitimasi dominasi politik dan ekonomi atas wilayah-wilayah Muslim. Islam dan masyarakat Muslim sering digambarkan sebagai kelompok yang membutuhkan “pencerahan” atau “modernisasi” dari Barat. Representasi ini memperkuat dikotomi antara Barat yang maju dan Islam yang terbelakang, sekaligus

membenarkan proyek kolonial sebagai misi peradaban (Poole, 2002). Pola ini berlanjut bahkan setelah era kolonial formal berakhir, melalui narasi pembangunan, keamanan, dan stabilitas politik.

Pada era Perang Dingin, Islam mulai direpresentasikan dalam konteks geopolitik global. Meskipun fokus utama konflik ideologis saat itu adalah antara kapitalisme dan komunisme, dunia Islam tetap sering digambarkan sebagai wilayah rawan konflik dan instabilitas. Media Barat cenderung menyoroti isu-isu politik di negara-negara Muslim melalui lensa kekerasan, kudeta, dan ekstremisme, tanpa memberikan konteks sosial dan historis yang memadai (Hall, 1997). Representasi ini memperkuat citra Islam sebagai problem politik dan keamanan.

Perubahan paling signifikan dalam representasi Islam di media Barat terjadi pasca-serangan 11 September 2001. Peristiwa ini menjadi titik balik yang memperkuat asosiasi antara Islam dan terorisme dalam wacana media global. Media arus utama Barat secara intensif menyoroti isu ekstremisme Islam, jihadisme, dan keamanan internasional, sering kali dengan generalisasi yang menyamakan tindakan kelompok tertentu dengan Islam sebagai agama dan identitas global (Said, 2001). Dalam konteks ini, Islam direduksi menjadi ancaman keamanan, bukan sebagai tradisi keagamaan dan peradaban yang beragam.

Representasi pasca-9/11 ini juga dipengaruhi oleh narasi politik dan kebijakan luar negeri Barat, khususnya dalam konteks War on Terror. Media berperan sebagai perpanjangan wacana politik yang memposisikan dunia Islam sebagai ruang konflik dan

intervensi. Dalam perspektif Hubungan Internasional, proses ini menunjukkan bagaimana media menjadi aktor penting dalam konstruksi persepsi publik dan legitimasi kebijakan luar negeri (Entman, 2004). Islam, dalam hal ini, tidak hanya direpresentasikan sebagai agama, tetapi sebagai identitas politik yang problematis.

Namun demikian, representasi Islam di media Barat tidak bersifat monolitik. Seiring berkembangnya media digital dan meningkatnya kehadiran Muslim di ruang publik Barat, mulai muncul narasi alternatif yang lebih beragam dan kontekstual. Media independen, jurnalisme warga, dan platform digital membuka ruang bagi Muslim untuk merepresentasikan diri mereka sendiri dan menantang narasi dominan yang bias. Meski demikian, warisan historis representasi negatif Islam masih memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi publik Barat hingga saat ini (Ameli et al., 2007).

Dengan demikian, sejarah representasi Islam di media Barat menunjukkan bahwa persepsi terhadap Islam bukanlah refleksi objektif dari realitas, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan dinamika historis. Pemahaman atas sejarah ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dakwah digital dan aktor Muslim kontemporer berupaya membangun kontra-narasi dan merekonstruksi citra Islam di ruang publik global.

4.2 Media Arus Utama, Media Digital, dan Islamophobia

Islamophobia dalam diskursus global kontemporer tidak dapat dilepaskan dari peran

media, baik media arus utama maupun media digital. Media berfungsi sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi publik melalui proses seleksi isu, framing, dan repetisi narasi tertentu. Dalam konteks Islam, media Barat secara historis dan struktural sering kali merepresentasikan Islam melalui lensa ancaman, konflik, dan ekstremisme, yang kemudian berkontribusi pada normalisasi sikap curiga dan diskriminatif terhadap Muslim (Poole, 2002).

Media arus utama Barat seperti surat kabar nasional, televisi berita, dan portal berita besar memiliki posisi strategis dalam membentuk opini publik karena tingkat legitimasi dan jangkauan audiensnya yang luas. Dalam praktiknya, media ini cenderung menampilkan Islam dalam konteks peristiwa negatif, seperti terorisme, konflik Timur Tengah, atau isu keamanan domestik. Pola pemberitaan semacam ini menciptakan agenda-setting effect, di mana Islam diasosiasikan secara konsisten dengan kekerasan dan instabilitas, sementara aspek sosial, kultural, dan spiritual Islam jarang mendapatkan sorotan yang seimbang (Entman, 2004).

Framing media arus utama juga berperan besar dalam memperkuat Islamophobia. Istilah-istilah seperti Islamic terrorism, radical Islam, atau Muslim threat digunakan secara repetitif tanpa diferensiasi yang jelas antara kelompok ekstrem dan mayoritas Muslim. Akibatnya, identitas Islam direduksi menjadi kategori keamanan, bukan identitas keagamaan dan kultural yang beragam. Dalam perspektif konstruktivisme Hubungan Internasional, framing ini membentuk struktur makna yang

memengaruhi bagaimana aktor politik dan masyarakat Barat memahami Islam sebagai the Other yang problematik (Wendt, 1999).

Perkembangan media digital dan media sosial membawa dinamika baru dalam produksi Islamophobia. Di satu sisi, media digital memperluas ruang ekspresi dan memungkinkan munculnya suara alternatif, termasuk narasi Muslim yang menantang stereotip negatif. Namun di sisi lain, media digital juga mempercepat penyebaran Islamophobia melalui mekanisme viralitas, algoritma, dan anonimitas pengguna. Konten yang bersifat provokatif, emosional, dan penuh kebencian terhadap Muslim sering kali memperoleh visibilitas tinggi karena selaras dengan logika engagement platform digital (Gillespie, 2018).

Media digital juga memungkinkan Islamophobia diproduksi tidak hanya oleh institusi media besar, tetapi oleh individu, kelompok ekstrem kanan, dan jaringan transnasional Islamofobik. Narasi kebencian terhadap Islam dapat menyebar dengan cepat lintas negara melalui meme, video pendek, dan disinformasi yang sulit diverifikasi. Dalam konteks ini, Islamophobia tidak lagi sekadar bias media, tetapi menjadi praktik diskursif transnasional yang beroperasi di luar kontrol negara (Allen, 2010).

Perbedaan utama antara media arus utama dan media digital terletak pada struktur kekuasaan dan legitimasi. Media arus utama memiliki otoritas simbolik yang lebih besar dan sering kali memengaruhi kebijakan publik dan wacana politik resmi. Sementara itu, media digital memiliki daya sebar yang lebih cepat dan masif, tetapi cenderung fragmentatif dan sulit dikendalikan. Kedua jenis

media ini saling berkelindan dalam membentuk ekosistem Islamophobia global, di mana narasi dari media arus utama dapat diperkuat dan dimodifikasi melalui media digital (Ameli et al., 2007).

Dalam konteks Hubungan Internasional, Islamophobia yang diproduksi dan direproduksi oleh media memiliki implikasi luas terhadap relasi global. Persepsi negatif terhadap Islam memengaruhi kebijakan imigrasi, keamanan, dan hubungan luar negeri negara-negara Barat dengan dunia Muslim. Islamophobia juga berkontribusi pada marginalisasi komunitas Muslim diaspora dan memperkuat politik identitas eksklusif di tingkat domestik dan internasional (Cesari, 2013).

Dengan demikian, media arus utama dan media digital memainkan peran sentral dalam pembentukan dan penyebaran Islamophobia di era globalisasi informasi. Keduanya tidak hanya mencerminkan prasangka yang sudah ada, tetapi juga secara aktif memproduksi realitas sosial melalui framing, algoritma, dan logika pasar informasi. Pemahaman atas peran media ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dakwah digital dan aktor Muslim berupaya membangun kontra-narasi dan merekonstruksi persepsi Islam yang lebih adil dan humanis di ruang publik global.

4.3 Diskursus Keamanan, Terorisme, dan Islam

Diskursus keamanan global memainkan peran sentral dalam membentuk cara Islam dipersepsikan dalam hubungan internasional kontemporer. Sejak berakhirnya Perang Dingin, fokus utama isu keamanan internasional bergeser dari konflik antarnegara menuju ancaman non-tradisional, seperti terorisme, ekstremisme, dan radikalisme.

Dalam konteks ini, Islam sering kali diposisikan secara problematis sebagai sumber atau justifikasi ancaman keamanan, terutama dalam wacana politik dan media Barat (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Proses ini dapat dipahami melalui konsep sekuritisasi (*securitization*), yaitu praktik diskursif di mana suatu isu dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan respons luar biasa. Melalui narasi politik, pidato elite, dan pemberitaan media, Islam atau lebih tepatnya, ekspresi tertentu yang dikaitkan dengan Islam disekuritisasi dan ditempatkan dalam kerangka darurat keamanan. Akibatnya, Islam tidak lagi dipahami sebagai agama dan identitas kultural, melainkan sebagai kategori risiko dalam kebijakan keamanan nasional dan internasional (Buzan et al., 1998).

Diskursus terorisme menjadi titik sentral dalam proses sekuritisasi Islam. Peristiwa-peristiwa terorisme global, khususnya pasca-11 September 2001, mendorong media dan aktor politik Barat untuk mengaitkan terorisme dengan identitas Islam secara luas. Istilah seperti *Islamic terrorism* dan *jihadist threat* digunakan secara repetitif tanpa pemisahan yang jelas antara ideologi kekerasan kelompok ekstrem dan ajaran Islam sebagai agama. Dalam kerangka ini, terorisme direpresentasikan bukan sebagai fenomena politik dan sosial yang kompleks, melainkan sebagai produk inheren dari Islam itu sendiri (Said, 2001).

Pendekatan keamanan yang berfokus pada Islam juga diperkuat oleh kebijakan *War on Terror*, yang memperluas arena intervensi militer, pengawasan domestik, dan kebijakan imigrasi ketat di negara-negara Barat. Media berperan penting dalam

menormalisasi kebijakan ini dengan mereproduksi narasi ancaman dan ketakutan publik. Dalam perspektif Hubungan Internasional, praktik ini menunjukkan bagaimana diskursus keamanan tidak hanya mencerminkan realitas ancaman, tetapi secara aktif membentuk realitas tersebut melalui wacana dan representasi (Entman, 2004).

Dampak dari diskursus keamanan ini sangat signifikan terhadap persepsi Islam di dunia Barat. Muslim, baik sebagai individu maupun komunitas diaspora, sering kali diposisikan sebagai subjek yang dicurigai dan diawasi. Islam direduksi menjadi identitas keamanan, bukan identitas religius dan kultural yang beragam. Kondisi ini memperkuat Islamophobia struktural dan mempersempit ruang dialog antarbudaya (Cesari, 2013).

Dalam pendekatan konstruktivisme, diskursus keamanan terhadap Islam menunjukkan bahwa ancaman tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan wacana dominan. Ketika Islam secara konsisten direpresentasikan sebagai ancaman dalam media dan kebijakan, persepsi tersebut menjadi bagian dari struktur sosial yang memengaruhi tindakan aktor internasional. Dengan demikian, hubungan antara Islam, terorisme, dan keamanan merupakan hasil konstruksi diskursif, bukan hubungan kausal yang inheren (Wendt, 1999).

Namun demikian, diskursus keamanan bukan satu-satunya narasi yang beroperasi di ruang global. Seiring berkembangnya media digital dan dakwah digital, mulai muncul kontra-narasi yang menantang proses sekuritisasi Islam. Aktor dakwah digital, ulama moderat, dan komunitas Muslim global

berupaya merekonstruksi Islam sebagai agama yang menjunjung perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan universal. Upaya ini menunjukkan bahwa wacana keamanan terhadap Islam bersifat kontestatif dan terbuka untuk dinegosiasikan kembali dalam ruang publik global.

Dengan demikian, diskursus keamanan dan terorisme telah memainkan peran penting dalam membentuk persepsi Islam di dunia Barat. Analisis terhadap diskursus ini menjadi krusial untuk memahami tantangan yang dihadapi dakwah digital Islam dalam membangun citra alternatif dan menggeser representasi Islam dari objek sekuritisasi menuju subjek dialog dan kemanusiaan global.

4.4 Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik Barat

Media sosial telah menjadi salah satu arena paling berpengaruh dalam pembentukan persepsi publik Barat terhadap Islam di era globalisasi digital. Berbeda dengan media arus utama yang bekerja melalui struktur redaksional dan kepentingan institusional, media sosial beroperasi dalam ruang yang lebih terbuka, partisipatif, dan terdesentralisasi. Karakteristik ini menjadikan media sosial sebagai medium yang sangat kuat dalam memproduksi, menyebarkan, dan menegosiasikan makna Islam dalam kesadaran publik Barat.

Dalam konteks komunikasi global, media sosial berfungsi sebagai ruang wacana transnasional, di mana individu, komunitas, dan aktor non-negara dapat berinteraksi secara langsung tanpa perantara negara atau institusi media besar. Persepsi publik terhadap Islam tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh

jurnalisme profesional, melainkan oleh pengalaman digital sehari-hari pengguna melalui unggahan, komentar, video pendek, dan diskusi daring. Proses ini memperlihatkan pergeseran kekuasaan simbolik dari media arus utama menuju jaringan digital yang lebih cair (Castells, 2010).

Media sosial memiliki peran ganda dalam pembentukan persepsi Islam di Barat. Di satu sisi, platform ini sering menjadi sarana reproduksi Islamophobia. Konten yang menampilkan kekerasan, ekstremisme, atau konflik yang dikaitkan dengan Islam cenderung mendapatkan visibilitas tinggi karena sifatnya yang emosional dan kontroversial. Algoritma media sosial memperkuat konten semacam ini melalui mekanisme viralitas dan personalisasi, sehingga memperkuat asosiasi antara Islam dan ancaman keamanan dalam benak audiens Barat (Gillespie, 2018; Sunstein, 2017).

Di sisi lain, media sosial juga membuka ruang bagi narasi alternatif dan kontra-narasi terhadap representasi Islam yang dominan. Muslim di Barat dan di dunia global dapat merepresentasikan diri mereka secara langsung, menampilkan kehidupan sehari-hari, praktik keagamaan yang damai, serta nilai-nilai Islam yang universal. Kehadiran aktor Muslim sebagai subjek aktif, bukan objek pemberitaan, memungkinkan terjadinya humanisasi Islam dan dekonstruksi stereotip yang selama ini diproduksi oleh media arus utama (Poole, 2002).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, peran media sosial dalam membentuk persepsi publik Barat berkaitan erat dengan konsep soft power dan diplomasi publik non-negara. Narasi Islam yang tersebar melalui media sosial dapat memengaruhi

opini publik lintas negara tanpa intervensi negara secara langsung. Individu, influencer, dan komunitas Muslim berperan sebagai aktor diplomasi kultural informal yang membentuk citra Islam melalui interaksi digital sehari-hari (Nye, 2004). Persepsi publik yang terbentuk di ruang digital ini berpotensi memengaruhi sikap politik, kebijakan imigrasi, dan relasi Barat dengan dunia Muslim.

Pendekatan konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana media sosial membentuk persepsi Islam melalui proses interaksi dan wacana. Identitas Islam di ruang digital tidak bersifat tetap, melainkan terus dinegosiasikan melalui narasi, simbol, dan praktik komunikasi. Ketika media sosial dipenuhi oleh narasi yang mengaitkan Islam dengan terorisme, maka identitas Islam dikonstruksi sebagai ancaman. Sebaliknya, ketika narasi damai, dialog lintas iman, dan kemanusiaan Islam memperoleh ruang, persepsi publik pun dapat bergeser ke arah yang lebih inklusif (Wendt, 1999).

Namun demikian, pengaruh media sosial terhadap persepsi publik Barat tidak selalu bersifat progresif. Fragmentasi audiens dan pembentukan echo chambers menyebabkan dialog lintas perspektif sering kali terhambat. Pengguna cenderung mengonsumsi konten yang sejalan dengan pandangan awal mereka, sehingga prasangka terhadap Islam dapat semakin menguat tanpa adanya koreksi atau dialog kritis (Pariser, 2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan medan kontestasi yang tidak simetris, di mana narasi Islam moderat harus bersaing dengan wacana kebencian dan disinformasi.

Dengan demikian, media sosial memainkan peran strategis dan ambivalen dalam pembentukan persepsi publik Barat terhadap Islam. Ia dapat menjadi alat reproduksi Islamophobia sekaligus sarana efektif untuk membangun kontra-narasi dan diplomasi kultural berbasis nilai-nilai Islam. Pemahaman terhadap peran media sosial ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana dakwah digital mampu berkontribusi dalam merekonstruksi citra Islam di ruang publik global dan menantang diskursus keamanan yang selama ini mendominasi relasi Barat-Islam.

4.5 Muslim Diaspora dan Identitas di Ruang Digital

Dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional, Muslim diaspora menjadi aktor sosial yang berada di persimpangan antara identitas keagamaan, kebudayaan asal, dan struktur sosial-politik negara tujuan. Diaspora Muslim di dunia Barat terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara tidak hanya menghadapi tantangan integrasi sosial dan politik, tetapi juga tantangan representasi identitas Islam yang kerap dibingkai secara problematik oleh media arus utama dan diskursus keamanan global (Cesari, 2013; Modood, 2019).

Ruang digital kemudian hadir sebagai arena baru yang memungkinkan Muslim diaspora untuk melakukan re-artikulasi identitas secara lebih otonom. Media sosial, platform berbagi video, dan forum daring membuka peluang bagi individu dan komunitas Muslim diaspora untuk menarasikan pengalaman keislaman mereka di luar kerangka dominan yang sering kali reduktif dan stereotipikal (Bunt, 2018). Dalam konteks ini, ruang digital

berfungsi tidak hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna dan identitas.

Dalam perspektif konstruktivisme sosial, identitas tidak dipahami sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang terus-menerus dinegosiasikan melalui interaksi dan wacana (Wendt, 1999). Identitas Muslim diaspora di ruang digital mencerminkan sifat ini: ia bersifat hibrid, cair, dan kontekstual. Seorang Muslim diaspora dapat secara simultan menampilkan identitas sebagai warga negara Barat, anggota komunitas Muslim global (ummah), dan individu dengan preferensi budaya lokal (Hall, 1990).

Media digital memungkinkan praktik identity performance, di mana individu secara sadar memilih simbol, bahasa, dan narasi tertentu untuk menegaskan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dipersepsikan (Goffman, 1959; Papacharissi, 2011). Misalnya, konten dakwah yang dibuat oleh Muslim diaspora di YouTube atau Instagram sering menggabungkan nilai-nilai Islam dengan bahasa populer, humor, dan isu-isu keseharian masyarakat Barat. Praktik ini menunjukkan bahwa identitas Islam tidak diposisikan sebagai “asing”, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan modern Barat (Bunt, 2018).

Salah satu peran paling signifikan Muslim diaspora di ruang digital adalah sebagai produsen counter-narrative terhadap Islamophobia. Islamophobia tidak hanya beroperasi melalui kebijakan negara dan media arus utama, tetapi juga melalui wacana sehari-hari yang menormalisasi kecurigaan terhadap Muslim (Allen, 2010; Sayyid &

Vakil, 2011). Dalam situasi ini, media sosial menjadi sarana strategis bagi Muslim diaspora untuk menantang representasi negatif tersebut.

Konten-konten digital yang menampilkan kehidupan Muslim sehari-hari, praktik keagamaan yang damai, serta keterlibatan Muslim dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial berfungsi sebagai bentuk *soft resistance* terhadap narasi dominan (Jackson, 2014). Aktivitas ini tidak selalu bersifat politis secara eksplisit, tetapi memiliki dampak politis karena menggeser cara publik Barat memahami Islam dan Muslim.

Dalam terminologi Hubungan Internasional, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *norm contestation*, yaitu upaya aktor non-negara untuk menantang norma dan makna yang telah mapan dalam sistem internasional (Wiener, 2009). Muslim diaspora, melalui aktivitas digital mereka, berperan dalam membentuk ulang norma tentang Islam, kewarganegaraan, dan pluralisme di masyarakat Barat.

Lebih jauh, aktivitas Muslim diaspora di ruang digital dapat dipahami sebagai bentuk diaspora *diplomacy* atau diplomasi berbasis komunitas diaspora. Meskipun tidak mewakili negara secara formal, Muslim diaspora berfungsi sebagai *cultural intermediaries* yang menjembatani pemahaman antara dunia Islam dan masyarakat Barat (Brinkerhoff, 2009). Melalui narasi digital, mereka menyampaikan versi Islam yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi dialog.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *public diplomacy non-negara*, di mana aktor-aktor masyarakat sipil berkontribusi dalam pembentukan

citra dan persepsi lintas negara (Melissen, 2005). Dalam konteks ini, Muslim diaspora tidak hanya menjadi objek persepsi global, tetapi juga subjek aktif yang membentuk persepsi tersebut.

Meskipun ruang digital menawarkan peluang besar, ia juga menghadirkan tantangan serius. Algoritma platform digital sering kali mendorong polarisasi dan visibilitas konten ekstrem, termasuk konten Islamofobik maupun dakwah eksklusif (Tufekci, 2017). Hal ini menciptakan dilema bagi Muslim diaspora: di satu sisi ingin membangun representasi Islam yang moderat dan dialogis, di sisi lain harus berhadapan dengan logika viralitas yang sering tidak sejalan dengan pesan substantif.

Selain itu, Muslim diaspora juga menghadapi tekanan ganda (*double marginalization*): dicurigai sebagai “tidak cukup Barat” oleh masyarakat mayoritas, dan dianggap “tidak cukup Islami” oleh sebagian komunitas Muslim transnasional (Cesari, 2013). Ketegangan ini tercermin dalam debat internal di ruang digital mengenai otoritas keagamaan, praktik keislaman, dan loyalitas identitas.

Secara keseluruhan, keberadaan Muslim diaspora di ruang digital memiliki implikasi signifikan terhadap pembentukan persepsi Islam di dunia Barat. Alih-alih dipersepsikan semata sebagai ancaman keamanan atau identitas asing, Islam mulai tampil sebagai identitas yang plural, dinamis, dan kompatibel dengan nilai-nilai kewargaan modern. Proses ini memang tidak linear dan penuh kontestasi, tetapi menunjukkan bahwa persepsi internasional terhadap Islam bukan sesuatu yang beku, melainkan dapat dinegosiasikan melalui praktik sosial dan komunikasi digital.

Dengan demikian, Muslim diaspora di ruang digital dapat diposisikan sebagai aktor penting dalam studi Hubungan Internasional kontemporer khususnya dalam kajian identitas, persepsi, dan soft power berbasis budaya dan agama. Mereka bukan sekadar objek dari struktur global, melainkan agen aktif dalam membentuk makna Islam di tingkat internasional.

BAB V
DAMPAK
DIGITALISASI
DAKWAH
TERHADAP
PERSEPSI ISLAM DI
DUNIA BARAT

5.1 Dakwah Digital sebagai Counter-Narrative Islamophobia

Islamophobia dalam diskursus global tidak muncul secara alamiah, melainkan merupakan konstruksi sosial dan politik yang dibentuk melalui narasi historis, media massa, dan wacana keamanan internasional. Dalam banyak konteks di dunia Barat, Islam sering direpresentasikan sebagai identitas yang identik dengan kekerasan, ekstremisme, dan ketidakselarasan dengan nilai-nilai demokrasi liberal (Said, 1978; Allen, 2010; Cesari, 2013). Representasi ini kemudian direproduksi secara masif melalui media arus utama dan diskursus politik pasca-peristiwa 11 September 2001, sehingga membentuk persepsi publik yang cenderung homogen dan negatif terhadap Islam dan Muslim.

Dalam situasi tersebut, dakwah digital muncul sebagai ruang alternatif yang memungkinkan produksi counter-narrative terhadap Islamophobia. Berbeda dengan media arus utama yang cenderung elitis dan terstruktur secara institusional, ruang digital bersifat terbuka, partisipatif, dan relatif terdesentralisasi. Hal ini memberikan peluang bagi aktor non-negara seperti dai independen, influencer Muslim, komunitas diaspora, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan narasi Islam dari perspektif internal dan pengalaman lived Islam (Bunt, 2018).

Secara teoritis, dakwah digital dapat dipahami sebagai praktik diskursif, yakni aktivitas produksi dan penyebaran makna melalui bahasa, simbol, dan representasi (Foucault, 1972). Dalam konteks

Islamophobia, dakwah digital tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ajaran normatif Islam, tetapi juga sebagai upaya merebut ruang wacana yang selama ini didominasi oleh narasi securitization Islam (Waever, 1995; Jackson, 2014).

Melalui platform digital, pesan dakwah sering dikemas dalam bentuk narasi personal, testimoni, dialog lintas agama, hingga konten edukatif berbasis keseharian. Pendekatan ini secara tidak langsung menantang logika Islamophobia yang cenderung menggeneralisasi dan mendepersonalisasi Muslim sebagai "the Other". Dengan menampilkan wajah Islam yang manusiawi, beragam, dan kontekstual, dakwah digital berkontribusi pada proses de-securitization Islam dalam persepsi publik Barat (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).

Konsep counter-narrative merujuk pada narasi alternatif yang secara sadar dikonstruksi untuk menantang, mengganggu, atau menggantikan narasi dominan (Bamberg & Andrews, 2004). Dalam konteks ini, dakwah digital berperan sebagai sarana strategis untuk mendekonstruksi makna Islam yang selama ini dilekatkan oleh wacana Islamophobia. Alih-alih Islam sebagai ancaman, dakwah digital menampilkan Islam sebagai sumber nilai etika, keadilan sosial, dan solidaritas kemanusiaan.

Dalam perspektif konstruktivisme Hubungan Internasional, praktik ini menunjukkan bahwa identitas dan kepentingan aktor global tidak bersifat given, melainkan dibentuk melalui interaksi dan wacana (Wendt, 1999). Dakwah digital menjadi arena di mana makna Islam diproduksi dan dinegosiasikan ulang, baik oleh Muslim sendiri maupun oleh audiens non-Muslim yang terpapar konten tersebut.

Dari sudut pandang Hubungan Internasional, dakwah digital juga dapat dianalisis sebagai bentuk soft power non-negara. Nye (2004) menjelaskan bahwa soft power bekerja melalui daya tarik nilai, budaya, dan ide, bukan melalui paksaan atau kekuatan material. Dakwah digital, ketika menampilkan Islam secara inklusif dan dialogis, memiliki potensi untuk membangun daya tarik kultural yang memengaruhi persepsi masyarakat internasional terhadap Islam.

Berbeda dengan diplomasi negara yang sering terikat kepentingan politik formal, dakwah digital bersifat lebih organik dan berbasis komunitas. Justru karena sifat non-resmi inilah, dakwah digital sering dipersepsikan lebih autentik oleh audiens Barat (Melissen, 2005). Dalam konteks ini, dakwah digital berfungsi sebagai bentuk public diplomacy from below, di mana individu dan komunitas Muslim menjadi aktor diplomasi kultural tanpa mandat negara.

Meskipun memiliki potensi besar, efektivitas dakwah digital sebagai counter-narrative Islamophobia tidak bersifat otomatis. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang bersifat emosional dan polarizing, sehingga pesan dakwah moderat sering kalah viral dibandingkan narasi ekstrem, baik dari kelompok Islamofobik maupun kelompok keagamaan eksklusif (Tufekci, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan arena netral, melainkan medan kontestasi yang sarat kepentingan ekonomi dan politik platform.

Selain itu, audiens dakwah digital sering kali terbatas pada kelompok yang sudah memiliki

predisposisi positif terhadap Islam. Tantangan utama dakwah digital sebagai counter-narrative adalah menembus echo chambers dan menjangkau publik non-Muslim yang selama ini menjadi target utama Islamophobia (Sunstein, 2017). Oleh karena itu, efektivitas dakwah digital sangat bergantung pada strategi komunikasi, bahasa yang digunakan, serta kemampuan aktor dakwah untuk membangun dialog lintas identitas.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa Islamophobia bukan fenomena yang statis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat ditantang melalui produksi wacana alternatif. Dakwah digital menunjukkan bagaimana aktor non-negara dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi global, sejalan dengan perkembangan kajian Hubungan Internasional kontemporer yang semakin menaruh perhatian pada aktor non-tradisional.

Secara praktis, dakwah digital sebagai counter-narrative Islamophobia menuntut pendekatan yang reflektif dan strategis. Dakwah tidak cukup hanya benar secara teologis, tetapi juga harus komunikatif secara kultural dan sensitif terhadap konteks audiens global. Dengan demikian, dakwah digital berpotensi menjadi instrumen penting dalam membangun pemahaman lintas peradaban dan mereduksi ketegangan berbasis identitas agama di tingkat internasional.

5.2 Perubahan Pola Pemahaman Islam di Kalangan Audiens Barat

Perkembangan dakwah digital dalam dua dekade terakhir telah berkontribusi pada perubahan

bertahap dalam pola pemahaman Islam di kalangan audiens Barat. Jika pada periode awal pasca-Perang Dingin Islam lebih sering dipahami melalui kerangka konflik, keamanan, dan ancaman ideologis, maka dalam konteks digital kontemporer muncul spektrum pemaknaan yang lebih beragam dan benuansa (Said, 1978; Cesari, 2013). Perubahan ini tidak berarti Islamophobia sepenuhnya hilang, tetapi menunjukkan adanya dinamika baru dalam cara Islam dipersepsikan, dinegosiasikan, dan dipahami oleh publik Barat.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah bergesernya pemahaman Islam dari narasi monolitik menuju pemahaman yang lebih plural dan kontekstual. Media arus utama sebelumnya cenderung menampilkan Islam sebagai entitas tunggal yang homogen, sering kali dikaitkan dengan kekerasan atau ketertinggalan sosial (Poole, 2002). Dakwah digital, sebaliknya, memperlihatkan keragaman ekspresi Islam mulai dari praktik keagamaan sehari-hari, etika sosial, hingga peran Muslim dalam isu-isu kemanusiaan global (Bunt, 2018).

Paparan terhadap konten digital yang menampilkan pengalaman lived Islam memungkinkan audiens Barat untuk melihat Muslim sebagai individu dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang beragam. Proses ini berkontribusi pada dekonstruksi stereotip lama dan membuka ruang bagi pemahaman Islam sebagai tradisi religius yang kompleks dan dinamis (Hall, 1997).

Berbeda dengan media konvensional yang bersifat satu arah, ruang digital menawarkan

interaktivitas yang tinggi. Audiens Barat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan aktor dakwah melalui kolom komentar, diskusi daring, atau forum lintas agama. Interaksi ini memiliki implikasi penting terhadap perubahan persepsi, karena pemahaman dibangun melalui dialog, bukan sekadar paparan informasi (Habermas, 1984; Papacharissi, 2011).

Melalui dialog digital, pertanyaan-pertanyaan kritis tentang Islam yang sebelumnya jarang terakomodasi dalam ruang publik formal dapat dijawab secara langsung dan kontekstual. Hal ini membantu mengurangi jarak simbolik antara “Islam” dan “Barat” yang selama ini dibingkai sebagai entitas yang saling bertentangan (Huntington, 1996).

Perubahan lain yang penting adalah proses normalisasi Islam dalam kehidupan sehari-hari audiens Barat. Konten dakwah digital yang membahas isu-isu seperti keluarga, etika kerja, kesehatan mental, atau keadilan sosial dengan perspektif Islam menunjukkan bahwa Islam tidak selalu hadir sebagai isu geopolitik atau keamanan, melainkan sebagai sumber nilai moral yang relevan dengan kehidupan modern (Roy, 2004; Mandaville, 2014).

Normalisasi ini berperan dalam menggeser Islam dari kategori “isu luar biasa” (exceptional issue) menuju “realitas sosial biasa”. Dalam terminologi teori securitization, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk de-securitization, di mana Islam tidak lagi dipersepsikan terutama sebagai ancaman eksistensial (Buzan et al., 1998).

Muslim diaspora dan influencer digital memainkan peran sentral dalam perubahan pola

pemahaman Islam di kalangan audiens Barat. Dengan latar belakang sosial yang dekat dengan masyarakat Barat, mereka mampu menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bahasa budaya lokal tanpa kehilangan substansi normatifnya (Cesari, 2013; Brinkerhoff, 2009). Kredibilitas mereka sering kali tidak bersumber dari otoritas keagamaan formal, melainkan dari autentisitas pengalaman dan konsistensi narasi.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, fenomena ini menunjukkan pergeseran sumber legitimasi dari aktor negara dan institusi resmi menuju aktor non-negara berbasis komunitas. Audiens Barat cenderung lebih reseptif terhadap narasi Islam yang disampaikan oleh figur yang mereka anggap “relatable” dibandingkan oleh institusi abstrak atau wacana politik resmi (Nye, 2004).

Meskipun terjadi perubahan pola pemahaman, proses ini tidak berlangsung secara linear dan tanpa resistensi. Sebagian audiens Barat tetap terjebak dalam confirmation bias dan echo chambers digital yang memperkuat pandangan Islamofobik (Sunstein, 2017). Selain itu, peristiwa kekerasan yang melibatkan aktor yang mengklaim identitas Islam sering kali memicu kembalinya narasi lama, menunjukkan rapuhnya perubahan persepsi yang telah dibangun.

Hal ini menegaskan bahwa perubahan pemahaman Islam bukan sekadar persoalan ketersediaan informasi, melainkan juga terkait dengan struktur kekuasaan, emosi kolektif, dan dinamika politik domestik di negara-negara Barat (Jackson, 2014). Dakwah digital beroperasi dalam

konteks ini sebagai kekuatan korektif, tetapi bukan penentu tunggal.

Perubahan pola pemahaman Islam di kalangan audiens Barat memiliki implikasi strategis bagi Hubungan Internasional. Persepsi publik yang lebih inklusif terhadap Islam dapat memengaruhi iklim politik domestik, yang pada gilirannya berdampak pada kebijakan luar negeri, integrasi imigran, dan kerja sama lintas budaya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengurangi politik ketakutan (*politics of fear*) yang sering mengeksploitasi isu Islam dalam arena internasional (Mandaville & Hamid, 2018).

Dengan demikian, dakwah digital tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berkontribusi pada pembentukan tatanan internasional yang lebih dialogis. Perubahan pemahaman Islam di kalangan audiens Barat menunjukkan bahwa identitas keagamaan dapat menjadi sumber jembatan antarperadaban, bukan semata sumber konflik, apabila dikelola melalui komunikasi yang inklusif dan reflektif.

5.3 Dakwah Digital, Dialog Antarbudaya, dan Toleransi

Dalam konteks masyarakat global yang semakin plural dan saling terhubung, dialog antarbudaya menjadi prasyarat penting bagi terciptanya koeksistensi damai. Ketegangan berbasis identitas termasuk identitas keagamaan sering kali dipicu bukan oleh perbedaan itu sendiri, melainkan oleh absennya ruang dialog yang setara dan saling memahami. Dalam kerangka ini, dakwah digital memiliki potensi strategis sebagai medium yang

menjembatani perbedaan, sekaligus mempromosikan nilai toleransi lintas budaya dan agama di tingkat global (UNESCO, 2013).

Secara tradisional, dakwah sering dipahami sebagai proses penyampaian ajaran Islam dari dai kepada audiens secara satu arah. Namun, transformasi digital menggeser pola ini menuju model komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Media sosial dan platform digital memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan antara Muslim dan non-Muslim secara langsung, menjadikan dakwah sebagai ruang interaksi budaya, bukan hanya transmisi doktrin keagamaan (Bunt, 2018).

Dalam perspektif teori komunikasi antarbudaya, dialog yang efektif mensyaratkan keterbukaan, empati, dan pengakuan terhadap perbedaan (Gudykunst, 2003). Dakwah digital yang mengadopsi pendekatan ini tidak bertujuan untuk memenangkan perdebatan teologis, melainkan membangun pemahaman bersama. Pendekatan semacam ini berkontribusi pada terbentuknya toleransi sebagai sikap sosial, bukan sekadar slogan normatif.

Salah satu tantangan utama dalam hubungan Islam-Barat adalah polarisasi identitas yang membingkai perbedaan sebagai pertentangan eksistensial. Diskursus “kita versus mereka” sering diperkuat oleh narasi politik dan media yang menyederhanakan realitas sosial yang kompleks (Hall, 1997; Jackson, 2014). Dakwah digital, ketika dijalankan secara reflektif, berpotensi mendekonstruksi polarisasi ini dengan menampilkan Islam sebagai bagian dari mosaik budaya global, bukan entitas yang terpisah.

Konten dakwah yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial memperlihatkan titik temu antara Islam dan nilai-nilai kemanusiaan global. Hal ini sejalan dengan gagasan *dialogical identity*, di mana identitas dibentuk melalui interaksi dan pengakuan timbal balik, bukan melalui isolasi atau eksklusivitas (Taylor, 1994).

Toleransi dalam konteks digital tidak cukup dipahami sebagai sikap pasif “membiarkan perbedaan”. Ia merupakan praktik sosial aktif yang diwujudkan melalui cara berkomunikasi, merespons perbedaan pendapat, dan mengelola konflik simbolik di ruang publik daring (Walzer, 1997). Dakwah digital yang mempromosikan etika dialog, adab berdiskusi, dan penghormatan terhadap keyakinan lain berkontribusi pada pembentukan budaya digital yang lebih toleran.

Dalam konteks ini, dakwah digital juga berfungsi sebagai sarana pendidikan publik tentang literasi agama dan literasi media. Dengan membantu audiens membedakan antara ajaran Islam normatif dan representasi ekstrem atau politis, dakwah digital memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ujaran kebencian dan misinformasi berbasis agama (Wardle & Derakhshan, 2017).

Salah satu perkembangan penting dalam dakwah digital adalah meningkatnya praktik dialog lintas iman di ruang daring. Diskusi antara Muslim, Kristen, Yahudi, dan pemeluk agama lain yang disiarkan melalui platform digital menunjukkan bahwa perbedaan teologis tidak harus berujung pada konflik. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi

sumber pembelajaran dan refleksi bersama (Knitter, 2002).

Dalam kajian Hubungan Internasional, dialog lintas iman ini dapat dipahami sebagai bentuk *track-two diplomacy*, yakni diplomasi non-formal yang dilakukan oleh aktor masyarakat sipil untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan lintas kelompok (Montville, 1991). Dakwah digital yang terlibat dalam dialog lintas iman berkontribusi pada penciptaan iklim internasional yang lebih kondusif bagi perdamaian dan toleransi.

Meskipun memiliki potensi besar, dakwah digital juga menghadapi tantangan struktural. Logika algoritma media sosial sering kali mendorong polarisasi dan memperkuat konten yang bersifat provokatif, sehingga dialog yang bernuansa moderat kurang mendapat visibilitas (Tufekci, 2017). Selain itu, sebagian praktik dakwah digital justru mereproduksi eksklusivisme dan klaim kebenaran tunggal yang dapat memperlebar jurang antaridentitas.

Tantangan ini menunjukkan bahwa dakwah digital tidak otomatis menghasilkan toleransi. Ia membutuhkan kesadaran etis, kompetensi komunikasi antarbudaya, dan pemahaman konteks sosial audiens global. Tanpa pendekatan tersebut, dakwah digital berisiko memperkuat fragmentasi identitas alih-alih membangun dialog.

Secara normatif, temuan ini menegaskan bahwa dakwah digital memiliki tanggung jawab sosial yang melampaui tujuan internal komunitas Muslim. Dalam dunia yang saling terhubung, pesan keagamaan memiliki dampak lintas batas yang

memengaruhi hubungan antarbudaya dan antarbangsa. Oleh karena itu, dakwah digital yang dialogis dan toleran dapat diposisikan sebagai kontribusi nyata Islam terhadap perdamaian global dan koeksistensi plural (Mandaville & Hamid, 2018).

Bagi studi Hubungan Internasional, fenomena ini memperkaya pemahaman tentang peran agama sebagai sumber norma dan praktik sosial yang membentuk tatanan global. Dakwah digital menunjukkan bahwa agama tidak selalu menjadi sumber konflik internasional, tetapi juga dapat menjadi medium dialog, rekonsiliasi, dan pembentukan norma toleransi di ruang global.

5.4 Tantangan Distorsi, Radikalisasi, dan Politisasi Agama

Meskipun dakwah digital memiliki potensi besar sebagai sarana counter-narrative Islamophobia dan promosi dialog antarbudaya, ia juga menghadapi tantangan serius berupa distorsi pesan keagamaan, radikalisasi, dan politisasi agama. Ruang digital bukanlah arena yang netral; ia dibentuk oleh logika algoritmik, kepentingan ekonomi platform, serta dinamika politik global yang kompleks. Oleh karena itu, dakwah digital harus dipahami sebagai praktik yang berlangsung dalam medan kontestasi wacana, di mana makna Islam dapat diproduksi secara konstruktif maupun diselewengkan (Bunt, 2018).

Distorsi pesan keagamaan merupakan salah satu tantangan utama dakwah digital. Sifat media digital yang menuntut kecepatan, kesederhanaan pesan, dan daya tarik visual sering kali mendorong reduksi ajaran Islam yang kompleks menjadi slogan singkat atau potongan ayat yang terlepas dari konteks

historis dan teologisnya (Roy, 2017). Proses ini berisiko menghasilkan pemahaman parsial yang dapat disalahartikan oleh audiens global, khususnya mereka yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan Islam yang memadai.

Dalam perspektif teori komunikasi, distorsi ini berkaitan dengan fenomena context collapse, di mana pesan yang ditujukan untuk audiens tertentu justru dikonsumsi oleh audiens yang sangat beragam dengan kerangka referensi berbeda (Marwick & boyd, 2011). Akibatnya, dakwah digital yang tidak sensitif terhadap konteks audiens berpotensi memperkuat kesalahpahaman tentang Islam, alih-alih meluruskannya.

Tantangan berikutnya adalah penggunaan ruang digital sebagai sarana radikalisme keagamaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kelompok ekstrem memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ideologi eksklusif, membangun identitas “kami versus mereka”, dan merekrut simpatisan lintas negara (Conway, 2017; Neumann, 2013). Dalam konteks ini, dakwah digital dapat disalahgunakan sebagai legitimasi religius bagi kekerasan dan intoleransi.

Radikalisme digital sering kali tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan narasi ketertindasan, glorifikasi identitas korban, dan delegitimasi kelompok lain. Logika algoritma media sosial yang memprioritaskan konten emosional mempercepat proses ini dengan menciptakan echo chambers yang memperkuat pandangan ekstrem (Sunstein, 2017; Tufekci, 2017).

Dalam kajian Hubungan Internasional, fenomena ini menunjukkan bagaimana aktor non-negara

memanfaatkan ruang digital untuk memproduksi ancaman transnasional, sekaligus menantang batas-batas tradisional kedaulatan negara (Mandaville, 2014). Oleh karena itu, radikalisme digital bukan sekadar isu keagamaan, tetapi juga persoalan keamanan internasional dan stabilitas global.

Selain radikalisme, politisasi agama menjadi tantangan serius dalam dakwah digital. Agama sering kali dijadikan instrumen legitimasi politik oleh aktor negara maupun non-negara, baik untuk mobilisasi massa, delegitimasi lawan politik, maupun pembentukan identitas nasional eksklusif (Fox, 2018). Dalam ruang digital, politisasi ini semakin intens karena pesan keagamaan dapat disebarkan secara cepat dan masif tanpa mekanisme verifikasi yang memadai.

Politikasi dakwah digital berisiko mengaburkan batas antara pesan keagamaan normatif dan agenda politik pragmatis. Akibatnya, Islam direduksi menjadi identitas ideologis yang kaku dan konfrontatif, yang pada gilirannya memperkuat persepsi negatif di mata audiens global. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana agama dapat kehilangan dimensi etik dan spiritualnya ketika sepenuhnya ditarik ke dalam logika kekuasaan (Asad, 2003).

Ruang digital juga memunculkan dilema otoritas keagamaan. Siapa pun dapat berbicara atas nama Islam, terlepas dari kompetensi keilmuan atau legitimasi sosialnya. Fragmentasi otoritas ini membuka ruang bagi interpretasi yang ekstrem, simplistik, atau manipulatif (Eickelman & Anderson, 2003). Bagi audiens Barat, kondisi ini semakin mempersulit proses memahami Islam secara utuh,

karena mereka dihadapkan pada beragam narasi yang saling bertentangan.

Dalam perspektif konstruktivisme, fragmentasi ini menunjukkan bahwa identitas Islam di ruang digital merupakan hasil negosiasi yang terus-menerus dan sering kali konfliktual. Tanpa kerangka etika dan literasi digital yang kuat, kontestasi narasi ini dapat bergeser dari dialog produktif menuju konflik simbolik yang destruktif (Wendt, 1999).

Tantangan distorsi, radikalisasi, dan politisasi agama menegaskan bahwa dakwah digital tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis dan intelektual. Dakwah yang efektif di ruang digital bukan hanya soal jangkauan dan viralitas, tetapi juga soal kedalaman pesan, kepekaan konteks, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Tanpa refleksi kritis, dakwah digital berisiko menjadi bagian dari masalah yang ingin ia selesaikan.

Secara praktis, hal ini menuntut peningkatan literasi keagamaan dan literasi digital bagi para aktor dakwah, serta penguatan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan komunitas Muslim diaspora. Secara teoretis, fenomena ini memperkaya kajian Hubungan Internasional dengan menunjukkan bagaimana agama, teknologi, dan politik saling berkelindan dalam membentuk dinamika global kontemporer.

5.5 Evaluasi Efektivitas Dakwah Digital dalam Skala Global

Evaluasi terhadap efektivitas dakwah digital dalam skala global perlu dilakukan secara hati-hati dan multidimensional. Efektivitas dalam konteks ini tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator

kuantitatif seperti jumlah pengikut, tingkat viralitas, atau jangkauan geografis konten. Sebaliknya, efektivitas dakwah digital harus dipahami sebagai kemampuan jangka menengah dan panjang dalam memengaruhi persepsi, membentuk pemahaman, serta mendorong relasi yang lebih dialogis antara Islam dan masyarakat global, khususnya audiens Barat (Nye, 2004; Mandaville, 2014).

Pendekatan evaluatif ini sejalan dengan kajian Hubungan Internasional kontemporer yang menekankan pentingnya ideational power kekuatan gagasan dan makna dibandingkan sekadar kekuatan material atau koersif (Wendt, 1999). Dalam kerangka tersebut, dakwah digital bekerja pada ranah simbolik dan kultural, sehingga dampaknya sering kali bersifat tidak langsung, bertahap, dan sulit diukur secara instan.

Secara analitis, efektivitas dakwah digital dapat dievaluasi melalui tiga indikator utama: jangkauan (reach), resonansi makna (resonance), dan transformasi persepsi (perceptual change). Jangkauan merujuk pada kemampuan dakwah digital menembus batas geografis dan kultural, menjangkau audiens lintas negara dan lintas latar belakang agama. Dalam aspek ini, dakwah digital terbukti efektif karena sifat internet yang transnasional dan relatif bebas dari kontrol negara (Bunt, 2018).

Namun, jangkauan yang luas tidak selalu berbanding lurus dengan resonansi makna. Resonansi mengacu pada sejauh mana pesan dakwah dipahami, diterima, dan dianggap relevan oleh audiens global. Studi tentang komunikasi lintas budaya menunjukkan bahwa pesan keagamaan yang

dikemas secara kontekstual, dialogis, dan sensitif terhadap nilai lokal cenderung memiliki resonansi lebih kuat dibandingkan pesan yang bersifat normatif dan eksklusif (Gudykunst, 2003; Papacharissi, 2011).

Transformasi persepsi merupakan indikator paling kompleks sekaligus paling penting. Efektivitas dakwah digital dalam skala global dapat dikatakan tinggi apabila ia berkontribusi pada perubahan cara pandang audiens non-Muslim terhadap Islam dari persepsi monolitik dan securitized menuju pemahaman yang lebih plural, humanis, dan kontekstual (Cesari, 2013; Jackson, 2014). Perubahan ini biasanya bersifat gradual dan tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi memiliki implikasi jangka panjang terhadap relasi antarbudaya dan politik identitas.

Dalam perspektif soft power, dakwah digital menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif signifikan sebagai instrumen non-negara. Nye (2004) menekankan bahwa soft power bekerja melalui daya tarik nilai dan legitimasi moral, bukan melalui paksaan. Dakwah digital yang menampilkan Islam sebagai sumber nilai etika, keadilan sosial, dan kepedulian kemanusiaan memiliki potensi untuk membangun daya tarik kultural yang melampaui batas ideologis dan politik.

Namun, berbeda dengan soft power negara yang sering terkoordinasi secara strategis, dakwah digital bersifat terfragmentasi dan sangat bergantung pada individu atau komunitas. Fragmentasi ini membuat dampak dakwah digital bersifat tidak merata: di satu sisi sangat efektif dalam komunitas tertentu, di sisi lain nyaris tidak menjangkau audiens yang berada di

luar interest bubble mereka (Sunstein, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dakwah digital sangat kontekstual dan bergantung pada ekosistem media tempat ia beroperasi.

Evaluasi efektivitas juga harus mempertimbangkan hambatan struktural yang membatasi dampak dakwah digital. Salah satu hambatan utama adalah algoritma platform digital yang cenderung memprioritaskan konten sensasional dan polarizing dibandingkan konten reflektif dan edukatif (Tufekci, 2017). Akibatnya, pesan dakwah yang moderat dan dialogis sering kalah visibilitas dibandingkan narasi ekstrem, baik yang bersifat Islamofobik maupun yang mengatasnamakan agama secara eksklusif.

Selain itu, konteks politik domestik di negara-negara Barat turut memengaruhi efektivitas dakwah digital. Dalam situasi meningkatnya populisme kanan dan politik identitas, narasi keagamaan termasuk dakwah digital sering kali disaring melalui kaca mata kecurigaan dan keamanan (Mudde, 2019). Kondisi ini membatasi sejauh mana dakwah digital dapat mengubah persepsi publik secara luas, meskipun ia efektif di tingkat individu atau komunitas kecil.

Temuan utama dari evaluasi ini adalah bahwa efektivitas dakwah digital bersifat relatif, bukan absolut. Dakwah digital tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal terhadap Islamophobia atau kesalahpahaman global tentang Islam. Namun, ia berfungsi sebagai salah satu mekanisme penting dalam ekosistem komunikasi global yang lebih luas, berdampingan dengan media arus utama, pendidikan formal, dan kebijakan publik.

Dalam terminologi Hubungan Internasional, dakwah digital dapat dipahami sebagai normative entrepreneur, yakni aktor yang berupaya memperkenalkan dan menyebarkan norma alternatif dalam sistem internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Keberhasilan peran ini tidak ditentukan oleh kemenangan cepat, melainkan oleh konsistensi, kredibilitas, dan kemampuan membangun jaringan makna lintas budaya.

Evaluasi efektivitas dakwah digital dalam skala global menunjukkan perlunya pergeseran orientasi dari sekadar ekspansi jangkauan menuju pendalaman kualitas pesan. Dakwah digital yang efektif bukan yang paling viral, tetapi yang mampu membangun pemahaman lintas identitas secara berkelanjutan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas aktor dakwah dalam literasi digital, komunikasi antarbudaya, dan refleksi etis terhadap dampak pesan yang disampaikan.

Secara akademik, evaluasi ini memperkaya kajian lintas disiplin antara studi Islam, komunikasi, dan Hubungan Internasional dengan menunjukkan bagaimana agama beroperasi sebagai kekuatan ideasional di era digital. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi dakwah digital yang lebih sadar konteks global dan bertanggung jawab secara sosial.

BAB VI
DIGITALISASI
DAKWAH DALAM
KONTEKS
HUBUNGAN
INTERNASIONAL

6.1 Agama sebagai Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional

Dalam perkembangan kajian Hubungan Internasional kontemporer, agama semakin diakui sebagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas signifikan dalam membentuk dinamika global. Pandangan klasik yang menempatkan agama sebagai urusan privat atau sekadar variabel domestik kini dinilai tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas politik dan sosial internasional. Globalisasi, migrasi transnasional, serta revolusi komunikasi digital telah mendorong agama termasuk Islam keluar dari batas-batas negara dan menjadikannya kekuatan lintas wilayah yang beroperasi di ruang publik global (Thomas, 2005; Mandaville, 2014).

Sebagai aktor non-negara, agama tidak berfungsi melalui instrumen koersif seperti militer atau sanksi ekonomi, melainkan melalui produksi nilai, norma, identitas, dan makna. Dalam konteks ini, pengaruh agama lebih dekat dengan ranah ideational power dibandingkan material power (Wendt, 1999). Agama membentuk cara aktor memahami dunia, menginterpretasikan konflik, serta menentukan apa yang dianggap sah, adil, dan bermakna dalam hubungan internasional.

Agama berperan penting dalam pembentukan identitas kolektif yang melampaui batas negara. Identitas keagamaan sering kali bersifat transnasional, menghubungkan individu dan komunitas lintas budaya dan kewarganegaraan. Dalam kasus Islam, konsep ummah menciptakan rasa keterikatan global yang tidak sepenuhnya tunduk pada struktur negara-bangsa modern (Roy,

2004). Ikatan ini memungkinkan agama berfungsi sebagai sumber solidaritas, mobilisasi sosial, dan legitimasi normatif dalam berbagai isu internasional.

Dalam perspektif konstruktivisme, identitas keagamaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang *given*, melainkan dibentuk dan direproduksi melalui interaksi sosial dan wacana (Wendt, 1999). Dakwah digital, dialog lintas iman, dan praktik keagamaan di ruang global menjadi mekanisme utama melalui mana identitas Islam dinegosiasikan dan diproyeksikan dalam sistem internasional.

Era digital memperkuat posisi agama sebagai aktor non-negara dengan menyediakan infrastruktur komunikasi yang murah, cepat, dan transnasional. Platform digital memungkinkan individu, komunitas, dan otoritas keagamaan non-formal untuk beroperasi secara global tanpa bergantung pada negara atau institusi internasional resmi (Bunt, 2018). Dalam konteks ini, agama tidak hanya diartikulasikan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh aktor akar rumput (*grassroots actors*) yang memiliki jangkauan internasional.

Fenomena ini menantang asumsi realis yang memandang negara sebagai satu-satunya aktor rasional dalam sistem internasional. Sebaliknya, ia menguatkan argumen bahwa aktor non-negara berbasis identitas dan norma termasuk agama memiliki kapasitas nyata untuk memengaruhi persepsi publik, hubungan antar masyarakat, dan bahkan kebijakan luar negeri secara tidak langsung (Keohane & Nye, 1977).

Dalam kerangka *soft power*, agama berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dan daya tarik kultural. Nilai-nilai keagamaan seperti keadilan,

perdamaian, solidaritas, dan martabat manusia dapat menjadi fondasi normatif yang memengaruhi sikap dan preferensi aktor lain tanpa paksaan (Nye, 2004). Dakwah digital Islam yang menekankan nilai-nilai universal menunjukkan bagaimana agama dapat beroperasi sebagai soft power non-negara dalam membentuk citra dan persepsi global.

Namun, soft power agama bersifat ambivalen. Ia dapat digunakan untuk membangun dialog dan toleransi, tetapi juga dapat dimanipulasi untuk membenarkan eksklusivisme dan konflik. Oleh karena itu, efektivitas dan legitimasi agama sebagai aktor non-negara sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut dikomunikasikan dan dipraktikkan dalam ruang publik global (Fox, 2018).

Pengakuan terhadap agama sebagai aktor non-negara memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori dan praktik Hubungan Internasional. Pertama, ia menuntut perluasan unit analisis, dari negara dan institusi internasional menuju aktor berbasis identitas dan norma. Kedua, ia menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi agama, sosiologi, dan komunikasi dalam analisis politik global.

Dalam konteks penelitian ini, dakwah digital Islam menunjukkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai aktor non-negara yang aktif, adaptif, dan transformatif di era digital. Islam tidak hanya hadir sebagai objek persepsi global, tetapi juga sebagai subjek yang berkontribusi dalam pembentukan norma, dialog antarbudaya, dan dinamika soft power internasional.

Dengan demikian, agama khususnya Islam dapat dipahami sebagai aktor non-negara yang beroperasi

melalui jaringan makna, nilai, dan komunikasi transnasional. Keberadaannya dalam Hubungan Internasional tidak bersifat marginal, melainkan integral dalam memahami dinamika global kontemporer. Dakwah digital menjadi salah satu medium utama yang memperlihatkan bagaimana agama beradaptasi dengan struktur global modern, sekaligus berperan dalam membentuk tatanan internasional yang lebih dialogis dan reflektif.

6.2 Dakwah Digital dan Diplomasi Publik Islam

Dalam kajian Hubungan Internasional, diplomasi publik dipahami sebagai upaya membangun hubungan dan memengaruhi persepsi publik asing melalui komunikasi, nilai, dan interaksi budaya, bukan semata-mata melalui negosiasi antarpemerintah (Melissen, 2005). Perkembangan teknologi digital telah memperluas praktik diplomasi publik melampaui negara, membuka ruang bagi aktor non-negara termasuk komunitas keagamaan untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan citra dan makna di tingkat global. Dalam konteks ini, dakwah digital Islam dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi publik berbasis agama yang beroperasi secara non-formal dan transnasional.

Dakwah digital tidak dirancang sebagai instrumen diplomasi negara, namun dalam praktiknya ia memiliki efek diplomatik yang nyata. Melalui produksi narasi, simbol, dan interaksi di ruang digital global, dakwah digital berkontribusi pada pembentukan persepsi internasional tentang Islam, Muslim, dan nilai-nilai yang mereka representasikan (Bunt, 2018; Mandaville, 2014). Dengan demikian, dakwah digital menempati posisi

strategis sebagai public diplomacy from below diplomasi publik yang digerakkan oleh masyarakat sipil dan komunitas berbasis identitas.

Berbeda dengan diplomasi publik negara yang terkoordinasi dan berorientasi kepentingan nasional, dakwah digital bersifat terdesentralisasi, organik, dan berbasis komunitas. Aktor dakwah digital seperti dai independen, influencer Muslim diaspora, dan organisasi keagamaan beroperasi tanpa mandat resmi, tetapi justru memperoleh legitimasi dari persepsi autentisitas dan kedekatan kultural dengan audiens global (Nye, 2004).

Dalam perspektif diplomasi publik, autentisitas merupakan modal penting. Audiens Barat cenderung lebih reseptif terhadap narasi Islam yang disampaikan oleh individu yang mereka anggap relatable dan tidak terikat agenda politik negara (Melissen, 2005). Hal ini menjelaskan mengapa dakwah digital yang menampilkan pengalaman sehari-hari Muslim, dialog lintas iman, dan nilai-nilai kemanusiaan sering kali lebih efektif dalam membangun pemahaman dibandingkan pernyataan resmi atau kampanye citra yang bersifat institusional.

Dakwah digital Islam juga dapat dianalisis sebagai instrumen soft power berbasis nilai keagamaan. Nye (2004) menekankan bahwa soft power bekerja melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi moral. Dalam hal ini, pesan dakwah yang menekankan keadilan sosial, kasih sayang, perdamaian, dan tanggung jawab etis berpotensi membangun daya tarik normatif yang memengaruhi persepsi publik internasional terhadap Islam.

Berbeda dengan hard power yang bersifat koersif, diplomasi publik Islam melalui dakwah

digital bekerja secara persuasif dan jangka panjang. Dampaknya tidak selalu terukur secara langsung, tetapi tercermin dalam perubahan wacana, berkurangnya stereotip, dan meningkatnya ruang dialog lintas budaya. Dalam terminologi Hubungan Internasional, praktik ini menunjukkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai normative power yang membentuk preferensi dan ekspektasi aktor lain dalam sistem internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dakwah Digital, Dialog, dan Kepercayaan Global

Salah satu kontribusi utama dakwah digital terhadap diplomasi publik Islam adalah kemampuannya membangun kepercayaan (trust-building) di tingkat masyarakat. Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam diplomasi publik, karena persepsi negatif yang mengakar sulit diubah tanpa interaksi yang konsisten dan dialogis (Cull, 2008). Dakwah digital yang membuka ruang tanya jawab, diskusi lintas iman, dan refleksi bersama membantu mereduksi jarak simbolik antara Muslim dan non-Muslim.

Dalam konteks pasca-9/11 yang ditandai oleh kecurigaan terhadap Islam, praktik dakwah digital yang dialogis berkontribusi pada proses de-securitization, yakni pergeseran Islam dari isu keamanan menuju isu sosial dan kultural (Buzan et al., 1998; Jackson, 2014). Proses ini memiliki implikasi penting bagi iklim hubungan internasional, karena persepsi publik sering kali memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri dan politik domestik di negara-negara Barat.

Meskipun memiliki potensi besar, dakwah digital sebagai diplomasi publik Islam juga

menghadapi batasan dan risiko. Pertama, fragmentasi aktor dakwah menyebabkan tidak adanya narasi tunggal yang representatif. Keragaman ini dapat menjadi kekuatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan atau kontradiksi pesan di mata audiens global (Eickelman & Anderson, 2003).

Kedua, politisasi agama dan radikalisisasi digital sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya dapat merusak kredibilitas dakwah digital sebagai instrumen diplomasi publik. Konten eksklusif dan konfrontatif justru memperkuat persepsi negatif terhadap Islam dan melemahkan upaya dialog (Roy, 2017; Tufekci, 2017). Oleh karena itu, diplomasi publik Islam melalui dakwah digital sangat bergantung pada etika komunikasi dan kesadaran konteks global.

Analisis ini menunjukkan bahwa diplomasi publik tidak lagi dapat dipahami sebagai domain eksklusif negara. Dakwah digital Islam memperluas konsep diplomasi publik dengan memasukkan aktor keagamaan sebagai produsen makna dan persepsi internasional. Hal ini menuntut pembaruan kerangka analisis Hubungan Internasional agar lebih sensitif terhadap peran agama, media digital, dan aktor non-negara dalam membentuk tatanan global kontemporer (Mandaville & Hamid, 2018).

Dengan demikian, dakwah digital dapat diposisikan sebagai bentuk diplomasi publik Islam yang bersifat kultural, normatif, dan dialogis. Ia tidak bertujuan menggantikan diplomasi negara, tetapi melengkapinya dengan membangun fondasi pemahaman dan kepercayaan di tingkat masyarakat global. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi,

kontribusi semacam ini menjadi semakin relevan dan strategis.

6.3 Negara, Organisasi Islam, dan Strategi Dakwah Digital

Perkembangan dakwah digital tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia beroperasi dalam ekosistem yang melibatkan negara, organisasi Islam, dan aktor masyarakat sipil yang saling beririsan, bernegosiasi, bahkan berkompetisi dalam memproduksi narasi keislaman di ruang digital global. Dalam perspektif Hubungan Internasional, relasi ini mencerminkan pergeseran tata kelola agama dari model hierarkis menuju pola jaringan (*networked governance*) yang lebih cair dan terdesentralisasi (Keck & Sikkink, 1998).

Negara, meskipun bukan aktor utama dalam praktik dakwah, tetap memiliki kepentingan strategis terhadap bagaimana Islam direpresentasikan di ruang digital, khususnya dalam kaitannya dengan citra internasional, stabilitas domestik, dan hubungan luar negeri. Di sisi lain, organisasi Islam memanfaatkan teknologi digital sebagai medium dakwah sekaligus sebagai sarana diplomasi kultural dan penguatan identitas transnasional.

Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, negara semakin menyadari bahwa persepsi global terhadap Islam dapat berdampak langsung pada kepentingan nasional, mulai dari hubungan diplomatik hingga kerja sama keamanan dan ekonomi (Nye, 2004). Oleh karena itu, beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim mulai mengintegrasikan narasi Islam moderat dan toleran

ke dalam strategi komunikasi internasional mereka, termasuk melalui platform digital (Mandaville, 2014).

Namun, keterlibatan negara dalam dakwah digital bersifat ambivalen. Di satu sisi, negara berperan sebagai fasilitator melalui regulasi, dukungan infrastruktur, dan diplomasi budaya. Di sisi lain, intervensi negara yang terlalu kuat berisiko mempolitisasi agama dan mengurangi kredibilitas dakwah di mata audiens global, yang cenderung lebih mempercayai aktor non-negara yang dianggap independen dan autentik (Melissen, 2005).

Dalam kerangka ini, peran ideal negara bukan sebagai produsen utama pesan dakwah, melainkan sebagai enabler pencipta lingkungan yang kondusif bagi praktik dakwah digital yang damai, inklusif, dan bertanggung jawab.

Organisasi Islam, baik yang berskala nasional maupun transnasional, memainkan peran sentral dalam mengembangkan strategi dakwah digital yang sistematis. Berbeda dengan dai individual, organisasi memiliki sumber daya, legitimasi historis, dan jaringan kelembagaan yang memungkinkan penyebaran pesan dakwah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan (Bunt, 2018).

Dalam perspektif HI, organisasi Islam dapat dipahami sebagai aktor transnasional yang berfungsi sebagai norm entrepreneurs pengusung norma-norma Islam yang ingin diproyeksikan ke ruang publik global (Finnemore & Sikkink, 1998). Melalui platform digital, organisasi Islam memproduksi konten yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menyinggung isu-isu global seperti keadilan sosial, perdamaian, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Kehadiran organisasi Islam di ruang digital juga memperkuat posisi Muslim diaspora sebagai jembatan kultural antara dunia Islam dan Barat. Dalam banyak kasus, organisasi berbasis diaspora mampu merumuskan narasi dakwah yang kontekstual, adaptif, dan sensitif terhadap realitas sosial-politik negara tempat mereka berada (Mandaville & Hamid, 2018).

Strategi dakwah digital yang efektif dalam skala global menuntut tiga pendekatan utama: adaptasi medium, kolaborasi aktor, dan kontekstualisasi pesan. Adaptasi medium merujuk pada kemampuan aktor dakwah baik negara maupun organisasi Islam untuk memahami logika platform digital, termasuk algoritma, budaya visual, dan preferensi audiens (Tufekci, 2017).

Kolaborasi aktor menjadi kunci untuk menghindari fragmentasi narasi Islam di ruang digital. Sinergi antara negara, organisasi Islam, dan komunitas sipil memungkinkan terciptanya ekosistem dakwah yang lebih seimbang, di mana otoritas, autentisitas, dan partisipasi publik saling melengkapi. Dalam terminologi HI, pola ini mencerminkan multi-actor diplomacy yang semakin dominan dalam tata kelola global (Hocking, 2011).

Sementara itu, kontekstualisasi pesan merupakan faktor penentu keberhasilan dakwah digital sebagai strategi komunikasi lintas budaya. Pesan dakwah yang sensitif terhadap konteks sosial, sejarah, dan politik audiens Barat lebih berpotensi mendorong dialog dan mengurangi resistensi dibandingkan pendekatan normatif yang bersifat satu arah (Jackson, 2014).

Meskipun menjanjikan, strategi dakwah digital juga menghadapi tantangan serius dalam aspek tata kelola dan etika. Regulasi negara yang ketat terhadap konten keagamaan dapat berbenturan dengan kebebasan berekspresi, sementara ketiadaan regulasi membuka ruang bagi distorsi, ujaran kebencian, dan radikalisasi (Roy, 2017).

Di sinilah peran organisasi Islam menjadi krusial dalam menetapkan standar etika dakwah digital yang menekankan akurasi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap perdamaian. Tanpa kerangka etis yang jelas, dakwah digital berisiko kehilangan fungsi diplomatiknya dan justru memperkuat polarisasi global.

Secara keseluruhan, hubungan antara negara, organisasi Islam, dan dakwah digital mencerminkan dinamika baru dalam Hubungan Internasional, di mana agama beroperasi melalui jaringan digital sebagai kekuatan normatif dan kultural. Strategi dakwah digital yang berkelanjutan membutuhkan pembagian peran yang jelas: negara sebagai fasilitator, organisasi Islam sebagai aktor strategis, dan masyarakat sipil sebagai penggerak utama interaksi lintas budaya.

Pendekatan semacam ini tidak hanya relevan bagi pengembangan dakwah Islam, tetapi juga bagi pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana agama berkontribusi pada diplomasi publik, perdamaian, dan tata kelola global di era digital.

6.4 Dakwah Digital sebagai Instrumen Soft Power Global

Dalam dinamika Hubungan Internasional kontemporer, kekuatan tidak lagi semata-mata

diukur melalui kapasitas militer atau tekanan ekonomi, melainkan juga melalui kemampuan membentuk preferensi, persepsi, dan legitimasi di mata aktor lain. Konsep ini dikenal sebagai soft power, yaitu kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan ide tanpa paksaan (Nye, 2004). Dalam konteks ini, dakwah digital dapat dipahami sebagai instrumen soft power global yang beroperasi di luar kerangka negara, namun memiliki dampak signifikan terhadap citra Islam dan masyarakat Muslim di tingkat internasional.

Dakwah digital menghadirkan Islam bukan sebagai kekuatan koersif, melainkan sebagai sistem nilai yang komunikatif, etis, dan relevan dengan isu-isu global. Melalui media sosial, platform video, podcast, dan forum daring, pesan-pesan keislaman menjangkau audiens lintas batas negara, budaya, dan bahasa. Proses ini menjadikan dakwah digital sebagai medium difusi nilai (norm diffusion) yang sejalan dengan mekanisme soft power dalam Hubungan Internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Soft power bekerja ketika nilai dan gagasan dipersepsikan menarik dan kredibel oleh pihak lain. Dalam hal ini, dakwah digital berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan wajah Islam yang humanis, moderat, dan kompatibel dengan prinsip universal seperti keadilan, perdamaian, solidaritas, dan kemanusiaan (Esposito, 2011). Representasi Islam semacam ini menjadi penting, terutama di tengah kuatnya narasi Islamophobia yang mendominasi diskursus politik dan media Barat (Allen, 2010).

Melalui dakwah digital, nilai-nilai Islam tidak disampaikan dalam bentuk doktrin normatif yang kaku, melainkan melalui narasi personal, dialog antariman, dan respons terhadap isu-isu aktual seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Strategi ini memperkuat daya tarik Islam sebagai sumber etika global, bukan sekadar identitas keagamaan eksklusif (Mandaville, 2014).

Dalam kerangka soft power, keberhasilan dakwah digital tidak diukur dari jumlah konversi, melainkan dari kemampuannya membentuk persepsi positif dan mengurangi resistensi terhadap Islam sebagai agama dan peradaban (Nye, 2011).

Berbeda dengan soft power negara yang sering kali terinstitusionalisasi melalui kebijakan luar negeri dan diplomasi resmi, dakwah digital beroperasi terutama melalui aktor non-negara, seperti ulama independen, influencer Muslim, komunitas diaspora, dan organisasi Islam transnasional. Dalam perspektif Hubungan Internasional, aktor-aktor ini merupakan bagian dari non-state soft power actors yang semakin berpengaruh dalam tata kelola global (Hocking, 2011).

Keunggulan aktor non-negara terletak pada tingkat autentisitas dan kepercayaan yang lebih tinggi di mata audiens global. Pesan dakwah yang disampaikan oleh individu atau komunitas sering kali dipersepsikan lebih tulus dan tidak sarat kepentingan politik dibandingkan narasi yang diproduksi oleh negara (Melissen, 2005). Hal ini menjadikan dakwah digital sebagai bentuk soft power yang bersifat horizontal, dialogis, dan partisipatif.

Dalam konteks ini, dakwah digital juga dapat dipahami sebagai praktik public diplomacy from below, di mana masyarakat sipil dan komunitas keagamaan mengambil peran aktif dalam membentuk citra Islam dan menjembatani hubungan antarbudaya di tingkat global (Cull, 2008).

Pendekatan konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menekankan bahwa realitas global dibentuk oleh ide, identitas, dan wacana yang diproduksi melalui interaksi sosial (Wendt, 1999). Dakwah digital berperan dalam proses ini dengan memproduksi dan menyebarkan narasi Islam yang berkompetisi dengan representasi negatif yang telah lama mapan dalam diskursus global.

Melalui ruang digital, identitas Islam dinegosiasikan secara terus-menerus antara aktor dakwah dan audiens global. Proses ini memungkinkan terbentuknya pemahaman Islam yang lebih plural, dinamis, dan kontekstual, sekaligus menantang konstruksi Islam sebagai "the Other" dalam politik global Barat (Said, 1978).

Dalam kerangka soft power, dakwah digital tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga membentuk struktur makna yang memengaruhi cara Islam dipahami dan diposisikan dalam sistem internasional. Dengan demikian, dakwah digital berkontribusi pada rekonstruksi identitas Islam sebagai aktor normatif dalam tatanan global.

Islamophobia dapat dipahami sebagai bentuk negative soft power, di mana representasi Islam yang bias dan stereotipikal menciptakan ketakutan dan resistensi di tingkat global (Cesari, 2013). Dalam konteks ini, dakwah digital berfungsi sebagai instrumen counter-soft power yang berupaya

menyeimbangkan bahkan menantang narasi dominan tersebut.

Melalui produksi konten yang edukatif, dialogis, dan berbasis pengalaman nyata, dakwah digital mampu meretas monopoli narasi media arus utama Barat yang sering mengaitkan Islam dengan ekstremisme dan kekerasan (Poole, 2002). Strategi ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan persuasif, sehingga sejalan dengan prinsip dasar soft power yang mengandalkan daya tarik, bukan paksaan.

Namun, efektivitas dakwah digital sebagai counter-soft power sangat bergantung pada konsistensi pesan, kredibilitas aktor, dan sensitivitas budaya. Distorsi pesan, politisasi agama, atau kecenderungan eksklusivisme justru berpotensi melemahkan daya tarik Islam di ruang global (Roy, 2017).

Meskipun memiliki potensi besar, dakwah digital sebagai instrumen soft power global juga menghadapi keterbatasan struktural. Pertama, logika algoritma platform digital sering kali lebih mengutamakan konten sensasional dibandingkan narasi moderat dan reflektif, sehingga pesan dakwah yang substansial kurang mendapatkan visibilitas optimal (Tufekci, 2017).

Kedua, fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital berisiko menghasilkan pesan yang kontradiktif, bahkan saling menegasikan, yang pada akhirnya melemahkan konsistensi citra Islam secara global (Bunt, 2018). Ketiga, ketegangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi negara dapat membatasi ruang gerak dakwah digital lintas batas.

Secara keseluruhan, dakwah digital dapat diposisikan sebagai instrumen soft power global

yang bersifat normatif, kultural, dan transnasional. Ia tidak menggantikan peran negara dalam diplomasi internasional, tetapi melengkapinya melalui jalur non-formal yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dalam lanskap Hubungan Internasional yang semakin terdigitalisasi, dakwah digital berpotensi menjadi salah satu modal normatif Islam dalam membentuk tatanan global yang lebih inklusif dan dialogis. Dengan syarat, dakwah digital dijalankan secara etis, kontekstual, dan berorientasi pada kemanusiaan universal, bukan sekadar afirmasi identitas sempit.

6.5 Implikasi bagi Hubungan Islam-Barat

Transformasi dakwah Islam ke dalam ruang digital global membawa implikasi signifikan bagi dinamika hubungan Islam-Barat yang selama ini ditandai oleh ketegangan identitas, ketimpangan representasi, dan dominasi narasi keamanan. Dalam perspektif Hubungan Internasional, dakwah digital tidak hanya berfungsi sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan kultural yang memengaruhi pola interaksi, persepsi, dan legitimasi antara masyarakat Muslim dan dunia Barat.

Implikasi ini bersifat multidimensional, mencakup aspek persepsi publik, hubungan antarbudaya, diplomasi non-negara, hingga konfigurasi baru kekuasaan normatif dalam sistem internasional.

Salah satu implikasi utama dakwah digital terhadap hubungan Islam-Barat adalah potensinya dalam merekonstruksi persepsi publik Barat terhadap Islam. Selama beberapa dekade,

representasi Islam dalam diskursus Barat didominasi oleh narasi konflik, ekstremisme, dan ancaman keamanan, terutama dalam konteks pasca-Perang Dingin dan pasca-9/11 (Said, 1978; Poole, 2002).

Melalui dakwah digital, narasi Islam tidak lagi sepenuhnya dimediasi oleh media arus utama Barat atau aktor politik negara, melainkan diproduksi langsung oleh komunitas Muslim sendiri. Proses ini memungkinkan terjadinya discursive rebalancing, di mana stereotip lama mulai ditantang oleh narasi alternatif yang lebih kompleks, humanis, dan kontekstual (Cesari, 2013).

Dalam kerangka konstruktivisme, perubahan persepsi ini berimplikasi langsung pada cara aktor Barat memahami identitas Islam dan kepentingannya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi sikap politik dan kebijakan luar negeri terhadap dunia Muslim (Wendt, 1999).

Implikasi kedua berkaitan dengan pergeseran pola interaksi antara Islam dan Barat dari hubungan yang bersifat vertikal dan institusional menuju interaksi horizontal berbasis masyarakat sipil. Dakwah digital membuka ruang dialog lintas budaya yang tidak dimediasi secara ketat oleh negara, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang lebih cair dan setara (Mandaville, 2014).

Interaksi ini tidak selalu bersifat teologis, melainkan sering kali berfokus pada isu-isu universal seperti etika, keadilan sosial, kesehatan mental, lingkungan hidup, dan solidaritas kemanusiaan. Pendekatan semacam ini memperluas basis komunikasi Islam-Barat dari sekadar relasi politik

menjadi relasi sosial dan kultural yang lebih mendalam (Esposito, 2011).

Dalam jangka panjang, intensifikasi dialog semacam ini berpotensi mengurangi logika *clash of civilizations* yang masih memengaruhi sebagian wacana politik Barat (Huntington, 1996), dengan menggantinya oleh paradigma koeksistensi dan saling pengertian.

Dakwah digital juga membawa implikasi struktural terhadap konfigurasi aktor dalam hubungan Islam-Barat. Jika sebelumnya relasi ini didominasi oleh negara dan institusi formal, maka kini aktor non-negara seperti individu, komunitas diaspora, dan organisasi Islam transnasional memainkan peran yang semakin menonjol (Keck & Sikkink, 1998).

Aktor-aktor ini berfungsi sebagai *cultural brokers* yang menjembatani perbedaan nilai dan pengalaman antara dunia Islam dan Barat. Dalam konteks ini, dakwah digital menjadi sarana diplomasi publik non-negara yang mampu menjangkau audiens yang tidak tersentuh oleh diplomasi resmi (Cull, 2008).

Implikasi dari pergeseran ini adalah meningkatnya kompleksitas hubungan Islam-Barat, di mana negara tidak lagi memiliki kontrol penuh atas produksi makna dan representasi Islam di ruang internasional.

Meskipun dakwah digital beroperasi pada level kultural, implikasinya dapat merembes ke ranah kebijakan, khususnya dalam diskursus keamanan Barat. Perubahan persepsi publik terhadap Islam berpotensi memengaruhi legitimasi kebijakan yang bersifat diskriminatif atau eksklusif terhadap

komunitas Muslim, seperti kebijakan imigrasi, pengawasan, dan kontra-terorisme (Cesari, 2013).

Dalam kerangka soft power, dakwah digital dapat berkontribusi pada pelemahan narasi securitization of Islam yaitu kecenderungan melihat Islam semata-mata sebagai isu keamanan dengan menampilkan Islam sebagai aktor sosial yang konstruktif dan kooperatif dalam tatanan global (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Namun demikian, implikasi ini tidak bersifat otomatis. Resistensi politik, kepentingan domestik, dan dinamika geopolitik tetap menjadi faktor penentu dalam pengambilan kebijakan Barat terhadap dunia Islam.

Implikasi dakwah digital terhadap hubungan Islam-Barat juga bersifat ambivalen. Di satu sisi, dakwah digital membuka peluang integrasi sosial dan kultural yang lebih besar bagi komunitas Muslim di Barat, dengan memperkuat rasa percaya diri identitas dan partisipasi publik (Roy, 2017).

Di sisi lain, fragmentasi narasi dan polarisasi algoritmik berpotensi memperkuat echo chambers, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, yang justru memperdalam jurang kesalahpahaman (Tufekci, 2017). Dalam konteks ini, dakwah digital dapat menjadi pedang bermata dua: alat dialog sekaligus potensi konflik simbolik.

Oleh karena itu, implikasi positif dakwah digital terhadap hubungan Islam-Barat sangat bergantung pada kualitas pesan, etika komunikasi, dan kesadaran lintas budaya dari para aktor dakwah.

Secara keseluruhan, dakwah digital membawa implikasi strategis bagi hubungan Islam-Barat dengan merekonfigurasi cara Islam

direpresentasikan, dipahami, dan dinegosiasikan di ruang global. Ia berkontribusi pada pergeseran dari relasi yang didominasi oleh ketakutan dan kecurigaan menuju relasi yang membuka ruang bagi dialog, empati, dan kerja sama.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, fenomena ini menegaskan bahwa hubungan Islam-Barat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material dan kepentingan geopolitik, tetapi juga oleh pertarungan makna, identitas, dan nilai di ruang digital global.

6.6 Strategi Konten dan Diplomasi Digital Islam

Sub-bab ini menguraikan bagaimana aktor dakwah digital baik individu, komunitas, organisasi, maupun lembaga negara merancang dan mengimplementasikan strategi konten untuk menjangkau audiens global dengan cara yang efektif, menarik, dan berpengaruh. Strategi konten dakwah digital tidak sekadar menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi publik berbasis budaya dan agama, yang dalam kerangka soft power dapat membentuk persepsi, opini, dan sikap publik internasional terhadap Islam (Nye, 2004; Melissen, 2005).

Pemilihan platform digital menjadi langkah strategis utama dalam dakwah modern. Setiap platform memiliki karakteristik teknis, demografis, dan sosial yang berbeda. Misalnya, YouTube memungkinkan penyebaran ceramah panjang dan konten edukatif dengan format visual; Instagram dan TikTok lebih efektif untuk konten singkat, visual, dan storytelling yang cepat viral; sementara podcast dan blog menawarkan ruang refleksi yang lebih

mendalam bagi audiens yang mencari konten naratif dan analisis keislaman. Strategi ini mempertimbangkan algoritma platform, preferensi audiens, dan potensi interaksi, sehingga pesan dakwah tidak hanya disebarluaskan tetapi juga diterima secara efektif (Campbell, 2013; Van Dijk, 2013).

Format pesan memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan audiens. Aktor dakwah digital mengombinasikan teks, gambar, video, infografik, animasi, dan live streaming untuk memaksimalkan daya tarik. Gaya narasi dapat berupa storytelling, testimonial, edukasi, dialog interaktif, hingga kampanye sosial yang mengaitkan nilai-nilai Islam dengan isu kemanusiaan global. Strategi ini memperhatikan psikologi audiens, di mana pesan yang emosional, inspiratif, dan mudah dipahami memiliki peluang lebih besar untuk dibagikan, diingat, dan memengaruhi persepsi publik (Tufekci, 2017; Sunstein, 2017).

Storytelling menjadi alat krusial dalam diplomasi digital Islam. Melalui narasi yang disusun secara kreatif, dakwah digital mampu menyampaikan nilai-nilai Islam seperti perdamaian, keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial dengan cara yang relevan bagi konteks global. Misalnya, konten dakwah yang menyoroti kontribusi Muslim dalam sains, seni, atau kemanusiaan dapat membentuk narasi alternatif yang menantang stereotip negatif dan Islamophobia. Dalam konteks ini, dakwah digital tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membentuk identitas Islam sebagai aktor kultural

global yang humanis dan inklusif (Bunt, 2018; Mandaville & Hamid, 2018).

Strategi konten juga memperhatikan segmentasi audiens berdasarkan demografi, latar belakang budaya, dan tingkat pengetahuan agama. Interaktivitas menjadi kunci untuk membangun keterlibatan, di mana audiens tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi melalui komentar, tanya jawab, polling, atau kolaborasi konten. Praktik ini meningkatkan legitimasi pesan dakwah, memperkuat hubungan antara aktor dakwah dan audiens, serta mendorong dialog lintas budaya dan lintas agama (Campbell, 2010; Hjarvard, 2011).

Dakwah digital dapat dipandang sebagai bentuk diplomasi publik non-negara (non-state public diplomacy), yang memanfaatkan konten kreatif dan media sosial untuk memengaruhi opini global tanpa intervensi negara. Dengan strategi konten yang matang, aktor dakwah digital dapat menggunakan narasi damai, toleran, dan inklusif sebagai instrumen soft power, membangun citra Islam positif, dan memengaruhi persepsi masyarakat Barat terhadap komunitas Muslim global. Hal ini sejalan dengan teori Nye (2004) bahwa soft power bergantung pada kemampuan memproyeksikan nilai, budaya, dan ide secara persuasif, bukan melalui kekuatan militer atau ekonomi.

Meski potensial, strategi konten dakwah digital menghadapi tantangan signifikan. Persaingan algoritma platform, risiko distorsi pesan, polarisasi audiens, dan kritik terhadap representasi agama dapat menghambat efektivitas strategi. Selain itu, kontestasi narasi antara aktor moderat dan ekstremis

menuntut perencanaan yang cermat untuk mempertahankan legitimasi pesan dan mencegah penyebaran konten yang dapat menimbulkan mispersepsi atau radikalisasi. Dalam hal ini, strategi konten juga harus berorientasi pada etika komunikasi, akurasi informasi, dan sensitivitas budaya lintas negara (Pariser, 2011; Gillespie, 2018).

Strategi konten dalam dakwah digital Islam merupakan perpaduan kompleks antara komunikasi kreatif, diplomasi publik, dan soft power berbasis agama. Melalui pemilihan platform yang tepat, format pesan yang menarik, narasi storytelling yang efektif, interaktivitas audiens, dan orientasi diplomasi kultural, dakwah digital mampu memperluas jangkauan global, membentuk persepsi positif, dan menantang stereotip negatif. Strategi ini menegaskan bahwa dakwah modern bukan sekadar penyampaian ajaran, tetapi juga praktik diplomasi kultural yang strategis, transnasional, dan berdampak pada hubungan Islam-Barat di era digital.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa dakwah digital Islam telah menjadi fenomena transnasional yang signifikan dalam tatanan Hubungan Internasional kontemporer. Secara konseptual, dakwah digital bukan sekadar sarana komunikasi keagamaan, tetapi juga instrumen normatif, kultural, dan strategis yang memengaruhi persepsi publik, membangun identitas kolektif, serta membentuk soft power global bagi komunitas Muslim.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi konstruktivisme dalam memahami peran agama di sistem internasional. Dakwah digital Islam menunjukkan bahwa identitas, nilai, dan wacana memiliki kapasitas nyata untuk membentuk persepsi, preferensi, dan tindakan aktor lain dalam hubungan global (Wendt, 1999). Penelitian ini juga menekankan bahwa agama sebagai aktor non-negara tidak bersifat marginal, melainkan integral dalam konfigurasi soft power, diplomasi publik, dan produksi makna di tatanan internasional.

Bagi pembuat kebijakan, penting memahami dakwah digital sebagai medium soft power non-negara yang memengaruhi persepsi global dan legitimasi politik. Strategi komunikasi harus memanfaatkan potensi dialogis dakwah digital tanpa mempolitisasi agama.

Bagi organisasi Islam, penekanan pada kualitas konten, etika komunikasi, dan adaptasi kontekstual menjadi kunci efektivitas dakwah digital sebagai instrumen soft power dan diplomasi publik. Bagi praktisi dakwah dan masyarakat umum, dakwah digital menekankan partisipasi aktif, kolaborasi lintas

komunitas, serta penekanan pada pesan inklusif dan humanis untuk mengurangi stereotip dan polarisasi.

Secara keseluruhan, dakwah digital Islam adalah fenomena multidimensional yang menghubungkan agama, media digital, dan Hubungan Internasional. Ia beroperasi sebagai instrumen soft power, sarana diplomasi publik, dan platform pembentukan identitas kolektif yang berdampak pada hubungan Islam-Barat. Keberhasilan dakwah digital dalam konteks global bergantung pada keseimbangan antara otoritas moral, kredibilitas aktor, sensitivitas budaya, dan etika komunikasi. Dengan strategi yang tepat, dakwah digital dapat memperkuat dialog, toleransi, dan kerja sama lintas budaya di era digital global.

7.2 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan pemahaman lintas disiplin antara studi Islam, media digital, dan Hubungan Internasional (HI). Implikasi teoretis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama:

Konsep soft power, sebagaimana dikembangkan oleh Nye (2004), menekankan bahwa daya tarik nilai, budaya, dan ide dapat memengaruhi aktor lain tanpa paksaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah digital Islam dapat berfungsi sebagai instrumen soft power non-negara yang efektif. Dakwah digital memungkinkan Islam memproyeksikan nilai-nilai etis, kemanusiaan, dan toleransi ke audiens global, yang berdampak pada persepsi dan preferensi publik internasional (Mandaville, 2014; Bunt, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan soft power dari domain negara ke domain aktor non-negara berbasis agama, menekankan bahwa legitimasi moral dan autentisitas aktor merupakan komponen kritis dalam memproduksi daya tarik global.

Penelitian ini mendukung perspektif bahwa diplomasi publik tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh komunitas, organisasi, dan individu yang memiliki kapasitas normatif dan kultural (Cull, 2008; Melissen, 2005). Dakwah digital Islam berperan sebagai bentuk public diplomacy from below, di mana aktor non-negara membentuk persepsi global dan memengaruhi opini publik lintas budaya.

Implikasi teoretisnya adalah perlunya revisi kerangka HI tradisional agar lebih responsif terhadap peran agama dan media digital sebagai produsen makna global, bukan hanya sebagai faktor pendukung kebijakan negara.

Pendekatan konstruktivis menekankan bahwa identitas, norma, dan wacana membentuk kepentingan dan tindakan aktor dalam sistem internasional (Wendt, 1999). Dakwah digital Islam menjadi bukti empiris bahwa interaksi sosial di ruang digital memengaruhi cara Islam dipahami, dinegosiasikan, dan diposisikan dalam persepsi publik Barat.

Temuan ini memperkuat posisi konstruktivisme sebagai kerangka analisis yang relevan untuk memahami produksi makna, identitas transnasional, dan soft power berbasis nilai dalam hubungan Islam-Barat. Selain itu, ia menegaskan bahwa kekuatan normatif agama dapat menjadi mekanisme struktural

dalam politik global, bukan sekadar variabel budaya pasif.

Penelitian ini juga menegaskan relevansi teori agama dan media digital (digital religion). Dakwah digital Islam menunjukkan bagaimana praktik keagamaan dapat ditransformasikan melalui media digital untuk mempengaruhi persepsi global, membentuk identitas transnasional, dan menciptakan ruang dialog lintas budaya (Campbell, 2012; Cheong et al., 2011).

Secara teoretis, temuan ini mendukung gagasan bahwa media digital tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai arena konstruksi sosial, legitimasi moral, dan distribusi daya tarik normatif. Dengan kata lain, media digital menjadi mediator strategis antara identitas keagamaan dan interaksi internasional.

Penelitian ini menekankan bahwa agama Islam, melalui praktik dakwah digital, dapat bertindak sebagai aktor non-negara yang berpengaruh dalam hubungan internasional. Ini memperluas literatur HI yang selama ini banyak memfokuskan pada peran negara dan institusi formal. Dakwah digital memperlihatkan bahwa aktor agama dapat memproduksi soft power, memengaruhi persepsi publik, dan memperkuat diplomasi lintas budaya (Mandaville & Hamid, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar empiris untuk mengintegrasikan studi Islam dan HI, khususnya dalam analisis peran media digital dan aktor non-negara dalam tatanan global.

Temuan ini mendorong kajian akademik lebih lanjut terkait interaksi agama, media digital, dan politik global, sekaligus menekankan pentingnya

memperhatikan konteks nilai, legitimasi, dan otoritas dalam analisis soft power dan diplomasi non-negara.

7.3 Implikasi Praktis dan Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dakwah digital Islam memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi aktor non-negara, organisasi Islam, dan pembuat kebijakan, terutama dalam konteks hubungan Islam-Barat, diplomasi publik, dan soft power global. Implikasi ini dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama: strategi dakwah digital, kebijakan publik dan diplomasi, serta pendekatan lintas budaya.

Organisasi Islam dan individu yang bergerak dalam dakwah digital perlu memahami logika platform digital termasuk algoritma, pola viralitas, dan budaya visual audiens agar pesan dakwah dapat menjangkau lebih luas dan efektif (Tufekci, 2017). Penggunaan konten interaktif, multimedia, dan storytelling berbasis pengalaman nyata dapat meningkatkan daya tarik pesan dakwah bagi audiens global.

Keberhasilan dakwah digital membutuhkan sinergi antara aktor negara sebagai fasilitator, organisasi Islam sebagai aktor strategis, dan komunitas sipil sebagai penggerak interaksi (Mandaville & Hamid, 2018; Melissen, 2005). Kolaborasi ini penting untuk menjaga konsistensi narasi, kredibilitas pesan, dan legitimasi moral dakwah.

Pesan dakwah yang efektif harus kontekstual dan adaptif terhadap perbedaan budaya, sejarah, dan realitas sosial masyarakat Barat. Hal ini membantu mengurangi resistensi, membangun dialog, dan

mempromosikan nilai Islam yang universal, seperti toleransi, keadilan, dan perdamaian (Esposito, 2011).

Negara perlu menciptakan regulasi yang memfasilitasi praktik dakwah digital yang etis dan aman, tanpa mengekang kebebasan berekspresi. Regulasi yang bijaksana dapat mencegah distorsi pesan, ujaran kebencian, dan radikalisasi, sekaligus memperkuat citra Islam yang moderat (Roy, 2017).

Dakwah digital dapat dijadikan instrumen diplomasi publik, terutama dalam meningkatkan soft power dan membangun persepsi positif terhadap Islam di mata masyarakat Barat (Nye, 2004; Bunt, 2018). Negara dan organisasi Islam dapat menggunakan dakwah digital sebagai bagian dari strategi komunikasi internasional untuk menegaskan nilai-nilai universal dan kerjasama lintas budaya.

Pengembangan kebijakan dakwah digital harus disertai mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pesan, persepsi audiens, dan dampak sosial. Analisis data ini dapat membantu aktor dakwah menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih responsif terhadap dinamika global (Tufekci, 2017).

Pelatihan literasi digital, etika komunikasi, dan manajemen konten menjadi penting untuk membekali dai dan organisasi Islam dalam menghadapi tantangan ruang digital global. Literasi ini juga mencakup kemampuan menilai dampak algoritma, konten viral, dan interaksi lintas budaya (Campbell, 2012; Cheong et al., 2011).

Dakwah digital harus dirancang sebagai medium dialog, bukan propaganda satu arah. Praktik komunikasi yang berbasis dialog, respons terhadap pertanyaan audiens, dan kolaborasi dengan

komunitas lokal di Barat dapat memperkuat persepsi positif dan membangun rasa saling percaya (Mandaville, 2014).

Untuk mencapai audiens global, dakwah digital perlu disampaikan melalui berbagai platform dan bahasa, dengan penekanan pada narasi yang relevan dengan konteks lokal. Strategi ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik pesan dakwah di masyarakat Barat yang beragam (Bunt, 2018).

Bagi Negara: Menjadi fasilitator bagi praktik dakwah digital yang etis, menyediakan regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi, dan mengintegrasikan dakwah digital sebagai bagian dari strategi soft power dan diplomasi publik.

Bagi Organisasi Islam: Membangun kapasitas digital, menjaga konsistensi pesan, dan melakukan kolaborasi lintas aktor untuk memperkuat legitimasi dakwah.

Bagi Masyarakat Sipil dan Diaspora Muslim: Menggunakan dakwah digital sebagai sarana dialog, membangun narasi positif, dan mengurangi stereotip negatif yang sering muncul di media Barat.

Secara keseluruhan, dakwah digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam konteks Hubungan Internasional. Implementasi yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kualitas konten, kredibilitas aktor, sensitivitas budaya, dan regulasi yang mendukung. Dengan pendekatan ini, dakwah digital dapat memperkuat soft power Islam, mempromosikan dialog lintas budaya, dan membangun persepsi positif terhadap komunitas Muslim di tingkat global.

7.4 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk penelitian lanjutan yang dapat memperkaya kajian lintas disiplin antara studi Islam, media digital, dan Hubungan Internasional.

Penelitian ini sebagian besar bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada dakwah digital secara umum. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi perbandingan efektivitas dakwah digital di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan podcast. Analisis multiplatform ini penting untuk memahami bagaimana karakteristik algoritma, format konten, dan perilaku audiens memengaruhi daya tarik pesan dakwah (Tufekci, 2017; Bunt, 2018).

Dakwah digital berpotensi membentuk persepsi dan identitas, namun penelitian ini masih terbatas pada analisis konten dan aktor. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris berbasis survei, eksperimen daring, atau analisis big data untuk mengukur perubahan persepsi audiens Barat terhadap Islam, efektivitas pesan dakwah, dan potensi counter-narrative terhadap Islamophobia (Cesari, 2013; Mandaville, 2014).

Pendekatan ini akan menambahkan dimensi kuantitatif yang memperkuat temuan kualitatif dan memberikan dasar empiris bagi pengembangan strategi dakwah digital.

Penelitian mendatang dapat melakukan studi perbandingan regional antara komunitas Muslim di berbagai negara Barat misalnya Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia untuk menilai bagaimana konteks budaya, sejarah migrasi, dan kebijakan lokal

memengaruhi efektivitas dakwah digital. Studi semacam ini dapat menyoroti variabel kontekstual yang memoderasi persepsi publik dan interaksi lintas budaya (Roy, 2017; Esposito, 2011).

Penelitian ini menggabungkan perspektif studi Islam dan Hubungan Internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengintegrasikan teori komunikasi, sosiologi agama, psikologi sosial, dan ilmu media digital. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan analisis lebih komprehensif mengenai bagaimana narasi dakwah dibentuk, disebarkan, dan diterima oleh audiens global (Campbell, 2012; Cheong et al., 2011).

Integrasi teori ini juga dapat membantu memahami dampak psikologis dan sosial dari dakwah digital terhadap komunitas Muslim dan masyarakat Barat.

Dakwah digital menghadirkan fragmentasi otoritas keagamaan dan potensi distorsi pesan. Penelitian lanjutan dapat meneliti kontestasi narasi antara aktor dakwah digital, termasuk ulama, influencer, organisasi, dan komunitas diaspora. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana legitimasi moral dan kredibilitas aktor memengaruhi daya tarik soft power serta risiko radikalisme atau politisasi agama (Bunt, 2018; Roy, 2017).

Studi lanjutan juga disarankan untuk menggunakan metode longitudinal guna memetakan perubahan persepsi audiens Barat terhadap Islam dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks kampanye dakwah digital yang berkelanjutan. Analisis ini dapat membantu menilai efektivitas strategi dakwah digital sebagai soft power non-negara dan memperkuat dasar teoretis untuk

konstruktivisme dalam hubungan internasional (Wendt, 1999; Nye, 2011).

Dengan meningkatnya regulasi media digital di berbagai negara Barat, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi implikasi kebijakan regulasi terhadap praktik dakwah digital, termasuk isu sensor, kebebasan berekspresi, dan distribusi konten lintas batas. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana konteks hukum memengaruhi strategi soft power berbasis dakwah digital (Roy, 2017; Melissen, 2005).

Secara keseluruhan, penelitian ini membuka peluang bagi kajian dakwah digital yang lebih empiris, komparatif, interdisipliner, dan kontekstual. Penelitian selanjutnya sebaiknya:

1. Mengkaji efektivitas dakwah digital di berbagai platform dan konteks budaya.
2. Melibatkan audiens sebagai variabel utama untuk menilai persepsi, pengaruh, dan perubahan sikap.
3. Mengintegrasikan perspektif lintas disiplin untuk memahami dinamika konten, narasi, dan dampak sosial.
4. Meneliti kontestasi otoritas dan legitimasi dakwah di ruang digital.
5. Melakukan penelitian longitudinal untuk menilai perubahan persepsi global terhadap Islam.
6. Memperhatikan pengaruh kebijakan regulasi digital terhadap praktik dakwah dan soft power.

Temuan dan rekomendasi ini tidak hanya relevan untuk pengembangan akademik, tetapi juga sebagai panduan strategis bagi organisasi Islam, pembuat kebijakan, dan komunitas Muslim dalam

merancang dakwah digital yang efektif, etis, dan berdampak pada hubungan Islam-Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi. Pustaka Pelajar.
- Adler, E. (2005). Communitarian international relations: The epistemic foundations of international relations. Routledge.
- Ahmed, S. (2014). The cultural politics of emotion. Edinburgh University Press.
- Anderson, J. W. (2003). New media, new publics: Reconfiguring the public sphere of Islam. *Social Research*, 70(3), 887-906.
- Aziz, A. (2017). Metodologi dakwah. Kencana.
- Babbie, E. R. (2016). The practice of social research. Cengage Learning.
- Bunt, G. R. (2003). Islam in the digital age: E-jihad, online fatwas and cyber Islamic environments. Pluto Press.
- Bunt, G. R. (2009). iMuslims: Rewiring the house of Islam. University of North Carolina Press.
- Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: Global Muslim networks in the digital age. University of North Carolina Press.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
- Campbell, H. A. (2010). When religion meets new media. Routledge.

- Campbell, H. A. (Ed.). (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2013). *Communication power*. Oxford University Press.
- Cesari, J. (2013). *Why the West fears Islam: An exploration of Muslims in liberal democracies*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cull, N. J. (2009). *Public diplomacy: Lessons from the past*. Figueroa Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (Eds.). (2003). *New media in the Muslim world: The emerging public sphere*. Indiana University Press.
- Esposito, J. L. (2011). *What everyone needs to know about Islam*. Oxford University Press.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887-917.
- Gottschalk, I., & Greenberg, G. (2008). *Islamophobia: Making Muslims the enemy*. Rowman & Littlefield.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Haynes, J. (2014). *Religion in global politics*. Routledge.

- Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: A theory of the media as agents of religious change. *Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook*, 6(1), 9–26.
- Hoover, S. M. (2006). *Religion in the media age*. Routledge.
- Hoover, S. M. (2016). *The media and religious authority*. Rutgers University Press.
- Hocking, B. (2005). *Rethinking public diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Hopf, T. (1998). The promise of constructivism in international relations theory. *International Security*, 23(1), 171–200.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Jervis, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Lean, N. (2012). *The Islamophobia industry: How the Right manufactures fear of Muslims*. Pluto Press.
- Lövheim, M. (2013). *Media, religion and gender: Key issues and new challenges*. Routledge.
- Mandaville, P. (2014). *Global political Islam*. Routledge.
- Mandaville, P., & Hamid, S. (2018). *Islam as statecraft: How governments use religion in foreign policy*. Brookings Institution Press.

- Melissen, J. (2005). *The new public diplomacy: Soft power in international relations*. Palgrave Macmillan.
- Nasr, S. H. (2003). *Islam: Religion, history, and civilization*. HarperCollins.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109.
- Nye, J. S. (2011). *The future of power*. Public Affairs.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Piela, A. (2012). *Muslim women's online self-representations: Faith identity on YouTube*. Routledge.
- Poole, E. (2002). *Reporting Islam: Media representations of British Muslims*. I.B. Tauris.
- Qardhawi, Y. (2002). *Tsaqafah al-da'iyah*. Maktabah Wahbah.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new ummah*. Columbia University Press.
- Roy, O. (2017). *Jihad and death: The global appeal of Islamic State*. Oxford University Press.
- Runnymede Trust. (1997). *Islamophobia: A challenge for us all*. Runnymede Trust.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Said, E. W. (1981). *Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world*. Pantheon Books.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.

- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and state*. Cambridge University Press.
- Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.

TENTANG PENULIS



Ahmad Zakiyuddin merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Langlangbuana (UNLA) serta Universitas Al-Ghifari Bandung. Dalam perannya sebagai akademisi,

beliau aktif mengembangkan kajian dan praktik di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan dinamika komunikasi di era digital.

Selain menjalankan tugas pengajaran, Ahmad Zakiyuddin juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi profesional dan keilmuan, di antaranya Perhimpunan Humas Perguruan Tinggi Indonesia (Perhumani), Persatuan Dosen Republik Indonesia (PDRI), serta ICMI Muda.

Beliau kerap dipercaya sebagai narasumber dalam berbagai seminar, lokakarya, dan webinar, baik di tingkat regional maupun nasional. Di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, Ahmad Zakiyuddin aktif menulis artikel dan melakukan riset yang berfokus pada pengembangan Ilmu Komunikasi.



Di era digital global, dakwah Islam tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Buku ini mengeksplorasi bagaimana dakwah digital bertransformasi menjadi medium global yang menjangkau berbagai komunitas, membentuk identitas transnasional, dan memengaruhi persepsi masyarakat Barat terhadap Islam.

Mengintegrasikan perspektif studi Islam, teori media digital (digital religion), konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, dan konsep soft power, e-book ini menelusuri peran ulama, influencer, komunitas diaspora, dan organisasi Islam sebagai aktor non-negara yang memproduksi narasi keagamaan.

Analisis mendalam menunjukkan bagaimana dakwah digital menjadi counter-narrative terhadap Islamophobia, memperkuat dialog antarbudaya, dan membangun citra Islam yang inklusif dan humanis.

Dilengkapi dengan implikasi teoretis dan praktis, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi dakwah, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang ingin memahami dinamika Islam di ruang digital global. Temukan bagaimana agama, media, dan diplomasi publik bersinergi membentuk soft power dan persepsi lintas budaya di abad ke-21.